



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 15/PHPU. WAKO-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 17/PHPU. WAKO-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 39/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 136/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 152/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 169/PHPU.WAKO-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 257/PHPU.GUB-XXIII/2025**

PERIHAL

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM WALI KOTA
KOTA LANGSA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI KABUPATEN
MESUJI
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI KABUPATEN
DELI SERDANG
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM WALI KOTA
KOTA BATAM
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM GUBERNUR
SULAWESI SELATAN
TAHUN 2024**

ACARA

**PEMERIKSAAN PERSIDANGAN
(MENDENGARKAN JAWABAN TERMOHON, KETERANGAN PIHAK
TERKAIT DAN KETERANGAN BAWASLU SERTA PENGESAHAN
ALAT BUKTI PARA PIHAK)**

J A K A R T A

SENIN, 20 JANUARI 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 15/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Wali Kota Kota Langsa Tahun 2024
- Pemohon: Maimul Mahdi dan Nurzahri

PERKARA NOMOR 17/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Wali Kota Kota Langsa Tahun 2024
- Pemohon: Fazlun Hasan dan Meutia Apriani

PERKARA NOMOR 39/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Mesuji Tahun 2024
- Pemohon: Suprpto dan Fuad Amrulloh

PERKARA NOMOR 136/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2024
- Pemohon: Iwan Hermawan dan M. Faisal Ranopa

PERKARA NOMOR 152/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024
- Pemohon: M. Ali Yusuf Siregar dan Bayu Sumantri Agung

PERKARA NOMOR 169/PHPU.WAKO-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Wali kota Kota Batam Tahun 2024
- Pemohon: Nuryanto dan Hardi Selamat Hood

PERKARA NOMOR 257/PHPU.GUB-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2024
- Pemohon: Moh. Ramdhan Pomanto dan Azhar Arsyad. S.

TERMOHON

KPU RI

ACARA

Pemeriksaan Persidangan (Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Keterangan Bawaslu serta Pengesahan Alat Bukti Para Pihak)

**Senin, 20 Januari 2025, Pukul 07.57 – 12.06 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|-------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

1. Mardian Wibowo
2. Rahmadiani Putri Nilasari
3. Rima Yuwana Y.

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 15/PHPU.WAKO-XXIII/2025:**

1. Misra Purnamawati
2. Fadjri

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 17/PHPU.WAKO-XXIII/2025:

1. Dian Yuliani
2. M. Nur

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 136/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Ahmad Willi Marfi
2. Okvyan Kelly Alamsyah

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 152/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Sofyan Syahputra
2. Paujjah Hanum

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 169/PHPU.WAKO-XXIII/2025:

1. Erik Setiawan
2. Yustitia Pudji Asia Putra

F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 257/PHPU.GUB-XXIII/2025:

1. Donal Fariz
2. Adhisti Aprilia Ma'as

G. Termohon:

- | | |
|---------------------------|------------------------------|
| 1. Ahmad Adiwijaya | (KPU Prov. Sulawesi Selatan) |
| 2. Bahtiar | (KPU Kota Langsa) |
| 3. Samingan | (KPU Kab. Mesuji) |
| 4. Arip Farawita | (KPU Kab. OKU Selatan) |
| 5. Relis Yanthy Panjaitan | (KPU Kab. Deli Serdang) |
| 6. Bosar Hasibuan | (KPU Kota Batam) |

H. Kuasa Hukum Termohon:

1. Chairul Azmi
2. Nofrizal

3. Ainul Yaqin
4. Frans Handrajadi
5. Gian Budy Arian
6. Fajar Maulana Yusuf
7. Anjar Nawan Yusky Eko Prasetyo
8. Hifdzil Alim

I. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 15/PHPU.WAKO-XXIII/2025:

1. Muslim A. Gani
2. Guntur Setiawan

J. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 17/PHPU.WAKO-XXIII/2025:

1. Muslim A. Gani
2. Girinda Sandino

K. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 39/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Aida Mardatillah
2. M. Ridho

L. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 136/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Tareq Muhammad Aziz Elven
2. Denny Indrayana

M. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 152/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Doni Hendra Lubis
2. Ahmad Sofyan Hussein Rambe

N. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 169/PHPU.WAKO-XXIII/2025:

1. Denny Indrayana
2. Muhammad Rizki Ramadhan

O. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 257/PHPU.GUB-XXIII/2025:

1. Anwar
2. Damang

P. Bawaslu:

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Mardiana Rusli | (Bawaslu Sulawesi Selatan) |
| 2. Andarias Duma | (Bawaslu Sulawesi Selatan) |
| 3. Fauzi Fazhari | (Panwaslih Kota Langsa) |
| 4. Rizki Mulia Ramazan | (Panwaslih Kota Langsa) |
| 5. Deden Cahyono | (Bawaslu Kab. Mesuji) |
| 6. Wahyu Eko Prasetyo | (Bawaslu Kab. Mesuji) |
| 7. Doni Candra | (Bawaslu Ogan Komering Ulu Selatan) |
| 8. Komang Wardiasa | (Bawaslu Ogan Komering Ulu Selatan) |
| 9. Zulkifli Nasib M. T. Lumban Gaol | (Bawaslu Kab. Deli Serdang) |
| 10. Febryandi Ginting | (Bawaslu Kab. Deli Serdang) |
| 11. Antonius Itoloha Gaho | (Bawaslu Kota Batam) |
| 12. Jazuli | (Bawaslu Kota Batam) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 07.57 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]**

Kita mulai, ya. Bismillahirrahmaanirrahiim.
Sidang untuk Perkara 15, 17, 136, 39, 169, 152, 257 PHPU Wali Kota, Bupati, dan Gubernur dibuka. Persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu.

Pagi ini kita ... agenda kita adalah Pendahuluan dengan Agenda Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Bawaslu.

Oleh karena itu, diingatkan kepada kita semua. Pertama, masing-masing diberi waktu maksimal 15 menit untuk menyampaikan pokok-pokok ... apa ... jawabannya.

Yang kedua, yang disampaikan itu apa yang dituliskan di dalam keterangan, jawaban, dan segala macamnya.

Yang ketiga, tidak ada interupsi dalam fase ini, kecuali ditanya oleh Hakim.

Dan yang keempat, kalau ada yang mau menyerahkan bukti, baik tambahan kalau Pemohon, kalau Termohon, Pihak Terkait dan Bawaslu, disilakan. Nanti kalau sudah mendekati sidang selesai, ya itu sudah enggak bisa diverifikasi. Jadi, nasibnya ditentukan nanti, apakah permohonannya akan lanjut ke pembuktian berikutnya atau tidak. Itu saja, mudah-mudahan ini berjalan dengan lancar.

Kita mulai dari Kota Langsa, Perkara Nomor 15, dipersilakan.

2. KUASA HUKUM TERMOHON: CHAIRUL AZMI [02:02]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

Perkenankan kami dari Kuasa Hukum KIP Kota Langsa. Kami atas nama Chairul Azmi dan kawan-kawan menyampaikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor 15, yang mana dalam jawaban ini kami menyampaikan Eksepsi terkait dengan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Kedudukan Hukum Pemohon, mohon dianggap telah dibacakan, Yang Mulia.

3. KETUA: SALDI ISRA [02:34]

Ya.

4. KUASA HUKUM TERMOHON: CHAIRUL AZMI [02:36]

Yang mana perolehan suara Pemohon dan perbedaan perolehan suara pasangan calon peraih suara terbanyak dengan Pemohon adalah sekitar=11.325 suara atau sebesar 14,36%. Sehingga melewati batas maksimal jumlah selisih peroleh ... perolehan suara untuk dapat mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Langsa Tahun 2024.

Selanjutnya, Dalam Pokok Permohonan. Dalam jawaban, kami menyampaikan gambaran umum tentang Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Langsa Tahun 2024, yang mana dalam Termohon selaku Penyelenggara dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Langsa telah menjalankan penyelenggaraan dan tahapan pemilihan wali kota (...)

5. KETUA: SALDI ISRA [03:35]

Itu enggak usah, ya. Langsung, langsung kepada (...)

6. KUASA HUKUM TERMOHON: CHAIRUL AZMI [03:36]

Ya ... dan wakil wali kota dengan berdasarkan prinsip-prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, profesional ... profesional, akuntabel, efektif, dan efisien, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya, mohon dianggap telah dibacakan, Yang Mulia.

7. KETUA: SALDI ISRA [03:51]

Ya.

8. KUASA HUKUM TERMOHON: CHAIRUL AZMI [03:52]

Kemudian, di ini juga kami menyampaikan sebagai ... untuk kepada Majelis Hakim untuk memberi gambaran yang jelas tentang perolehan suara pasangan calon di tingkat kecamatan, ada 5 kecamatan di Kota Langsa, Yang Mulia.

9. KETUA: SALDI ISRA [04:07]

Ya.

10. KUASA HUKUM TERMOHON: CHAIRUL AZMI [04:07]

Mohon dianggap telah dibacakan.

11. KETUA: SALDI ISRA [04:09]

5 kecamatan, berapa TPS?

12. KUASA HUKUM TERMOHON: CHAIRUL AZMI [04:12]

Ada dua rat ... 260 ... 246 TPS, Yang Mulia.

13. KETUA: SALDI ISRA [04:22]

246 TPS, ya?

14. KUASA HUKUM TERMOHON: CHAIRUL AZMI [04:23]

Ya.

15. KETUA: SALDI ISRA [04:24]

Itu dari 246 TPS itu, berapa TPS yang ... apakah semua TPS itu, Pemohon tanda tangan? Kuas ... apanya ... saksinya?

16. KUASA HUKUM TERMOHON: CHAIRUL AZMI [04:35]

Tanda tangan.

17. KETUA: SALDI ISRA [04:36]

Semua TPS?

18. KUASA HUKUM TERMOHON: CHAIRUL AZMI [04:36]

Di ... TPS. Ya.

19. KETUA: SALDI ISRA [04:37]

Semua TPS, oke. Jadi du ... dari 246 tidak ada yang tidak tanda tangan, ya?

20. KUASA HUKUM TERMOHON: CHAIRUL AZMI [04:42]

Ya.

21. KETUA: SALDI ISRA [04:42]

Sejak dari mana, mulai tidak tanda tangannya?

22. KUASA HUKUM TERMOHON: CHAIRUL AZMI [04:44]

Di kecamatan, yang hadir cuma Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3.

23. KETUA: SALDI ISRA [04:49]

Mulai dari kecamatan, Pemohon sudah tidak tanda tangan lagi?

24. KUASA HUKUM TERMOHON: CHAIRUL AZMI [04:53]

Ta ... tanda tangan, di ... di kecamatan tanda tangan.

25. KETUA: SALDI ISRA [04:56]

Ya.

26. KUASA HUKUM TERMOHON: CHAIRUL AZMI [04:57]

Di kabupaten, enggak tanda tangan.

27. KETUA: SALDI ISRA [04:58]

Di kabupaten ndak tanda tangan, ya? Ini yang Pemohon di sini, yang Nomor 3, ya?

28. KUASA HUKUM TERMOHON: CHAIRUL AZMI [05:04]

Nomor 3.

29. KETUA: SALDI ISRA [05:05]

Oke. Jadi Nomor 3 ini, masih tanda tangan di tingkat kecamatan?

30. KUASA HUKUM TERMOHON: CHAIRUL AZMI [05:10]

Masih.

31. KETUA: SALDI ISRA [05:12]

Di kabupaten?

32. KUASA HUKUM TERMOHON: CHAIRUL AZMI [05:13]

Di kabupaten tidak tanda tangan, melampirkan form keberatan.

33. KETUA: SALDI ISRA [05:15]

Oke, apa inti keberatannya?

34. KUASA HUKUM TERMOHON: CHAIRUL AZMI [05:18]

Ya, telah terjadi money politics dalam penyelenggaraan.

35. KETUA: SALDI ISRA [05:20]

Oke, lanjut.

36. KUASA HUKUM TERMOHON: CHAIRUL AZMI [05:22]

Ya. Selanjutnya terkait dengan Permohonan Pemohon, yang mana setelah kami cermati dalil-dalil Permohonan Pemohon terkait dengan pelanggaran-pelanggaran, itu ditujukan terhadap Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Nomor Urut 2 dan Panwaslih Kota Langsa, dan tidak terkait dengan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara, yang mana menurut kami, Termohon, atas semua pelanggaran-pelanggaran tersebut, sudah ada lembaga yang berwenang untuk menangani dan menindaklanjutinya, seperti Lembaga Bawaslu atau Panwaslih Provinsi Aceh, yang diberikan kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi pemilihan yang terjadi secara TSM.

37. KETUA: SALDI ISRA [06:09]

Ada, enggak laporan Bawaslu yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU?

38. KUASA HUKUM TERMOHON: CHAIRUL AZMI [06:14]

Selama penyelenggaraan, kita tidak pernah (...)

39. KETUA: SALDI ISRA [06:14]

Rekomendasi.

40. KUASA HUKUM TERMOHON: CHAIRUL AZMI [06:17]

Terima saran atau rekomendasi apa pun dari panwa ... apa ... Bawaslu atau Panwaslih Kota Langsa, Yang Mulia.

41. KETUA: SALDI ISRA [06:23]

Jadi gini, kan ada 6 laporan atau pengaduan ke Panwaslih Kota Langsa, dimana laporan tersebut dihentikan tanpa alasan yang jelas. Oh, itu KPU ya ... Bawaslu, ya?

42. KUASA HUKUM TERMOHON: CHAIRUL AZMI [06:34]

Bawaslu, Yang Mulia.

43. KETUA: SALDI ISRA [06:35]

Oke.

44. KUASA HUKUM TERMOHON: CHAIRUL AZMI [06:36]

Kita tidak (...)

45. KETUA: SALDI ISRA [06:36]

Nah, coba Anda jelaskan soal TSM itu. TSM berupa Keterlibatan ASN dan Kepala Desa atau Pejabat Keuchik itu. Apa? Keuchik, ya? Silakan.

46. KUASA HUKUM TERMOHON: CHAIRUL AZMI [06:50]

Ke siapa, Yang Mulia?

47. KETUA: SALDI ISRA [06:51]

Ya, Saudara.

48. KUASA HUKUM TERMOHON: CHAIRUL AZMI [06:52]

Ya, kalau kami dalam penyelenggaraan, tidak ada pernah menerima saran dan rekomendasi apa pun terkait itu.

49. KETUA: SALDI ISRA [06:58]

Ya.

50. KUASA HUKUM TERMOHON: CHAIRUL AZMI [06:58]

Dan terkait pelanggaran-pelanggaran yang dimohonkan itu, ya kami juga ... mungkin ada lembaga yang lebih berwenang untuk menanggapi, kami tidak menanggapi lagi, Yang Mulia.

51. KETUA: SALDI ISRA [07:06]

Bukan. Maksudnya, ada enggak? Sampai rekomendasi pengawas itu ke KPU?

52. KUASA HUKUM TERMOHON: CHAIRUL AZMI [07:11]

Tidak ada, Yang Mulia.

53. KETUA: SALDI ISRA [07:12]

Tidak ada.
Bawaslu, mana Bawaslu? Ada laporan ndak, ke Anda?

54. PANWASLIH: RIZKI MULIA RAZAMAN [07:18]

Laporan terkait ASN, ada masuk dari salah satu pelapor.

55. KETUA: SALDI ISRA [07:25]

Ya.

56. PANWASLIH: RIZKI MULIA RAZAMAN [07:26]

Dan kita sudah rekomendasikan ke pimpinan dari ASN tersebut, yang dimana (...)

57. KETUA: SALDI ISRA [07:32]

Oke. Itu ... itu ada, ya.

58. PANWASLIH: RIZKI MULIA RAZAMAN [07:34]

Ada.

59. KETUA: SALDI ISRA [07:34]

Ap ... apa laporan lain lagi? Ada ndak, Anda rekomendasikan ke KPU?

60. PANWASLIH: RIZKI MULIA RAZAMAN [07:38]

Tidak, tidak.

61. KETUA: SALDI ISRA [07:39]

Tidak ada, ya. Lanjut.

62. KUASA HUKUM TERMOHON: CHAIRUL AZMI [07:40]

Ya, selanjutnya dalam Permohonan Pemohon, di ... ada beberapa TPS di desa yang disebutkan, telah kami sampaikan juga, Yang Mulia, dalam jawaban kami (...)

63. KETUA: SALDI ISRA [07:51]

Ya.

64. KUASA HUKUM TERMOHON: CHAIRUL AZMI [07:44]

Untuk memberi gambaran jelas bagi Yang Mulia Majelis Hakim. Dan selanjutnya, Petitum, Yang Mulia.

65. KETUA: SALDI ISRA [08:00]

Oke. Lanjut.

66. KUASA HUKUM TERMOHON: CHAIRUL AZMI [08:02]

Dilanjutkan ... dibacakan oleh Saudara Prinsipal, Yang Mulia.

67. KETUA: SALDI ISRA [08:06]

Ini kalau Prinsipal disuruh baca, nanti dipotong honor segala, ini.

68. TERMOHON: BAHTIAR [08:10]

Izin, Yang Mulia (...)

69. KETUA: SALDI ISRA [08:06]

Silakan.

70. TERMOHON: BAHTIAR [08:10]

Untuk melanjutkan, Petitem.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Perkara.

Menolak Permohonan Pemohon seluruhnya.

Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Independent Pemilihan Kota Langsa Nomor 555, Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Langsa Tahun 2024, bertanggal 2 Desember 2024, pukul 13.55 WIB. Dan menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Langsa Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut.

71. KETUA: SALDI ISRA [09:10]

Enggak usah lagi, itu kan sama (...)

72. TERMOHON: BAHTIAR [09:11]

Siap (...)

73. KETUA: SALDI ISRA [09:11]

Dengan yang Saudara (...)

74. TERMOHON: BAHTIAR [09:11]

Yang Mulia.

75. KETUA: SALDI ISRA [09:12]

Tetapkan, kan? Oke, ada lagi? Cukup?

76. KUASA HUKUM TERMOHON: CHAIRUL AZMI [09:18]

Selanjutnya, hormat kami Kuasa Hukum Termohon, Chairul Azmi dan kawan-kawan, ditandatangani.

Untuk Perkara Nomor 17, Yang Mulia, dilanjutkan oleh (...)

77. KETUA: SALDI ISRA [09:23]

Sa ... satu-satu dulu.

78. KUASA HUKUM TERMOHON: CHAIRUL AZMI [09:24]

Rekan saya (...)

79. KETUA: SALDI ISRA [09:23]

Satu-satu dulu (...)

80. KUASA HUKUM TERMOHON: CHAIRUL AZMI [09:24]

Nofrizal.

81. KETUA: SALDI ISRA [09:26]

Satu-satu dulu.

82. KUASA HUKUM TERMOHON: CHAIRUL AZMI [09:27]

Oh, satu-satu, ya.

83. KETUA: SALDI ISRA [09:28]

Sekarang 15 dulu. Pihak Terkait, atau ini Pihak Terkaitnya sama juga?

84. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 15/PHPU.WAKO-XXIII/12025: MUSLIM A. GANI [09:34]

Sama.

85. KETUA: SALDI ISRA [09:35]

Nah, oke, kalau begitu, lanjut Nomor 17.

86. KUASA HUKUM TERMOHON: NOFRIZAL [09:28]

Baik, Yang Mulia, terima kasih, Assalamualaikum wr. wb.
Perkenalkan saya Nofrizal Kuasa dari Komisi Independent Pemilihan Kota Langsa.

87. KETUA: SALDI ISRA [09:53]

Ya.

88. KUASA HUKUM TERMOHON: NOFRIZAL [09:53]

Izin, Yang Mulia, ingin menyampaikan jawaban dari Termohon dalam Perkara Nomor 17.

Dalam Eksepsi.

Kami berpandangan bahwasanya Mahkamah tidak berwenang dalam memutus perkara ini dengan alasan. Yang pertama, bahwasanya Termohon ... dalam Permohonan Termohon, Pemohon tidak menjadikan ob ... keputusan dari Komisi Independent (...)

89. KETUA: SALDI ISRA [10:24]

Kemarin sudah diingatkan, soal angka atau tidak tuh, jangan dibilang tidak berwenang juga, sudah puluhan kali diputus oleh Mahkamah.

90. KUASA HUKUM TERMOHON: NOFRIZAL [10:30]

Baik, Yang Mulia.

91. KETUA: SALDI ISRA [10:31]

Kalau tidak berwenang, enggak pada datang mereka ke sini nih.

92. KUASA HUKUM TERMOHON: NOFRIZAL [10:34]

Siap.

93. KETUA: SALDI ISRA [10:34]

Harus carikan alasan yang lain.

94. KUASA HUKUM TERMOHON: NOFRIZAL [10:35]

Siap.

95. KETUA: SALDI ISRA [10:36]

Ya? Bukan ... silakan, lanjut.

96. KUASA HUKUM TERMOHON: CHAIRUL AZMI [10:37]

Ya.

97. KETUA: SALDI ISRA [10:39]

Apa? Diizinkan.

98. KUASA HUKUM TERMOHON: CHAIRUL AZMI [10:41]

Terkait Perkara 17 itu objek Permohonannya, bukan surat keputusan (...)

99. KETUA: SALDI ISRA [10:36]

Ya, nanti kan itu biar itu kami pertimbangkan.

100. KUASA HUKUM TERMOHON: CHAIRUL AZMI [10:47]

Ya, itu maksud (...)

101. KETUA: SALDI ISRA [10:48]

Lanjut.

102. KUASA HUKUM TERMOHON: CHAIRUL AZMI [10:50]

Di Kewenangannya, Yang Mulia.

103. KUASA HUKUM TERMOHON: NOFRIZAL [10:52]

Baik, Yang Mulia, saya lanjutkan (...)

104. KETUA: SALDI ISRA [10:51]

Ya.

105. KUASA HUKUM TERMOHON: NOFRIZAL [10:52]

Alasan yang kedia ... kedua, yaitu Pemohon juga keliru dalam menentukan para pihak, yaitu Komisi Independen Pemilihan atau KIP Kota Langsa semestinya sebagai Termohon. Namun dalam Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, diajukan terhadap Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Langsa Nomor Urut 2.

106. KETUA: SALDI ISRA [11:18]

Oke, apa lagi?

107. KUASA HUKUM TERMOHON: NOFRIZAL [11:19]

Yang kedua, Tenggang waktu Dalam Pengajuan Permohonan.
Menurut hemat Termohon, Pemohon melewati tenggang waktu mengajukan Permohonan.

108. KETUA: SALDI ISRA [11:28]

Berapa hari lewatnya?

109. KUASA HUKUM TERMOHON: NOFRIZAL [11:19]

Satu hari, Yang Mulia.

110. KETUA: SALDI ISRA [11:28]

Oke, lanjut.

111. KUASA HUKUM TERMOHON: NOFRIZAL [11:34]

Yang ketiga, Kedudukan Hukum atau Legal Standing Pemohon.
Menurut Termohon, pemohon ... pem ... Permohonan Pemohon tidak lengkap. Bahwasanya Pemohon hanya salah satu dari pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Langsa Tahun 2024, tidak menyertakan wakilnya dalam Permohonan.

112. KETUA: SALDI ISRA [11:52]

Jadi tidak pasangan calon, ya?

113. KUASA HUKUM TERMOHON: NOFRIZAL [11:53]

Ya, Yang Mulia

114. KETUA: SALDI ISRA [11:54]

Oke, apa lagi?

115. KUASA HUKUM TERMOHON: NOFRIZAL [11:56]

Berikutnya, Pemohon tidak memenuhi syarat ambang batas, menurut kami, Yang Mulia.

116. KETUA: SALDI ISRA [12:00]

Oke, lanjut.

117. KUASA HUKUM TERMOHON: NOFRIZAL [12:02]

Lanjut, dalam per ... Dalam Pokok Permohonan. Kami Termohon telah melaksanakan pemilihan ini dengan jujur (...)

118. KETUA: SALDI ISRA [12:13]

Itu samalah dengan tadi, ya.

119. KUASA HUKUM TERMOHON: NOFRIZAL [12:14]

Ya, siap.

120. KETUA: SALDI ISRA [12:15]

Oke, jangan diulangi lagi kalau yang sama. Apa ... langsung Petitem saja kalau begitu.

121. KUASA HUKUM TERMOHON: NOFRIZAL [12:19]

Baik, Yang Mulia.

122. KETUA: SALDI ISRA [12:21]

Ada poin penting yang mau disampaikan?

123. KUASA HUKUM TERMOHON: CHAIRUL AZMI [12:26]

Untuk Perkara Nomor 17, tidak ada poin penting dan Petitemnya sama seperti yang (...)

124. KETUA: SALDI ISRA [12:28]

Oke. Sama, ya?

125. KUASA HUKUM TERMOHON: CHAIRUL AZMI [12:29]

Ya.

126. KETUA: SALDI ISRA [12:29]

Oke, dibacakan jugalah biar didengar (...)

127. KUASA HUKUM TERMOHON: CHAIRUL AZMI [12:31]

Dibacakan juga.

128. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUSLIM A. GANI [12:33]

Petitum (...)

129. KUASA HUKUM TERMOHON: CHAIRUL AZMI [12:36]

Ya, untuk Petitum, Yang Mulia. Perkara 17 saya lanjutkan.

130. KETUA: SALDI ISRA [12:39]

Ya.

131. KUASA HUKUM TERMOHON: CHAIRUL AZMI [12:39]

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Perkara.

Menolak Permohonan Pemohon seluruhnya.

Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 555 Tahun 2024. Selanjutnya, Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Wali Kota dan Wali Kota Langsa Tahun 2024, yang benar adalah sebagai berikut.

Mohon dianggap telah dibacakan, Yang Mulia.

132. KETUA: SALDI ISRA [13:02]

Oke.

133. KUASA HUKUM TERMOHON: CHAIRUL AZMI [13:02]

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon, Chairul Azmi dan kawan-kawan, ditandatangani.

Terima kasih, Yang Mulia.

134. KETUA: SALDI ISRA [13:12]

Oke. Terima kasih, Pak Chairul.

Silakan Pihak Terkait, langsung dua-duanya saja.

135. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 15 DAN 17/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MUSLIM A. GANI [13:20]

Dari 15, Yang Mulia.

136. KETUA: SALDI ISRA [13:22]

Ya, 15 dulu, baru 17.

137. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 15 DAN 17/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MUSLIM A. GANI [13:23]

Baik, terima kasih.

Izin, Yang Mulia. Kami dari Pihak Terkait dari Partai Golkar dari DPP Partai Golkar.

138. KETUA: SALDI ISRA [13:42]

Pihak Terkaitnya bukan partai, ya. Enggak ada partai di sini.

139. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 15 DAN 17/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MUSLIM A. GANI [13:45]

Tim Kuasa Hukum.

140. KETUA: SALDI ISRA [13:46]

Nah, kalau itu baru benar.

141. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 15 DAN 17/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MUSLIM A. GANI [13:47]

Dari DPP Partai Golkar.

142. KETUA: SALDI ISRA [12:49]

Ya?

143. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 15 DAN 17/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MUSLIM A. GANI [13:49]

Siap.

144. KETUA: SALDI ISRA [13:51]

Tetap saja mewakili pasangan calon. Nah, itu. Jadi, bukan mewakili partai karena di sini adalah pasangan calon.

145. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 15 DAN 17/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MUSLIM A. GANI [13:59]

Siap, Yang Mulia.

146. KETUA: SALDI ISRA [14:00]

Lanjut.

147. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 15 DAN 17/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MUSLIM A. GANI [14:01]

Baik, terima kasih.

Kami tidak lagi membacakan tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi, sebagaimana yang disampaikan tadi bahwa ini telah menjadi kewenangan daripada Mahkamah Konstitusi.

Secara umum bahwa Keterangan Pihak Terkait ini tidak jauh berbeda apa yang disampaikan oleh Pihak Terkait dari Panwaslih.

148. KETUA: SALDI ISRA [14:32]

Ada komunikasi enggak dengan Panwas?

149. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 15 DAN 17/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MUSLIM A. GANI [14:35]

Tidak ada.

150. KETUA: SALDI ISRA [14:36]

Oh, tidak ada, ya?

151. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 15 DAN 17/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MUSLIM A. GANI [14:37]

Tidak ada sama sekali, Yang Mulia.

152. KETUA: SALDI ISRA [14:38]

Kalau ada, juga enggak apa-apa kok, namanya juga komunikasi. Silakan.

153. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 15 DAN 17/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MUSLIM A. GANI [14:42]

Baik. Sebelum kami menyampaikan secara umum saja, tentu kami ingin sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim bahwa Kota Langsa ini jumlah penduduknya 192.630.

154. KETUA: SALDI ISRA [14:59]

Ya.

155. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 15 DAN 17/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MUSLIM A. GANI [15:00]

Dengan total DPT Kota Langsa sekitar 128.861. Kemudian jumlah TPS tadi sudah disebutkan dan 66 desa dengan jumlah suara sah keseluruhannya itu 78.870[sic!].

Saat ini, baik sebelum dan Pasca Pemilihan Kepala Daerah di Kota Langsa, itu berada dalam keadaan kondusif, ini yang perlu kami sampaikan (...)

156. KETUA: SALDI ISRA [15:28]

Anda kayak aparat keamanan saja ini.

157. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 15 DAN 17/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MUSLIM A. GANI [15:30]

Siap.

158. KETUA: SALDI ISRA [15:31]

Itu kalau aparat keamanan, boleh melaporkan kondusif (...)

159. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 15 DAN 17/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MUSLIM A. GANI [15:35]

Siap.

160. KETUA: SALDI ISRA [15:35]

Ini kalau Advokat melaporkan kondusif itu, mau ini apa sebenarnya (...)

161. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 15 DAN 17/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MUSLIM A. GANI [15:39]

Artinya, situasi (...)

162. KETUA: SALDI ISRA [15:41]

Silakan.

163. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 15 DAN 17/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MUSLIM A. GANI [15:41]

Sangat baik sekali, tidak ada gejolak apa pun, baik sebelum, bahkan sesudah pilkada itu dilaksanakan.

164. KETUA: SALDI ISRA [15:51]

Artinya sebagai (...)

165. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 15 DAN 17/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MUSLIM A. GANI [15:52]

Sebagaimana disampaikan tadi, Yang Mulia. Bahwa (...)

166. KETUA: SALDI ISRA [15:54]

Kalau diputus MK, nanti akan ada gejolak begitu?

167. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 15 DAN 17/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MUSLIM A. GANI [15:56]

Ya.

168. KETUA: SALDI ISRA [15:57]

Ya, katanya ... menakuti-nakuti MK, enggak boleh takut-takutin MK.

169. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 15 DAN 17/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MUSLIM A. GANI [16:02]

Tidak, tidak.

170. KETUA: SALDI ISRA [16:04]

Silakan.

171. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 15 DAN 17/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MUSLIM A. GANI [16:04]

Kami juga ingin sampaikan begini, Yang Mulia.
Bahwa tadi sudah disampaikan bahwa ada 6 yang didalilkan oleh Pihak Pemohon bahwa telah terjadi pelanggaran. Jadi, ada 6 laporan.

172. KETUA: SALDI ISRA [16:17]

Ya.

173. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 15 DAN 17/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MUSLIM A. GANI [16:18]

Bahwa terhadap 6 laporan tersebut, ini telah dinyatakan tidak memenuhi syarat materiil oleh Bawaslu ... Panwaslih.

Dan ada satu yang didalilkan oleh Pemohon bahwa dengan keterlibatan ASN di dalam ... di dalam ... terse ... di dalam masa kampanye, dan ini telah diteruskan oleh pihak Panwaslih kepada Pj Bupati atau Pemerintah Kota Langsa. Namun oleh Pemerintah Kota Langsa, melalui Pj Wali Kota, telah mengeluarkan suratnya, tidak terbukti ada keterlibatan dari pada pihak ASN dalam masa kampanye.

Nah, saya kira itu secara umum yang perlu kami sampaikan. Selebihnya, saya kira bisa langsung disampaikan oleh rekan kami.

174. KETUA: SALDI ISRA [17:11]

Ya. Itu poin intinya sudah disampaikan, ya?

175. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 15 DAN 17/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MUSLIM A. GANI [17:15]

Sudah, Yang Mulia.

176. KETUA: SALDI ISRA [17:16]

Kalau begitu, langsung Petitum.

177. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 15/PHPU.WAKO-XXIII/2025: GUNTUR SETIAWAN [17:21]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Mohon melanjutkan. Petitum.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Permohonan.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan tetap berlaku Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 555 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Langsa Tahun 2024, tertanggal 2 Desember 2024 yang ditetapkan dan diumumkan pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024, pukul 13.55 WIB.

Hormat kami, Tim Kuasa Hukum Pihak Terkait.

178. KETUA: SALDI ISRA [18:29]

Oke. Cukup, ya?

179. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 15/PHPU.WAKO-XXIII/2025: GUNTUR SETIAWAN [18:30]

Demikian, Yang Mulia.

180. KETUA: SALDI ISRA [18:32]

Dua dua-nya begitu, ya? Dua dua nomor, ya?

181. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 15 DAN 17/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MUSLIM A. GANI [18:35]

Tidak, tidak, Yang Mulia.

182. KETUA: SALDI ISRA [18:36]

Sekarang 17, silakan yang 17!
Ini yang ditengah tukang bagi bola saja ini.

183. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 17/PHPU.WAKO-XXIII/2025: GIRINDRA SANDINO [18:44]

Terima kasih, Yang Mulia.

184. KETUA: SALDI ISRA [18:44]

Termasuk nanti tukang bagi apa, tukang bagi fee gitu. Silakan.

185. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 17/PHPU.WAKO-XXIII/2025: GIRINDRA SANDINO [18:47]

Perkenalkan, saya Girindra Sandino, Kuasa Hukum dari Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Langsa Tahun 2024.

Kami singkat saja, pada Perkara 17 ini, yang dimohonkan oleh Fazlun Hasan, Permohonan itu berupa laporan, Yang Mulia. Bahkan Pihak Pemohon menyebut kami sebagai terlapor, sehingga itu menjadi ... sudah menjadi pelanggaran proses yang menjadi wewenang Bawaslu atau DKPP.

Yang kemudian, Yang Mulia. Bahwa Kedudukan Hukum Pemohon selisihnya sangat jauh, Yang Mulia, di sini 21,9%, sehingga tidak memenuhi syarat, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang 10 Tahun 2016.

Kemudian, tenggang waktu juga melebihi mele ... melewati seperti yang diatur dalam PMK Nomor 3 Tahun 2024. Laporan pelapor, saya menyebutnya pelapor karena Pemohon menyebut dirinya di Permohonan sebagai pelapor, saya kira obscuur libel, tidak jelas, dan kabur.

Kemudian kami langsung ke Petitum.

186. KETUA: SALDI ISRA [20:08]

Ya.

187. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 17/PHPU.WAKO-XXIII/2025: GIRINDRA SANDINO [20:08]

Dalam Eksepsi.

Mengaburkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Menyatakan Laporan Pelapor tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Laporan.

Satu, menolak Laporan Pelapor untuk seluruhnya.

Menyatakan sah dan tetap berlaku Keputusan KIP (Komisi Independen Pemilihan) Kota Langsa Nomor 555 Tahun 2024, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, tertanggal 2 Desember 2024 yang ditetapkan hari Senin, 2 Desember 2024, pukul 13.55 WIB.

Terima kasih, Yang Mulia.

188. KETUA: SALDI ISRA [20:45]

Terima kasih. Ini kalau "Lapor, Pak" acaranya ini, pernah lihat Tv, enggak? Ada acara itu, ya.

189. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 17/PHPU.WAKO-XXIII/2025: GIRINDRA SANDINO [20:52]

Kenal, Yang Mulia.

190. KETUA: SALDI ISRA [20:52]

Pernah ... kenal, ya?

191. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 17/PHPU.WAKO-XXIII/2025: GIRINDRA SANDINO [20:53]

Ya.

192. KETUA: SALDI ISRA [20:54]

Oke, Terima kasih.

Sekarang Bawaslu, Silakan.

193. PANWASLIH: FAUZI FAZHARI [20:59]

Izin, Yang Mulia.

194. KETUA: SALDI ISRA [21:00]

Panwaslih, ya?

195. PANWASLIH: FAUZI FAZHARI [21:01]

Ya. Benar, Yang Mulia.

196. KETUA: SALDI ISRA [21:02]

Silakan.

197. PANWASLIH: FAUZI FAZHARI [21:03]

Kami dari Panwaslih Kota Langsa, ingin menyampaikan. Bahwa Permohonan pada Dalil Perselisihan Hasil, dari angka 1 halaman 14 terdapat ... terhadap Dalil Pemohon, berikut Keterangan Panwaslih Kota Langsa.

A. Tindak lanjut laporan dan temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan Dalil Permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan. Keterangan Panwaslih Kota Langsa berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon.

Satu, bahwa Panwaslih Kota Langsa telah melakukan tugas pencegahan dengan memberikan surat imbauan kepada KIP Kota Langsa tentang Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kota melalui Surat Nomor 022, dianggap dibacakan.

Yang kedua, bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslih Kota Langsa pada Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kota Langsa yang dilaksanakan oleh KIP, sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Penguasaan Nomor 010, dianggap dibacakan, beserta lampirannya berupa Model D.Hasil, dianggap dibacakan. Adapun muatan hasil penguasaan tersebut, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut, data perolehan suara pada pasangan calon, dianggap dibacakan.

2.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslih Kota Langsa yang termuat dalam LHP Nomor 010, dianggap dibacakan. Yang pada pokoknya, terhadap keberatan tersebut, tidak ada ... apa ... tidak ada ... protes masalah ... mengenai hasil, akan tetapi ada dari pasangan calon nomor ... saksi dari Calon Nomor Urut 1 dan 3, itu membuat kejadian khusus.

198. KETUA: SALDI ISRA [23:03]

Apa kejadian khususnya?

199. PANWASLIH: FAUZI FAZHARI [23:04]

Kejadian khususnya, untuk hasil tidak ditolak, tapi karena pelanggaran money politics yang dipersoalkan.

200. KETUA: SALDI ISRA [23:11]

Oke.

201. PANWASLIH: FAUZI FAZHARI [23:12]

Oke.

202. KETUA: SALDI ISRA [23:13]

Dalam perjalanan, ada laporan money politics ke ... ke ... apa ... Panwaslih?

203. PANWASLIH: FAUZI FAZHARI [23:17]

Ada.

204. KETUA: SALDI ISRA [23:18]

Ada laporannya?

205. PANWASLIH: FAUZI FAZHARI [23:19]

Ada.

206. KETUA: SALDI ISRA [23:19]

Apa tindak lanjutnya?

207. PANWASLIH: FAUZI FAZHARI [23:20]

Tindak lanjutnya, semua sudah ditindaklanjuti dan semua ada juga yang direkomendasikan sampai ke penyidik kepolisian dan statusnya itu dihentikan karena tidak cukup 2 alat bukti, gitu, Yang Mulia.

208. KETUA: SALDI ISRA [23:33]

Oke. Jadi Panwas sudah merekomendasikan, tapi tidak ditindaklanjuti karena tidak cukup 2 alat bukti, ya?

209. PANWASLIH: FAUZI FAZHARI [23:40]

Iya, benar. Itu jatuhnya di penyidik kepolisian, Yang Mulia.

210. KETUA: SALDI ISRA [23:44]

Oke. Berapa laporan ke Panwas selama proses ini, sampai ke penghitungan suara atau rekap di tingkat kabu ... apa ... kota itu?

211. PANWASLIH: FAUZI FAZHARI [23:56]

20, Yang Mulia.

212. KETUA: SALDI ISRA [23:57]

Dar ... oke. Dari 20 laporan itu, berapa yang Saudara tindak lanjuti?

213. PANWASLIH: FAUZI FAZHARI [24:03]

Semua ditindaklanjuti, Yang Mulia.

214. KETUA: SALDI ISRA [24:06]

Semua ditindaklanjuti ya, tapi tidak ada yang terbukti?

215. PANWASLIH: FAUZI FAZHARI [24:10]

Tidak ada yang terbukti ... ini, Yang Mulia, yang mengenai netralitas ASN, itu ada yang terbukti, Yang Mulia. Itu (...)

216. KETUA: SALDI ISRA [24:16]

Siapa yang melakukan?

217. PANWASLIH: FAUZI FAZHARI [24:17]

Yang melakukan ini dari pihak ASN berupa pembuatan grup WhatsApp, yang mana adminnya sebagai ASN dan di situ juga ada pasangan calon, yaitu calon wali kotanya langsung juga sebagai admin.

218. KETUA: SALDI ISRA [24:39]

Oke, dilaporkan ke mana?

219. PANWASLIH: FAUZI FAZHARI [24:41]

Dilaporkan ke Panwaslih, Yang Mulia.

220. KETUA: SALDI ISRA [24:43]

Lalu, apa tindak lanjutnya?

221. PANWASLIH: FAUZI FAZHARI [24:45]

Tindakannya direkomendasikan sebagai pelanggaran.

222. KETUA: SALDI ISRA [24:48]

Ya.

223. PANWASLIH: FAUZI FAZHARI [24:49]

Kemudian, diteruskan ke pihak Pj Wali Kota, akan tetapi sampai dengan tanggal 5 Desember, Pihak Panwaslih tidak menerima balasan surat dari Pihak Pj Wali Kota, Yang Mulia.

224. KETUA: SALDI ISRA [24:59]

Oke, berapa ang ... berapa orang anggota grup WA itu? Ada, enggak? Anda ketahui enggak, jumlah orangnya?

225. PANWASLIH: FAUZI FAZHARI [25:06]

Untuk yang pastinya, saya tidak ketahui, Yang Mulia, karena yang dilaporkan itu berupa capture-an screenshot dari pelapor.

226. KETUA: SALDI ISRA [25:15]

Oke, jadi tidak diketahui juga berapa orang jumlahnya, ya?

227. PANWASLIH: FAUZI FAZHARI [25:18]

Ya, kalau untuk admin-nya, diketahui, Yang Mulia.

228. KETUA: SALDI ISRA [25:20]

Oh, adminnya siapa?

229. PANWASLIH: FAUZI FAZHARI [25:22]

Adminnya Oknum ASN Ihwan dan Rizki ... Muhammad Rizki, Yang Mulia.

230. KETUA: SALDI ISRA [25:34]

Oke, ada lagi yang lain, poin yang mau disampaikan? Untuk dua-dua Permohonan ini?

231. PANWASLIH: FAUZI FAZHARI [25:40]

Oke. Siap, Yang Mulia. Mengenai netralitas ... money politics dulu, Yang Mulia.

232. KETUA: SALDI ISRA [25:44]

Ya.

233. PANWASLIH: FAUZI FAZHARI [26:07]

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan tentang praktik pembagian money uang.

234. KETUA: SALDI ISRA [26:12]

Money uang itu apa maksudnya itu?

235. PANWASLIH: FAUZI FAZHARI [26:14]

Maaf, money politics.

236. KETUA: SALDI ISRA [26:16]

Ya, banyak uang maksudnya. Jangan guguplah! Masa sudah money, uang lagi?

237. PANWASLIH: FAUZI FAZHARI [26:22]

Maaf, Yang Mulia. Money politics.

238. KETUA: SALDI ISRA [26:26]

Belum kopi ... belum minum kopi pagi kayaknya. Kalau di Aceh pagi-pagi kan, minum kopi dulu, kan?

239. PANWASLIH: FAUZI FAZHARI [26:30]

Benar, Yang Mulia.

240. KETUA: SALDI ISRA [26:32]

Ini jangan-jangan susah mencari kopi Aceh di Jakarta.

241. PANWASLIH: FAUZI FAZHARI [26:34]

Susah mencarinya, benar.

242. KETUA: SALDI ISRA [26:35]

Silakan!

243. PANWASLIH: FAUZI FAZHARI [26:38]

Oke, yang dilakukan secara sistematis pada angka 2 halaman 15, angka 5.2 halaman 19 sampai dengan 24, angka 5.3 halaman 32 poin c.

Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut Keterangan Panwaslih Kota Langsa. Satu. Bahwa Panwaslih Kota Langsa menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 015, dianggap dibacakan.

Terhadap laporan tersebut, Panwaslih Kota Langsa mengeluarkan formulir 7 pemberitahuan tentang status laporan tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya menghentikan laporan karena tidak didapati dua alat bukti yang cukup.

Keterangan Panwaslih Kota Langsa terhadap dalil a quo pada bagian halaman 19 sampai dengan 23, poin b, c, d, e, g, h, l, k. Panwaslih Kota Langsa telah melakukan pencegahan dengan menerbitkan Surat Imbauan Nomor 015, dianggap dibacakan, yang dituju kepada masing-masing pasangan calon, yang pada pokoknya pasangan calon atau tim kampanye, dan/atau anggota partai politik, dan/atau gabungan partai politik, relawan, atau pihak lainnya, dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya yang mempengaruhi penyelenggara pemilihan, dan/atau pemilih sebagai imbalan.

244. KETUA: SALDI ISRA [28:09]

Oke, apa lagi?

245. PANWASLIH: FAUZI FAZHARI [28:13]

Berdasarkan pengawasan PPG, yaitu pemilihan ... Pengawasan Pemilihan Gampong Asam Peutik, sebagainya termuat dalam LHP 004, dianggap dibacakan. Yang pada pokoknya, PPG menemukan adanya dugaan pilkada berupa money politics, dilakukan oleh dua orang yang diketahui sebagai Tim Sukses Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Nomor Urut 2.

246. KETUA: SALDI ISRA [28:49]

Dua orang, ya?

247. PANWASLIH: FAUZI FAZHARI [28:49]

Ya, benar.

248. KETUA: SALDI ISRA [28:50]

Timses. Apa yang dilakukan dua orang ini?

249. PANWASLIH: FAUZI FAZHARI [28:53]

Dilakukan ... bentuk pelanggaran yang dilakukan, tim sukses diduga akan membagikan sejumlah uang kepada warga melalui Fajaruddin. Bukti pendukung lainnya, saat PPG Asam Peutik melakukan observasi langsung di tempat kejadian, mendapati bukti berupa amplop berisi uang tunai pecahan Rp50.000,00 yang akan dibagikan.

250. KETUA: SALDI ISRA [29:16]

Tapi belum dibagikan, sudah ketangkap?

251. PANWASLIH: FAUZI FAZHARI [29:18]

(Ucapan tidak terdengar jelas) sudah ditangkap.

252. KETUA: SALDI ISRA [29:19]

Oke.

253. PANWASLIH: FAUZI FAZHARI [29:20]

Oke. Terhadap hasil pengawasan tersebut, terdapat laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan ke Kantor Panwaslih Kota

Langsa, sebagaimana termuat dalam Formulir Laporan Nomor 015, dianggap dibacakan.

Bahwa Panwaslih Kota Langsa menerima laporan dugaan pelanggaran tersebut dengan Nomor 015, dianggap dibacakan, yang pada pokoknya pelapor menerangkan bahwa pada hari Selasa, pukul 16.36, terjadi dugaan money politics di salah satu rumah warga Desa Asam Peutik.

Kemudian Panwaslih Kota Langsa melakukan kajiawan ... kajian awal dugaan pelanggaran dengan Nomor 015, dianggap dibacakan, yang pada pokoknya menyimpulkan laporan tersebut memenuhi syarat formal dan materiil, serta merekomendasikan laporan tersebut diregistrasi dan dilimpahkan ke Sentra Gakkumdu untuk ditindaklanjuti.

254. KETUA: SALDI ISRA [30:22]

Itu tadi yang di ... tidak dilanjutkan karena tidak cukup dua bukti?

255. PANWASLIH: FAUZI FAZHARI [30:26]

Ya, jatuhnya di ini ... dibacakan lagi atau?

256. KETUA: SALDI ISRA [30:30]

Di ... enggak usah, di Gakkumdu kan ada ... ada panwas juga, kan?

257. PANWASLIH: FAUZI FAZHARI [30:32]

Ada, Yang Mulia.

258. KETUA: SALDI ISRA [30:34]

Kenapa di Anda punya dua bukti, di panwas katanya tidak (...)

259. PANWASLIH: FAUZI FAZHARI [30:37]

Di Gakkumdu juga direkomendasikan, dinaikkan satu tingkat ke atasnya.

260. KETUA: SALDI ISRA [30:42]

Oh.

261. PANWASLIH: FAUZI FAZHARI [30:42]

Karena ini, ternyata di proses penyidikan, di SP3-kan dikarenakan pada proses pengeledahan yang dilakukan itu oleh warga, bukan dari pihak kepolisian. Begitu, Yang Mulia.

262. KETUA: SALDI ISRA [30:58]

Oke. Ada lagi yang mau ditambahkan? Cukup?

263. PANWASLIH: FAUZI FAZHARI [31:01]

Cukup, Yang Mulia.

264. KETUA: SALDI ISRA [31:06]

Oke. Untuk Nomor 17, ada yang mau ditambahkan? Tadi kan baru 15, itu.

265. PANWASLIH: FAUZI FAZHARI [31:07]

Nomor 17 yang pada pokoknya, sebenarnya semuanya sama.

266. KETUA: SALDI ISRA [31:13]

Sama.

267. PANWASLIH: FAUZI FAZHARI [31:13]

Akan tetapi, perbedaannya hanya di ... yang didalilkan tentang jumlah TPS, Yang Mulia.

268. KETUA: SALDI ISRA [31:19]

Ya. Apa penjelasannya soal dalil jumlah TPS itu?

269. PANWASLIH: FAUZI FAZHARI [31:31]

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan ... ini untuk Perkara 17, Yang Mulia.

270. KETUA: SALDI ISRA [31:36]

Ya.

271. PANWASLIH: FAUZI FAZHARI [31:37]

Jumlah TPS yang tersebar di lima kecamatan.

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon, Pemohon a quo tidak terdapat laporan ataupun temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan. Panwaslih Kota Langsa telah melakukan tugas pencegahan dengan memberikan imbauan kepada KIP Kota Langsa (...)

272. KETUA: SALDI ISRA [31:58]

Oke, sudah. Kalau itu, sudah, ya.

273. PANWASLIH: FAUZI FAZHARI [31:59]

Oke, sudah. Baik (...)

274. KETUA: SALDI ISRA [32:00]

Tidak ada laporan, temuan Anda ada enggak?

275. PANWASLIH: FAUZI FAZHARI [32:02]

Tidak ada juga, ya, akan tetapi, Yang Mulia, di sini ingin saya luruskan bahwasanya ... Pemohon mendalihkan bahwasanya jumlah TPS yang tersebar di 5 kecamatan, 220.

276. KETUA: SALDI ISRA [32:14]

Ya.

277. PANWASLIH: FAUZI FAZHARI [32:15]

Akan tetapi, berdasarkan pengawasan Panswa ... Panwaslih Kota Langsa, jumlah TPS di 5 kecamatan berjumlah 246. Sama seperti yang disampaikan oleh KIP Kota Langsa. Itu saja, Yang Mulia. Selebihnya, yang pada pokoknya, pendalilan antara Perkara 15 dan 17, sama, Yang Mulia.

278. KETUA: SALDI ISRA [32:36]

Oke, cukup. Terima kasih.

279. PANWASLIH: FAUZI FAZHARI [32:38]

Terima kasih, Yang Mulia.

280. KETUA: SALDI ISRA [32:40]

Silakan miknya dimatikan. Nah, cukup.

281. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 15 DAN 17/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MUSLIM A. GANI [32:42]

Izin, Yang Mulia. Koreksi, izin koreksi dalam Perkara Nomor 15 apa yang disampaikan oleh (...)

282. KETUA: SALDI ISRA [32:48]

Sudah, jatah Anda sudah selesai. Ya.

283. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 15 DAN 17/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MUSLIM A. GANI [32:51]

Terima kasih.

284. KETUA: SALDI ISRA [32:53]

Kan tadi sudah dikasih slot waktu masing-masing, miknya dimatikan itu. Oke, nanti biar kita lihat kalau ada yang salah. Kalau ada yang salah, Anda tanggung jawab terhadap Prinsipalnya. Ini gara-gara Kuasa Anda, jadi ada keliru ini. Cukup, ya.

Sekarang kita masuk ke Perkara 136, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Jadi ... apa ... OKU Selatan. Silakan, waktunya 15 menit. Silakan.

285. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 15/PHPU.WAKO-XXIII/2025: FADJRI [33:22]

Izin, izin, Yang Mulia, kami ingin sedikit memberikan ini, terkait Perkara Nomor 15 sebelum masuk ini.

286. KETUA: SALDI ISRA [33:28]

Ndak, ini sekarang enggak ada lagi bagian Anda, sudah selesai.

287. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 15/PHPU.WAKO-XXIII/2025: FADJRI [33:31]

Terima kasih, Yang Mulia.

288. KETUA: SALDI ISRA [33:32]

Ya. Nanti kalau mau bertanya, di ujung nanti.

Silakan, Pihak Terkait ... apa ... Termohon. Pindah ini yang apa ... yang Langsa bisa pindah ke belakang biar ... apa ... OKU Selatan maju. Tadi kan sudah diingatkan, sekarang hak konstitusional Termohon, Pihak Terkait, Bawaslu, ya kan? Nanti kalau ada, terakhir, baru nanti dikasih kesempatan.

289. KUASA HUKUM TERMOHON: GIAN BUDY ARIAN [34:35]

Mohon izin menyampaikan jawab ... menyampaikan jawaban, Yang Mulia.

290. KETUA: SALDI ISRA [34:39]

Silakan.

291. KUASA HUKUM TERMOHON: GIAN BUDY ARIAN [34:41]

Dalam Perkara Nomor 136 ini, setelah kami pelajari, ada dua Eksepsi, Yang Mulia.

292. KETUA: SALDI ISRA [34:50]

Ya.

293. KUASA HUKUM TERMOHON: GIAN BUDY ARIAN [34:51]

Pertama, terkait dengan Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Kedua, mengenai dengan obscur libel.

294. KETUA: SALDI ISRA [34:58]

Oke.

295. KUASA HUKUM TERMOHON: GIAN BUDY ARIAN [34:59]

Untuk (...)

296. KETUA: SALDI ISRA [35:00]

Kalau kewenangan apa?

297. KUASA HUKUM TERMOHON: GIAN BUDY ARIAN [35:01]

Untuk kewenangan itu sendiri, setelah kami pelajari bahwa Pokok Permohonan Pemohon ini mempermasalahkan dua. Pelanggaran ... satu, pelanggaran ... pelanggaran administratif. Kedua, pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif.

Bahwa pokok permasalahan pertama, sebagaimana yang dimaksud angka 1 huruf a, Pemohon telah menguraikan pada angka 3 halaman 9 sampai dengan 26, yaitu adanya pelanggaran administratif yang dilakukan oleh Termoh ... Termohon, bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Begitupun pelanggaran tersebut.

298. KETUA: SALDI ISRA [35:41]

Anda pernah baca putusan-putusan MK enggak? Tadi sudah saya ingatkan. Sejak tahun zaman baheula sudah ditegaskan di sini bahwa ini, bukan hanya soal angka.

299. KUASA HUKUM TERMOHON: GIAN BUDY ARIAN [35:50]

Baik, Yang Mulia.

300. KETUA: SALDI ISRA [35:51]

Ya.

301. KUASA HUKUM TERMOHON: GIAN BUDY ARIAN [35:52]

Baik.

302. KETUA: SALDI ISRA [35:53]

Jadi kalau Anda katakan itu juga bukan kewenangan, berarti Anda ndak pernah baca putusan MK itu.

303. KUASA HUKUM TERMOHON: GIAN BUDY ARIAN [35:57]

Baik, Yang Mulia. Jadi (...)

304. KETUA: SALDI ISRA [35:59]

Yang lain!

305. KUASA HUKUM TERMOHON: GIAN BUDY ARIAN [36:00]

Jadi hanya ... hanya dua, pelanggaran administrasi dan struktur ... terstruktur, sistematis, dan masif.
Untuk Eksepsi.

306. KETUA: SALDI ISRA [36:16]

Ya.

307. KUASA HUKUM TERMOHON: GIAN BUDY ARIAN [36:17]

Terkait dengan obscur libel. Bahwa Permohonan Pemohon mencantumkan penghitungan suara versi Pemohon, yang mana terdapat perbedaan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon.

Bahwa Pemohon, tidak menguraikan penghitungan pelanggaran kualitatif, dengan perhitungan suara versi Pemohon. Hanya itu saja, Yang Mulia.

308. KETUA: SALDI ISRA [36:40]

Oke. Apa lagi? Pokoknya ada? Di Pokok Permohonan?

309. KUASA HUKUM TERMOHON: GIAN BUDY ARIAN [36:45]

Ada, Yang Mulia.

310. KETUA: SALDI ISRA [36:45]

Nah, silakan.

311. KUASA HUKUM TERMOHON: GIAN BUDY ARIAN [36:48]

Untuk per ... Pokok Permohonan, kami mengambil beberapa sampel yang dipermasalahkan oleh Pemohon, Yang Mulia.

312. KETUA: SALDI ISRA [36:57]

Ya.

313. KUASA HUKUM TERMOHON: GIAN BUDY ARIAN [36:59]

Pertama, dugaan adanya pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali. Bahwa kami tanggapi, nama-nama yang diduga memohon ... mencoblos dua kali tersebut, memang tidak terdaftar di TPS yang lain.

Kedua, dugaan adanya pemalsuan tanda tangan. Tanggapan kami, bahwa terdapat pada saat pencoblosan, ada beberapa pemilih yang berusia lanjut dan meminta KPPS untuk ditemani atau untuk menandatangani daftar hadir tersebut.

314. KETUA: SALDI ISRA [37:39]

Itu dia minta KP ... KPPS?

315. KUASA HUKUM TERMOHON: GIAN BUDY ARIAN [37:42]

Betul, Yang Mulia.

316. KETUA: SALDI ISRA [37:43]

Eenggak ditemani oleh keluarga?

317. KUASA HUKUM TERMOHON: GIAN BUDY ARIAN [37:45]

Ditemani, Yang Mulia.

318. KETUA: SALDI ISRA [37:46]

Ada keluarganya, ya?

319. KUASA HUKUM TERMOHON: GIAN BUDY ARIAN [37:48]

Ya.

320. KETUA: SALDI ISRA [37:48]

Anda yakin?

321. KUASA HUKUM TERMOHON: GIAN BUDY ARIAN [37:49]

Yakin, Yang Mulia.

322. KETUA: SALDI ISRA [37:51]

KPU? Benar begitu?

323. TERMOHON: ARIP FARAWITA [37:54]

Sesuai keterangan dari KPPS, kita melakukan klarifikasi, begitu, Yang Mulia.

324. KETUA: SALDI ISRA [38:01]

Begitunya, bagaimana?

325. TERMOHON: ARIP FARAWITA [38:04]

Berkaitan dengan yang didalilkan, yang (...)

326. KETUA: SALDI ISRA [38:08]

Ke ... tadi kan dikatakan, bahwa ada orang lewat usia atau sudah uzur, datang ke TPS, lalu ditandatangani oleh KPPS.

327. TERMOHON: ARIP FARAWITA [38:18]

Daftar hadirnya.

328. KETUA: SALDI ISRA [38:19]

Daftar hadirnya?

329. TERMOHON: ARIP FARAWITA [38:20]

Ya.

330. KETUA: SALDI ISRA [38:20]

Itu, pertanyaan saya, didampingi anggota keluarga atau tidak?

331. TERMOHON: ARIP FARAWITA [38:24]

Didampingi.

332. KETUA: SALDI ISRA [38:25]

Kenapa tidak tanda tangan anggota keluarganya? Minta KPPS, yang tanda tangan. Ada penjelasannya?

333. TERMOHON: ARIP FARAWITA [38:32]

Penjelasan dari KPPS yang bersangkutan meminta, Badan [sic!] ad hoc kita KPPS, yang untuk menandatangani.

334. KETUA: SALDI ISRA [38:39]

Oke, lanjut.

335. KUASA HUKUM TERMOHON: GIAN BUDY ARIAN [38:46]

Selisih sur ... surat suara dan daftar hadir. Yang terjadi di TPS 01, terdapat selisih dua sur ... surat suara yang hilang berdasarkan daftar hadir Nomor 363. Berdasarkan Form C.Hasil, suara sah dan tidak sah adalah sejumlah 361. Maka, Pemohon berasumsi bahwa terdapat dua selisih surat suara yang hilang.

Tanggapan dari kami, bahwa pada saat penandatanganan daftar hadir, ada dua orang yang salah menandatangani daftar hadir. Dengan demikian, si pemilih ini menandatangani lagi di kolom yang sudah disediakan untuk si pemilih.

Begitu, Yang Mulia.

336. KETUA: SALDI ISRA [39:34]

Coba dijelaskan ini, yang terakhir ini. Bagaimana tadi ceritanya?

337. KUASA HUKUM TERMOHON: GIAN BUDY ARIAN [39:38]

Jadi begini, Yang Mulia. Pemohon mendalilkan bahwa ada dua selisih suara yang hilang.

338. KETUA: SALDI ISRA [39:47]

Selisih dua suara, sehingga tidak ditemukan dua suara. Di TPS mana, itu?

339. KUASA HUKUM TERMOHON: GIAN BUDY ARIAN [39:52]

Di TPS 1, Desa Tanjung Sari.

340. KETUA: SALDI ISRA [39:57]

Oke.

341. KUASA HUKUM TERMOHON: GIAN BUDY ARIAN [39:57]

Oke, tanggapan kami ... apa ... bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon, Hasil C dengan daftar hadir itu berbeda, begitu, Yang Mulia. Kami tanggapi bahwa ada dua orang yang salah menandatangani di kolom tanda tangan daftar hadir.

342. KETUA: SALDI ISRA [40:20]

Oke.

343. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 136/PHPU.BUP-XXIII/2025: GIAN BUDY ARIAN [40:21]

Sehingga menandatangani kembali di kolom yang sama, ya, di kolom yang ... yang sudah disediakan untuk si Pemohon tersebut, Yang Mulia.

344. KETUA: SALDI ISRA [40:30]

Ya, ini kan salah, tanda tangan ... salah tanda tangan?

345. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 136/PHPU.BUP-XXIII/2025: GIAN BUDY ARIAN [40:32]

Betul.

346. KETUA: SALDI ISRA [40:34]

Lalu, ditandatangani lagi?

347. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 136/PHPU.BUP-XXIII/2025: GIAN BUDY ARIAN [40:33]

Betul, Yang Mulia.

348. KETUA: SALDI ISRA [40:34]

Ya, oke, terus?

349. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 136/PHPU.BUP-XXIII/2025: GIAN BUDY ARIAN [40:37]

Itu yang menjadi berbeda ... selisih (...)

350. KETUA: SALDI ISRA [40:40]

Sehingga terjadi selisih itu?

351. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 136/PHPU.BUP-XXIII/2025: GIAN BUDY ARIAN [40:42]

Betul, Yang Mulia.

352. KETUA: SALDI ISRA [40:44]

Karena dia menghitung berdasarkan tanda tangan yang ada?

353. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 136/PHPU.BUP-XXIII/2025: GIAN BUDY ARIAN [40:46]

Betul, Yang Mulia.

354. KETUA: SALDI ISRA [40:47]

Tidak berdasarkan surat suara?

355. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 136/PHPU.BUP-XXIII/2025: GIAN BUDY ARIAN [40:48]

Betul, Yang Mulia.

356. KETUA: SALDI ISRA [40:49]

Nah, di TPS itu saksinya tanda tangan atau tidak?

357. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 136/PHPU.BUP-XXIII/2025: GIAN BUDY ARIAN [40:52]

Tanda tangan, Yang Mulia.

358. KETUA: SALDI ISRA [40:53]

Oke. Apa lagi yang mau disampaikan?

359. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 136/PHPU.BUP-XXIII/2025: GIAN BUDY ARIAN [40:55]

Kemudian, ada identitas yang di luar Ogan Komering Ulu Selatan.

360. KETUA: SALDI ISRA [41:03]

Ya, jadi?

361. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 136/PHPU.BUP-XXIII/2025: GIAN BUDY ARIAN [41:04]

Atas nama Imran, Yang Mulia.

362. KETUA: SALDI ISRA [41:06]

Terus?

363. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 136/PHPU.BUP-XXIII/2025: GIAN BUDY ARIAN [41:07]

Bahwa atas nama Imran itu memang berdo ... ber-KTP Palembang, akan tetapi kami tanggap, Saudara Imran itu mencoblos gubernurnya saja, Yang Mulia.

364. KETUA: SALDI ISRA [41:18]

Jadi, dia hanya mencoblos untuk gubernur?

365. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 136/PHPU.BUP-XXIII/2025: GIAN BUDY ARIAN [41:20]

Betul, Yang Mulia.

366. KETUA: SALDI ISRA [41:22]

Tidak untuk OKU Selatan?

367. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 136/PHPU.BUP-XXIII/2025: GIAN BUDY ARIAN [41:23]

Tidak, Yang Mulia.

368. KETUA: SALDI ISRA [41:28]

Itu di bukti berapa, itu? Bukti T berapa?

369. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 136/PHPU.BUP-XXIII/2025: GIAN BUDY ARIAN [41:31]

T-28, Yang Mulia.

370. KETUA: SALDI ISRA [41:32]

T-28, nanti kita cek. Lanjut, apa lagi?

371. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 136/PHPU.BUP-XXIII/2025: GIAN BUDY ARIAN [41:41]

Terkait dengan selisih DPTb, Yang Mulia.

372. KETUA: SALDI ISRA [41:45]

Ya.

373. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 136/PHPU.BUP-XXIII/2025: GIAN BUDY ARIAN [41:48]

Bahwa Pemohon mendalilkan jumlah DPTb dengan C.Hasil, itu berbeda.

374. KETUA: SALDI ISRA [41:57]

Ya.

375. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 136/PHPU.BUP-XXIII/2025: GIAN BUDY ARIAN [41:57]

Nah, kami tanggapi bahwa tidak semua DPTb yang mempunyai hak pilihnya itu menggunakan hak pilihnya, Yang Mulia.

376. KETUA: SALDI ISRA [42:07]

Oke.

377. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 136/PHPU.BUP-XXIII/2025: GIAN BUDY ARIAN [42:07]

Begitu.

378. KETUA: SALDI ISRA [42:10]

Apa lagi?

379. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 136/PHPU.BUP-XXIII/2025: GIAN BUDY ARIAN [42:10]

Yang terakhir, Yang Mulia.

380. KETUA: SALDI ISRA [42:11]

Ya.

381. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 136/PHPU.BUP-XXIII/2025: GIAN BUDY ARIAN [42:12]

Di Desa Simpang Agung TPS 05, Termohon mendalilkan bahwa ada 5 orang yang ... yang dihalang-halangi oleh petugas, Yang Mulia.

382. KETUA: SALDI ISRA [42:28]

Ya.

383. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 136/PHPU.BUP-XXIII/2025: GIAN BUDY ARIAN [42:32]

Tanggapan kami, memang nama-nama yang terdapat tersebut tidak datang ke TPS, jadi bukan dihalang-halangi oleh petugas, Yang Mulia.

384. KETUA: SALDI ISRA [42:40]

Jadi, memang tidak datang? Ke mana dia, orang berlima itu? Tidak datang memilih saja?

385. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 136/PHPU.BUP-XXIII/2025: GIAN BUDY ARIAN [42:45]

Tidak datang memilih karena tidak datang ke TPS, Yang Mulia.

386. KETUA: SALDI ISRA [42:46]

Oke, apa lagi yang mau disampaikan?

387. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 136/PHPU.BUP-XXIII/2025: GIAN BUDY ARIAN [42:47]

Cukup, yang Mulia.

388. KETUA: SALDI ISRA [42:47]

Oke. Cukup, ya? Silakan! Ini kalau lawyer itu harus agak pede. Menyampaikan ini saja, enggak pede Anda itu. Silakan, Petitum!

389. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 136/PHPU.BUP-XXIII/2025: GIAN BUDY ARIAN [43:01]

Mohon izin, Yang Mulia.

390. KETUA: SALDI ISRA [43:02]

Ya.

391. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 136/PHPU.BUP-XXIII/2025: GIAN BUDY ARIAN [43:03]

Untuk TSM sendiri, kami tidak ditanggapi karena ada lembaga yang lebih berwe ... berwenang untuk menanggapi itu.

392. KETUA: SALDI ISRA [43:07]

Terserah Anda, ya, Anda mau menanggapi dalil itu atau tidak, itu urusan Anda. Yang penting mereka mendalilkan.

393. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 136/PHPU.BUP-XXIII/2025: GIAN BUDY ARIAN [43:16]

Oke.

Petitum.

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, Termohon memohon dengan hormat, kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenang ... berkenaan[sic!] memutuskan:

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Permohon[sic!] untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Surat Keputusan KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor sat ... 1911 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024, Pukul 03.03.
3. Menetapkan perolehan suara sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Termohon, Yang Mulia.

394. KETUA: SALDI ISRA [44:00]

Oke. Cukup, ya?

395. KUASA HUKUM TERMOHON: GIAN BUDY ARIAN [44:01]

Cukup, Yang Mulia.

396. KETUA: SALDI ISRA [44:01]

Pihak Terkait. Silakan, 15 menit.

397. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 136/PHPU.BUP-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [44:08]

Terima kasih, Yang Mulia.
Assalamualaikum wr.wb. Selamat siang, Yang Mulia.

398. KETUA: SALDI ISRA [44:15]

Selamat pagi, Pak Deni.

399. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 136/PHPU.BUP-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [44:16]

Oh.

400. KETUA: SALDI ISRA [44:18]

Ini karena terlalu banyak pegang perkara, ini antara pagi dan siang saja susah membedakannya.

401. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 136/PHPU.BUP-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [44:21]

Mohon maaf, Yang Mulia.

Izin, Yang Mulia, atas perkenan Yang Mulia, kami mohon diperkenankan untuk menampilkan ringkasan Keterangan Pihak Terkait dalam PowerPoint.

402. KETUA: SALDI ISRA [44:34]

Silakan.

403. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 136/PHPU.BUP-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [44:35]

Sudah diserahkan, sambil kami bacakan, Yang Mulia. Mohon dibantu ditampilkan.

Pokok-Pokok Keterangan Pihak Terkait Perkara 136 Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Kami mulai dari ... selanjutnya, slide 2. Pembahasan kami bagi dalam 4 bagian, eksepsi, tanggapan. Kami juga ingin sedikit menyampaikan ada pelanggaran dari Pemohon sendiri dan Petitem, ujungnya.

Kami mulai dengan Eksepsi, Yang Mulia.

Dalam Petitemnya, Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk membatalkan dan pemugutan suara ulang di 34 TPS. Namun, Yang Mulia, perlu dicatat, dalil-dalilnya hanya di 33 TPS. Yang tiba-tiba muncul adalah TPS 4 di Desa Tanjung Jaya. Di halaman 15 Permohonan, yang disebut hanya TPS 1. Jadi, ada 1 TPS yang tiba-tiba muncul.

Yang slide selanjutnya. Ada kontradiksi antara Posita dan Petitem. Di halaman 30 Perbaikan Permohonan, Pemohon mempermasalahkan insiden di Kecamatan Kisam Ilir, berupa pengunduran diri PPK, PPS, panwascam, dan pengawas kelurahan/desa. Tapi dalam Petitemnya, Kecamatan ini tidak termasuk yang dimintakan PSU.

Langsung ke tanggapan, yaitu Eksepsi, Yang Mulia.

Di slide 8. Dalam Permohonannya, Pemohon membagi ... kami baca dalilnya dari dua-duanya dipakai, Yang Mulia. Kuantitatif yang dilakukan oleh Pemohon, berarti tidak menyalahkan hitungan ... ulangi, meskipun kuantitatif, tapi Pemohon tidak menyalahkan hitungan Termohon, yang diargumentasikan adalah adanya pelanggaran-pelanggaran administratif.

Yang dalil kedua yang kami baca, Pemohon menggunakan argumentasi kualitatif, seperti biasa terkait dengan terstruktur, sistematis, masif. Mari kita ulas satu per satu.

Dalil tentang adanya pelanggaran administrasi, di slide selanjutnya, dan prosedur, ada 7 yang didalilkan oleh Pemohon, mulai daftar hadir dan Form C. Hasil berbeda, hingga terdapat selisih jumlah data pemilihan tambahan. Beberapa keterangan kami sudah disampaikan oleh Termohon, Yang Mulia, kami akan ... tidak menguraikan secara

detail yang sudah disampaikan. Yang diduga Pemohon dalilkan terjadi, lagi-lagi hanya di 33 TPS, padahal yang di Petitionkan 34. Rinciannya di slide 10 tentang dalil daftar hadir Form C. Hasil berbeda itu ada 13 TPS dan seterusnya dianggap dibacakan.

Yang ketujuh, terdapat selisih jumlah Daftar Hadir Tambahan (DPTb) itu hanya di 1 TPS sebenarnya.

Bagaimana fakta sebenarnya? Tentang yang pertama, salah jumlah peserta yang hadir, dikonfirmasi dengan Formulir C, Yang Mulia, kami kesulitan untuk mengkonfirmasi daftar hadir, Yang Mulia.

Meski demikian, dari apa yang kami baca, sebenarnya ini yang perlu dicek langsung. Karena kami tidak punya, Termohon semestinya yang punya akses ke ... ke situ, tapi kami meyakini bahwa dalil ini pun tidak berdasar. Kenapa demikian, Yang Mulia?

Karena di slide 12, polanya sama. Dalilnya adalah Pemohon mendalilkan adanya pemilih yang mencoblos menggunakan KTP orang lain, di 2 TPS. Kami sudah inzage, Yang Mulia. Ada kesalahan, ini di pengetikan inzage 17 Januari, mohon dianggap 16 Januari. Yang disampaikan sebagai bukti adalah surat pernyataan de auditu, tidak dinotariatkan, kalau ingin sebagai bukti yang kuat. Jadi, kami menganggap ini harus dicek betul kebenarannya dan mohon izin, tidak kami yakini. Itu adalah faktanya.

Yang dalil ketiga, Pemohon mendalilkan adanya pemilih yang mencoblos lebih dari sekali di 5 TPS. Kami inzage, lagi-lagi surat pernyataan de auditu tidak dinotariatkan. Jadi, sulit untuk kami akui kebenarannya. Ada video, Yang Mulia, untuk menguatkan ini, tapi video ini hanya berdurasi 8 detik dan tidak ada suaranya. Sulit mengkonfirmasi apa yang sebenarnya terjadi di atas bukti yang demikian.

Yang Mulia, dalil keempat, Pemohon mengatakan ada pemalsuan tanda tangan. Tadi Termohon sudah menjelaskan, tidak demikian. Yang kami inzage, tidak muncul apa-apa dalam Daftar Alat Bukti maupun alat bukti. Jadi, hanya muncul di dalam dalil, tapi tidak didukung dengan alat bukti. Juga tidak ada form kejadian khusus terkait dengan ini. Nanti kejadian khusus ini akan kami tegaskan, Yang Mulia.

Dalil yang kelima, Pema ... Pemohon mendalilkan adanya penggunaan hak pilih terhadap seseorang yang telah meninggal dunia. Lagi-lagi yang digunakan adalah surat pernyataan yang kami tidak yakini, itu adalah faktanya.

Yang keenam, Yang Mulia, slide 16. Pemohon mendalilkan adanya pemilih tambahan DPTb, yang menggunakan KTP di luar Kabupaten OKU, di 1 TPS. Tadi, Termohon menjelaskan, kami tegaskan, Yang Mulia, lagi-lagi tidak muncul bukti pendukungnya dalam DAB maupun alat bukti fisiknya, juga pun tidak ada Form Kejadian Khusus terkait ini.

Yang Mulia, yang terakhir, dalil dari Pemohon adalah terdapat selisih jumlah daftar hadir pemilih tambahan DPTb, dengan Form C. Hasil di 1 TPS, satu, Yang Mulia. Kami cek, lagi-lagi, Yang Mulia, tidak ada

buktinya dalam Daftar Alat Bukti maupun bukti fisiknya, juga tidak ada Form Kejadian Khusus.

Yang Mulia, ke slide 18, seluruh saksi Pemohon, tadi sudah disampaikan, menandatangani Form C.Hasil di setiap TPS di kabupaten, termasuk di 33 PS[sic!] yang didalilkan, ataupun 34 yang di-Petitumkan. Jadi, mereka saksi-saksinya menerima.

Yang Mulia, kami ingin mengutip sekilas saja Putusan 224[sic!], ulangi 234/01/03/04 yang pada intinya mendalilkan, menegaskan bahwa jika pun ada alasan PSU, jika terdapat catatan dalam Form Kejadian Khusus dan terdapat pengaruh yang signifikan. Karena itu, Yang Mulia. Karena terutama yang bagian A, ini kami tidak lihat adanya kejadian khusus, kami tidak menganggap yang terjadi di OKU ini bisa dijadikan alasan untuk PSU.

Yang Mulia, kami hanya ingin menghadirkan dua contoh saja di halaman slide 20. Menegaskan bahwa seluruh saksi Pemohon, kami berikan di situ screenshot-nya, menandatangani Form C.Hasil. Meskipun hanya 2 TPS, Yang Mulia, di TPS 002 Kelurahan Lubar dan TPS 002 Sukarami, ini hanya contoh saja untuk mengkonfirmasi, bahwa saksi-saksi Pemohon sudah menandatangani.

Yang Mulia, ingin kami tegaskan, bahkan di Kecamatan Warkuk Ranau Selatan dan Buay Sandang Aji, saksi-saksi Pemohon juga menandatangani dan tidak mengajukan keberatan.

Karena itu, Yang Mulia, kami ingin menyimpulkan pada bagian ini, Permohonan Pemohon sebenarnya tidak berdasar, tidak didukung dengan bukti-bukti, paling tidak bukti-buktinya hanya surat pernyataan auditu tadi kebanyakan, dan karenanya, mohon diabaikan, alias tidak berdasar hukum. Karena sedikit banyak Pemohon tidak melakukan keberatan secara berjenjang di tingkat TPS maupun di tingkat Kecamatan.

Yang Mulia, kami lanjutkan ke halaman slide 25.

Yang Mulia, fakta-fakta yang didalilkan oleh Pemohon tidak memiliki keterkaitan, terutama kalau kita lihat, Pemohon menghendaki PSU di 34 TPS, memang yang didalilkan membatalkan signifikan=11.238, tetapi sudah kami sampaikan yang disebut dalam dalil hanya 33, dalam Posita. Ini terbagi 2, peristiwa di 26 TPS tidak dilaporkan ke Bawaslu, yang dilaporkan hanya 7 ke Bawaslu. Dari 7 yang dilaporkan ini pun, 5 TPS dianggap tidak melakukan pelanggaran, 2 TPS terbukti melakukan pelanggaran, namun dari 2 itu pun, 1 TPS hanya menunjukkan 1 kesalahan suara, dan 1 TPS menunjukkan terdapat pemilih yang memilih lebih dari 2 kali. Kalau diuraikan demikian, Yang Mulia, seharusnya di 2 TPS yang ... anggaphlah terbukti ini, suaranya menjadi tidak signifikan untuk mengubah hasil.

Dalil Pemohon memang ... bagian kedua, Yang Mulia. Tadi bagian, Yang pertama, yang kuantitatif, yang kami akan sampaikan selanjutnya yang kualitatif.

Yang kedua, tentu terkait dengan TSM, Yang Mulia, yang disajikan[sic!] adalah keterlibatan Kepala Desa, ASN dan anggota DPRD, yang didalilkan terjadi di 44 desa, tersebar di 11 kecamatan. Untuk dipahami, Yang Mulia, memang kalau demikian argumentasinya, di OKU Selatan ini, next.

Ada 19 kecamatan, 252 desa, 7 kelurahan, dan 688 TPS. Terlihat Pemohon mencoba untuk menegaskan masifnya. Tapi kalau kita lihat desanya, 252 desa dan yang dibuktikan 44 desa, atau kalau dilihat ... apa ... persoalan yang terkait dengan TPS-nya, tidak disebut berapa, TPS-nya 688.

Sehingga kalau kami membedah ini, Yang Mulia, Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran TSM. Namun, sebenarnya tidak ada sedikitpun kejelasan uraian tentang unsur-unsur TSM, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu. Jadi, kalau bicara misalnya dalil keterlibatan Kepala Desa, tuduhan ini kami nyatakan fiktif, tidak ada keterkaitan dengan pihak kami. Apa yang dimaksud dengan intervensi? Beberapa nama lurah yang disebutkan dalam dalil juga salah.

Pihak Terkait, yang pasti, dalam konteks semacam ini biasanya adalah petahana, kami bukan petahana.

Di halaman slide 30, Yang Mulia, ini contoh nama-nama lurah yang didalilkan keliru. Pihak Pemohon mengatakan misalnya Saudara Adi Gautama, yang kami pastikan sebenarnya adalah di keterangan Pihak Terkait halaman 12, Herni Johan, dan seterusnya, Yang Mulia.

Di slide 31, Pemohon misalnya mendalilkan keterlibatan Anggota DPRD atas nama Nopenson. Kami tegaskan, Yang Mulia. Nopenson ini adalah Kader Partai Nasdem sebagai juga pendukung daripada Pihak Terkait. Yang bersangkutan adalah Wakil Ketua Bidang Hubungan Eksekutif. Di slide 32 kami tunjukkan bukti-buktinya, Bukti PT 55, sehingga walaupun yang bersangkutan melakukan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kampanye, memang beliau adalah partai pendukung.

Yang Mulia, karena itu, kami di slide 33 menegaskan unsur TSM yang didalilkan oleh Pemohon, terstruktur misalnya, Pemohon sama sekali tidak menjelaskan bagaimana, kapan, di mana, dan seperti apa wujud intervensi. Sistematis misalnya, Pemohon sama sekali tidak menjelaskan bagaimana Pihak Terkait merencanakan pelanggaran, matang, tersusun, dan sangat rapi. Masif misalnya, Pihak Terkait memang menguraikan pelanggaran-pelanggaran, tetapi setelah kami inzage, itu tidak mencakup wilayah-wilayah setengah, sebagaimana yang disyaratkan.

Kami ingin sedikit mengulas tentang pelanggaran Pemohon, Yang Mulia, tapi sekilas saja. Kami justru bisa membuktikan dan menunjukkan (...)

404. KETUA: SALDI ISRA [57:20]

Waktunya 2 menit lagi!

405. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 136/PHPU.BUP-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [57:22]

Ya, adanya ... apa ... politik uang yang dilakukan oleh Pemohon.

Di slide 36, kami tunjukkan adanya juga pemilih yang siluman, yang diberi uang oleh Pemohon.

Di slide selanjutnya kami tunjukkan justru ada kepala desa yang di bulan Oktober berfoto bersama-sama dengan Pemohon dengan menunjukkan dukungan, sehingga itu justru dilakukan oleh Pemohon.

Karena itu, Yang Mulia, kesimpulan kami, Pemohon justru yang melakukan kecurangan mengarah pada pelanggaran TSM. Namun, itu diarahkan kepada kami tanpa bukti-bukti.

Kami bacakan Petikum, Yang Mulia.

406. KETUA: SALDI ISRA [57:59]

Silakan!

407. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 136/PHPU.BUP-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [58:01]

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi.

Menyatakan eksepsi Pihak Terkait diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima atau ditolak seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan mengikat Keputusan KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 1911 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2024.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, ex a quo et bono.

Terima kasih, Yang Mulia.

408. KETUA: SALDI ISRA [58:44]

Terima Kasih.

409. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 136/PHPU.BUP-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [58:45]

Assalamualaikum wr. wb.

410. KETUA: SALDI ISRA [58:48]

Walaikumsalam wr. wb.

Bawaslu, silakan! Saya kira ini anggota DPR tadi. Silakan, Bawaslu!

411. BAWASLU: DONI CANDRA [59:01]

Terima kasih, Yang Mulia, mohon izin.

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, Salam sejahtera untuk kita semua. Om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan.

Adapun keterangan tertulis Bawaslu terhadap Perkara Nomor 136 dianggap dibacakan, yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor Urut 2.

Di sini kami sampaikan, Yang Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Bawas ... Republik Indonesia Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 06, Jakarta Pusat. Adapun Pemohon ... yang didalilkan Pemohon, dimana yang satu dianggap dibacakan.

Yang kedua dianggap dibacakan.

Yang ketiga dianggap dibacakan.

Yang keempat dianggap dibacakan.

Selanjutnya, Yang Mulia, berkaitan Permohonan tersebut, Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, keterangan ... yang dituangkan dalam keterangan Dalil Permohon[sic!].

1. Bawaslu ... bahwa berkenaan dengan Dalil Pemohon, Pemohon mengenai perolehan suara yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, tidak terdapat laporan atau temuan pelanggaran pemilihan dalam permohonan sengketa Pemilihan. Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan menegaskan ... menerangkan tugas-tugas pencegahan sebagai berikut.

1.1 Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan telah melak ... melakukan ataupun melaksanakan tugas pencegahan dalam bentuk imbauan Nomor 286, dianggap dibacakan, pada tanggal 25 (...)

412. KETUA: SALDI ISRA [01:00:39]

Yang ... yang itu-itu enggak usah disampaikan ke kami ya, imbauan, ini segala macam itu. Yang terkait dengan dalil saja, apa? Gitu, ya?

413. BAWASLU: DONI CANDRA [01:00:49]

Siap, Pim ... siap, Yang Mulia.

Selanjutnya. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon.

Selanjutnya yang kedua. Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan Pemohon mengenai adanya pemilihan memilih lebih dari satu kali dan/atau memilih dengan identitas KTP orang lain, yaitu bukan orang yang sebenarnya terdaftar di Daftar Pemilih Tetap atau (DPT) memilih lebih dari satu kali di satu TPS dan/atau di TPS yang berbeda, dengan ... dugaan pemalsuan tanda tangan di daftar hadir. Dengan alasan tersebut, Pemohon memohon adanya pemungutan suara ulang ataupun PSU sebagai berikut.

Adapun tindak ... tindak lanjut laporan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bahwa hasil tindak lanjut laporan dugaan pelanggaran pemilihan yang berkenaan dengan Pemohon ... Permohonan Pemohon, Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan menerangkan sebagai berikut, dianggap dibacakan, Yang Ketua ... Yang Mulia.

414. KETUA: SALDI ISRA [01:01:52]

Itu yang meminta PSU berapa TPS?

415. BAWASLU: DONI CANDRA [01:01:56]

Sesuai dengan Pemohon, 34 TPS, Yang Mulia.

416. KETUA: SALDI ISRA [01:01:58]

34. Apa hasilnya di Saudara? Ada yang direkomendasikan untuk di-PSU?

417. BAWASLU: DONI CANDRA [01:02:05]

Tidak ada, Yang Mulia.

418. KETUA: SALDI ISRA [01:02:07]

Tidak ada, ya? Dari 34 itu tidak ada sama sekali?

419. BAWASLU: DONI CANDRA [01:02:10]

Tidak ada, Yang Mulia.

420. KETUA: SALDI ISRA [01:02:12]

Oke. Kenapa tidak?

421. BAWASLU: DONI CANDRA [01:02:14]

Karena di sini berdasarkan keterangan ber ... berdasarkan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan, Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan melakukan pengawasan pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan surat suara pada tanggal 27 November tahun 2024 melalui jajaran pengawas tempat pemungutan suara ataupun TPS di 34 TPS yang didalilkan Pemohon pada ... pada 34 TPS tersebut, selanjutnya dapat dilihat pada Bukti Laporan PK-5. (...)

422. KETUA: SALDI ISRA [01:02:48]

Jadi di 34 TPS itu, tidak ada yang (...)

423. BAWASLU: DONI CANDRA [01:02:50]

Ya.

424. KETUA: SALDI ISRA [01:02:50]

Apa ... menggunakan hak pilih lebih dari satu kali?

425. BAWASLU: DONI CANDRA [01:02:53]

Ya. Yang pada pokoknya, tidak terdapat temuan dugaan pelanggaran dan keberatan Saksi Calon, Yang Mulia.

426. KETUA: SALDI ISRA [01:02:58]

Ya, itu satu hal. Ada enggak dari hasil Saudara itu yang terbukti menggunakan hak pilih, pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali?

427. BAWASLU: DONI CANDRA [01:03:10]

Kalau berdasarkan laporan yang masuk, tidak ada, Yang Mulia.

428. KETUA: SALDI ISRA [01:03:15]

Tidak ada, ya. Tapi tadi Pihak Terkait mengakui ada satu TPS tadi, bagaimana Anda lakukan pengawasan itu? Apa penjelasannya? Silakan.

429. BAWASLU: KOMANG WARDIASA [01:03:31]

Izin, Yang Mulia.

430. KETUA: SALDI ISRA [01:03:34]

Ya. Silakan.

431. BAWASLU: KOMANG WARDIASA [01:03:34]

Mohon izin, Yang Mulia. Terima kasih.

Berkaitan dengan yang disampaikan bahwa ada pemilih yang melakukan ... memilih lebih daripada satu kali, itu dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten OKU[sic!] Selatan, tetapi yang dilaporkan itu adalah petugas KPPS-nya, Yang Mulia, bukan yang melakukan pencoblosan, sehingga tidak dapat dibuktikan.

432. KETUA: SALDI ISRA [01:03:57]

Jadi yang dia laporkan petugas KPPS?

433. BAWASLU: KOMANG WARDIASA [01:04:00]

Ya. Nah, sehingga kami merekomendasikan kepada KPU pada saat itu untuk memberikan pelanggaran kode etik kepada KPU.

434. KETUA: SALDI ISRA [01:04:08]

Ada enggak dia minta PSU di situ?

435. BAWASLU: KOMANG WARDIASA [01:04:10]

Tidak ada, Yang Mulia.

436. KETUA: SALDI ISRA [01:04:12]

Di laporannya?

437. BAWASLU: KOMANG WARDIASA [01:04:13]

Tidak ada, Yang Mulia.

438. KETUA: SALDI ISRA [01:04:14]

Dia minta supaya dilakukan pemungutan suara ulang, enggak ada?

439. BAWASLU: KOMANG WARDIASA [01:04:15]

Tidak ada, Yang Mulia. Mohon izin, Yang Mulia.
Dan kemudian ketika kami lakukan klarifikasi dan juga pun mengecek seluruh daftar hadir, kemudian C.Hasil, dan lainnya, seluruh pasangan saksi calon, menyepakati hasil tersebut, Yang Mulia.

440. KETUA: SALDI ISRA [01:04:28]

Kalau itu, ya, bagi saya itu sudah enggak masalah.

441. BAWASLU: KOMANG WARDIASA [01:04:31]

Siap, Yang Mulia.

442. KETUA: SALDI ISRA [01:04:32]

Soal tanda tangan. Tapi fakta itu karena yang melaporkan itu, yang dilaporkan adalah KPPS, di laporan itu minta dilakukan PSU atau tidak?

443. BAWASLU: KOMANG WARDIASA [01:04:40]

Tidak, Yang Mulia.

444. KETUA: SALDI ISRA [01:04:41]

Dari hasil telaah Anda, kalau ketemu ... ketemu peristiwa seperti itu, harus di PSU atau tidak?

445. BAWASLU: KOMANG WARDIASA [01:04:46]

Tidak, Yang Mulia. Kami lakukan investigasi terlebih dahulu, Yang Mulia. Dan kemudian kami (...)

446. KETUA: SALDI ISRA [01:04:51]

Bukan. Kalau secara faktual, memang ada orang menggunakan hak suara lebih dari satu kali, itu kapan dia harus di PSU, kapan tidak?

447. BAWASLU: KOMANG WARDIASA [01:05:03]

Mohon izin, Yang Mulia. Pada saat kami melakukan klarifikasi, Yang Mulia, tidak ... para yang kami klarifikasi tidak memberikan keterangan bahwa ada yang kemudian melakukan (...)

448. KETUA: SALDI ISRA [01:05:17]

Siapa yang Anda klarifikasi?

449. BAWASLU: KOMANG WARDIASA [01:05:18]

KPPS-nya, Yang Mulia.

450. KETUA: SALDI ISRA [01:05:20]

KPPS-nya. KPPS-nya mengaku tidak ada?

451. BAWASLU: KOMANG WARDIASA [01:05:21]

Tidak ada, Yang Mulia. Dan tidak mengetahui, Yang Mulia, KPPS-nya.

452. KETUA: SALDI ISRA [01:05:26]

Ini ada dispute, ya, antara Anda dengan Pihak Terkait? Ini bisa panjang jadinya ceritanya ini.

453. BAWASLU: KOMANG WARDIASA [01:05:31]

Siap, Yang Mulia.

454. KETUA: SALDI ISRA [01:05:32]

Oke, jadi tidak ada, ya karena yang dilaporkan KPPS?

455. BAWASLU: KOMANG WARDIASA [01:05:38]

Ya.

456. KETUA: SALDI ISRA [01:05:39]

Begitu. Oke, apa lagi yang mau disampaikan?

457. BAWASLU: DONI CANDRA [01:05:51]

Selanjutnya, keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

458. KETUA: SALDI ISRA [01:06:00]

Ya, kalau semuanya tentang pokok itu dianggap dibacakan, Anda langsung saja ke penutupnya. Biar kita dengar juga apa yang Anda harus jelaskan terhadap Pokok Permohonan itu, jangan dianggap dibacakan semua.

459. BAWASLU: DONI CANDRA [01:06:10]

Adapun Bawaslu berkenaan dengan Dalil Permohonan Pemohon mengenai Pemohon telah melaporkan laporan dugaan pelanggaran pemilihan kepa ... ke Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, di mana tindak lanjut laporan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Satu, Bawaslu. Bahwa Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan. Berdasarkan formulir tanda terima Laporan Nomor 05, dianggap dibacakan pada tanggal 15 November, Yang Mulia.

460. KETUA: SALDI ISRA [01:06:42]

15 November, terus.

461. BAWASLU: DONI CANDRA [01:06:45]

Selanjutnya (...)

462. KETUA: SALDI ISRA [01:06:46]

15 November itu apa yang dilaporkan?

463. BAWASLU: DONI CANDRA [01:06:51]

Terhadap laporan (...)

464. KETUA: SALDI ISRA [01:06:52]

Apa materi laporannya apa?

465. BAWASLU: DONI CANDRA [01:06:56]

Pokok laporannya tin ... yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi dengan alasan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undang lainnya, dilakukan penerusan ke pemerintahan kabupaten (...)

466. KETUA: SALDI ISRA [01:07:07]

Apa itu dugaannya, yang dia dilaporkan apa?

467. BAWASLU: DONI CANDRA [01:07:14]

Yang dilaporkan pertemuan terbatas yang diduga dihadiri oleh Calon Wakil Bupati OKU Selatan Nomor Urut 3 atas nama Wahab Nawawi dan beberapa Kepala Desa di Wilayah Kecamatan Banding Agung, Yang Mulia.

468. KETUA: SALDI ISRA [01:07:25]

Oke, itu kan jelas. Apa lagi?

469. BAWASLU: DONI CANDRA [01:07:31]

Bahwa Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir tanda terima penyampaian Laporan Nomor 06 dianggap dibacakan, pada tanggal 18 November, Bukti PK-5.9 sampai 146 terlampir.

470. KETUA: SALDI ISRA [01:07:50]

Oke. Apa lagi yang berkait dengan politik uang gimana? Ada, enggak laporan yang berkenaan dengan politik uang?

471. BAWASLU: KOMANG WARDIASA [01:08:21]

Mohon izin, Yang Mulia.

472. KETUA: SALDI ISRA [01:08:22]

Ya, silakan. Ya, bagi saja.

473. BAWASLU: KOMANG WARDIASA [01:08:25]

Oke. Terkait dengan dugaan laporan money politics itu, ada, Yang Mulia.

474. KETUA: SALDI ISRA [01:08:32]

Ya.

475. BAWASLU: KOMANG WARDIASA [01:08:32]

Di Nomor 012/LP (...)

476. KETUA: SALDI ISRA [01:08:35]

Ya.

477. BAWASLU: KOMANG WARDIASA [01:08:35]

/PB/KAB/06.14/11/2024. Pelap ... Pelapor atas nama Ahkamud Zikrullah[sic!], terlapor Suherman, Kepala Desa Negeri Batin.

478. KETUA: SALDI ISRA [01:08:49]

Ya.

479. BAWASLU: KOMANG WARDIASA [01:08:50]

Kemudian peristiwa yang dilaporkan itu adalah dugaan money politics di Desa Negeri Batin, Buay Sandang Aji, untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 02. Nah, hasilnya adalah tidak diregistrasi dengan alasan syarat formil dan materiil belum terpenuhi, Yang Mulia.

480. KETUA: SALDI ISRA [01:09:03]

Apa syarat formil dan materiil, yang belum terpenuhi itu?
Ini, menjelang menyerahkan ini, ada dibaca, kan? Semua ini ada tanda tangannya, semua ada parafnya. Ada, ya?

481. BAWASLU: DONI CANDRA [01:09:23]

Ya, Pak ... ya, Yang Mulia.

482. KETUA: SALDI ISRA [01:09:25]

Jangan-jangan diserahkan ke staff saja ini, sehingga Anda tahu[sic!] di mana tempatnya. Semuanya dijadikan bukti, ya? Yang itu?

483. BAWASLU: DONI CANDRA [01:09:37]

Ya, Yang Mulia.

484. KETUA: SALDI ISRA [01:09:38]

Oke.

485. BAWASLU: KOMANG WARDIASA [01:09:40]

Mohon izin, Yang Mulia.

486. KETUA: SALDI ISRA [01:09:41]

Ya.

487. BAWASLU: KOMANG WARDIASA [01:09:42]

Terkait dengan yang dugaan money politics ini, tidak dilaporkan oleh pihak 0 ... Paslon 02, Yang Mulia, tapi (...)

488. KETUA: SALDI ISRA [01:09:49]

Oke.

489. BAWASLU: KOMANG WARDIASA [01:09:50]

Pihak orang lain yang melaporkan, Yang Mulia.

490. KETUA: SALDI ISRA [01:09:51]

Yang orang lainnya, siapa ini?

491. BAWASLU: KOMANG WARDIASA [01:09:52]

Dan tidak termasuk dalam Pokok Permohonan.

492. KETUA: SALDI ISRA [01:09:55]

Oke. Tidak, ya. Apa lagi yang mau disampaikan? Cukup? Nah, yang terakhir, apa yang mau disampaikan?

493. BAWASLU: DONI CANDRA [01:10:12]

Mungkin keterangan tertulis Bawaslu, sebatas itu, Yang Mulia. Dan seterusnya, telah kami sampaikan dalam keterangan tertulis dan melampirkan semua alat bukti.

Demikian, keterangan Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, disampaikan.

Kami ucapkan terima kasih, hormat kami, Ketua beserta Anggota, ditandatangani.

494. KETUA: SALDI ISRA [01:10:35]

Oke, terima kasih.

495. BAWASLU: DONI CANDRA [01:10:36]

Saya akhiri, wassalamualaikum wr. wb.

496. KETUA: SALDI ISRA [01:10:40]

Walaikumsalam wr. wb.

Cukup, ya? Itu peci-nya baru dibeli, ya? Menjelang ke Mahkamah Konstitusi atau peci ketika pelantikan, itu?

497. BAWASLU: DONI CANDRA [01:10:52]

Jarang dipakai, Yang Mulia.

498. KETUA: SALDI ISRA [01:10:53]

Jarang dipakai, ya? Kalau ... kelihatan gagah sekali, pakai peci ke sini, nih. Tapi sayangnya itu, menyampaikan poin-poinnya ndak segagah pakaiannya, begitu.

Kita masuk sekarang ke Perkara Nomor 39, Kabupaten Mesuji. Silakan, Bawaslu.

499. KUASA HUKUM PIHAK TERMOHON: FRANS HANDRAJADI [01:10:15]

Izin, Yang Mulia.

500. KETUA: SALDI ISRA [01:11:16]

Ya.

501. KUASA HUKUM PIHAK TERMOHON: FRANS HANDRAJADI [01:11:16]

Menyampaikan jawaban Perkara 39. Saya Frans Handrajadi, Kuasa Hukum KPU Mesuji.

502. KETUA: SALDI ISRA [01:11:21]

Sebentar dulu.

Ini yang OKU Selatan, pindah ke belakang. Sudah selesai penderitaan Anda untuk sementara ini. Silakan!

503. KUASA HUKUM PIHAK TERMOHON: FRANS HANDRAJADI [01:12:05]

Izin menyadi ... melanjutkan, Yang Mulia.

504. KETUA: SALDI ISRA [01:12:06]

Ya.

505. KUASA HUKUM PIHAK TERMOHON: FRANS HANDRAJADI [01:12:09]

Berkaitan dalam Eksepsi, Kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap dibacakan.

506. KETUA: SALDI ISRA [01:12:13]

Ya.

507. KUASA HUKUM PIHAK TERMOHON: FRANS HANDRAJADI [01:12:16]

Kedudukan Hukum Pemohon.

Bahwa berdasarkan penetapan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten (...)

508. KETUA: SALDI ISRA [01:12:23]

Enggak usah itunya, Pak, poin-poinnya saja (...)

**509. KUASA HUKUM PIHAK TERMOHON: FRANS HANDRAJADI
[01:12:24]**

Siap.

510. KETUA: SALDI ISRA [01:12:25]

Jangan Bapak bacakan! Lama ini prosesnya.

**511. KUASA HUKUM PIHAK TERMOHON: FRANS HANDRAJADI
[01:12:28]**

Perolehan suaranya lebih dari amang batas yang ditentukan ini,
ya (...)

512. KETUA: SALDI ISRA [01:12:34]

Kalau Kewenangan, Mahkamah berwenang atau tidak?

**513. KUASA HUKUM PIHAK TERMOHON: FRANS HANDRAJADI
[01:12:38]**

Tidak, Yang Mulia.

514. KETUA: SALDI ISRA [01:12:40]

Tidak? Kalau tidak, kita tutup sidang ini, Pak, ya?

**515. KUASA HUKUM PIHAK TERMOHON: FRANS HANDRAJADI
[01:12:42]**

Siap, Yang Mulia.

516. KETUA: SALDI ISRA [01:12:43]

Kalau enggak ada kewenangan, ngapain kita buka sidang ini.
Oke, tenggat waktu gimana, Pak?

**517. KUASA HUKUM PIHAK TERMOHON: FRANS HANDRAJADI
[01:12:52]**

Tidak ada, Yang Mulia, tidak kami ... tidak sesuai (...)

518. KETUA: SALDI ISRA [01:12:52]

Tidak ada Eksepsi?

519. KUASA HUKUM PIHAK TERMOHON: FRANS HANDRAJADI [01:12:56]

Tidak ada Eksepsi.

520. KETUA: SALDI ISRA [01:12:57]

Oke. Kalau soal legal standing?

521. KUASA HUKUM PIHAK TERMOHON: FRANS HANDRAJADI [01:13:00]

Legal standing, ada ini ... perbedaan suara yang di ambang batas, Yang Mulia.

522. KETUA: SALDI ISRA [01:13:09]

Oke, melewati ambang batas?

523. KUASA HUKUM PIHAK TERMOHON: FRANS HANDRAJADI [01:13:09]

23.735 suara.

524. KETUA: SALDI ISRA [01:13:11]

Selisih suaranya, ya?

525. KUASA HUKUM PIHAK TERMOHON: FRANS HANDRAJADI [01:13:12]

Selisih suara.

526. KETUA: SALDI ISRA [01:13:15]

Kalau ambang batasnya berapa?

527. KUASA HUKUM PIHAK TERMOHON: FRANS HANDRAJADI [01:13:17]

2.428 suara.

528. KETUA: SALDI ISRA [01:13:18]

Oke, melewati ambang batas?

529. KUASA HUKUM PIHAK TERMOHON: FRANS HANDRAJADI [01:13:21]

Siap, Yang Mulia.

530. KETUA: SALDI ISRA [01:13:22]

Oke, apa yang mau Bapak jelaskan?

531. KUASA HUKUM PIHAK TERMOHON: FRANS HANDRAJADI [01:13:17]

Selanjutnya, ke dalam Pokok Perkara, Yang Mulia.

532. KETUA: SALDI ISRA [01:13:26]

Permohonan jelas atau tidak?

533. KUASA HUKUM PIHAK TERMOHON: FRANS HANDRAJADI [01:13:28]

Tidak jelas, Yang Mulia.

534. KETUA: SALDI ISRA [01:13:30]

Di mananya tidak jelas, Pak?

535. KUASA HUKUM PIHAK TERMOHON: FRANS HANDRAJADI [01:13:32]

Tidak ada perhitungan suara yang didalikan oleh Pemohon.

536. KETUA: SALDI ISRA [01:13:36]

Satu. Yang lain?

537. KUASA HUKUM PIHAK TERMOHON: FRANS HANDRAJADI [01:13:37]

Cukup itu, Yang Mulia.

538. KETUA: SALDI ISRA [01:13:38]

Oh, itu saja?

539. KUASA HUKUM PIHAK TERMOHON: FRANS HANDRAJADI [01:13:39]

Ya, Yang Mulia.

540. KETUA: SALDI ISRA [01:13:41]

Tapi boleh kan, enggak ada perhitungan suara? Boleh atau tidak?

541. KUASA HUKUM PIHAK TERMOHON: FRANS HANDRAJADI [01:13:44]

Boleh, Yang Mulia.

542. KETUA: SALDI ISRA [01:13:41]

Nah, kalau itu, enggak jelas tuh, jelas Permohonannya namanya. Sekarang masuk Pokok Permohonan, apa yang mau dijelaskan?

543. KUASA HUKUM PIHAK TERMOHON: FRANS HANDRAJADI [01:13:53]

Dalam Pokok Permohonan, berkaitan dengan dalil-dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon memanipulasi identitas Calon Nomor Urut 2, Yang Mulia.

544. KETUA: SALDI ISRA [01:14:10]

Ya, bagaimana itu ceritanya? Apa bantahannya atau keterangannya, penjelasannya, Termohon?

545. KUASA HUKUM PIHAK TERMOHON: FRANS HANDRAJADI [01:14:21]

Siap, Yang Mulia.

Bahwa Termohon ... bahwa Termohon melakukan penelitian administrasi dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon, berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024.

546. KETUA: SALDI ISRA [01:14:38]

Ya.

547. KUASA HUKUM PIHAK TERMOHON: FRANS HANDRAJADI [01:14:41]

Bahwa Termohon sejak masa pendaftaran sampai dengan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mesuji Tahun 2024, tidak mendapatkan laporan ataupun rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Mesuji bahwa pada saat Termohon melakukan penetapan (...)

c

548. KETUA: SALDI ISRA [01:14:57]

Ini ada atau tidak laporan, kan ada perbedaan nama Hj. Elfianah.

549. KUASA HUKUM PIHAK TERMOHON: FRANS HANDRAJADI [01:15:02]

Siap, Yang Mulia.

550. KETUA: SALDI ISRA [01:15:03]

Ya, antara nama yang muncul ketika pendaftaran dengan indikasi ada di Putusan Mahkamah Agung?

551. KUASA HUKUM PIHAK TERMOHON: FRANS HANDRAJADI [01:15:10]

Siap, Yang Mulia.

552. KETUA: SALDI ISRA [01:15:10]

Nah, coba jelaskan itu!

553. KUASA HUKUM PIHAK TERMOHON: FRANS HANDRAJADI [01:15:13]

Buat terkait kebenaran Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2, maka Termohon akan melihat dokumen persyaratan calon, yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 45 ayat (2) yang menyatakan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi huruf d, fotokopi ijazah pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau

sederajat yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang dan KTP elektronik dengan Nomor Induk Kependudukan.

554. KETUA: SALDI ISRA [01:15:39]

Oke, sekarang antara ijazah terakhir yang digunakan itu yang SMA atau SLTA itu, dengan KTP, sama atau tidak?

555. KUASA HUKUM PIHAK TERMOHON: FRANS HANDRAJADI [01:15:48]

Sama, pakai fanta, Yang Mulia.

556. KETUA: SALDI ISRA [01:15:50]

Pakai fanta, ya?

557. KUASA HUKUM PIHAK TERMOHON: FRANS HANDRAJADI [01:15:51]

Ya, Yang Mulia.

558. KETUA: SALDI ISRA [01:15:51]

Fanta itu yang kayak begini, ya?

559. KUASA HUKUM PIHAK TERMOHON: FRANS HANDRAJADI [01:15:53]

Ya ... bukan, itu victory.

560. KETUA: SALDI ISRA [01:15:54]

Oh, oke, victory, ya?

561. KUASA HUKUM PIHAK TERMOHON: FRANS HANDRAJADI [01:15:56]

Siap.

562. KETUA: SALDI ISRA [01:15:57]

Bapak bisa juga membedakan. Yang begini, ya?

563. KUASA HUKUM PIHAK TERMOHON: FRANS HANDRAJADI [01:15:58]

Ya, Yang Mulia.

564. KETUA: SALDI ISRA [01:15:59]

Nah, terus hubungannya yang Putusan Mahkamah Agung itu bagaimana?

565. KUASA HUKUM PIHAK TERMOHON: FRANS HANDRAJADI [01:16:02]

Putusan Mahkamah Agung itu kemungkinan indikasi salah (typo), Yang Mulia. Karena dasar pencalon ... dokumen pencalonan dan syarat calon itu semua memakai Elfianah, Yang Mulia, fanta, Yang Mulia.

566. KETUA: SALDI ISRA [01:16:17]

Oke, tapi yang dalam putusan itu betul nama ibu ini? Ibu Hajah ini? Orangnya sama atau tidak?

567. KUASA HUKUM PIHAK TERMOHON: FRANS HANDRAJADI [01:16:25]

Orangnya sama, Yang Mulia.

568. KETUA: SALDI ISRA [01:16:25]

Orangnya sama. Oke. Itu tindak pidana apa yang dilakukan?

569. KUASA HUKUM PIHAK TERMOHON: FRANS HANDRAJADI [01:16:29]

Menyalurkan pupuk di luar wilayah.

570. KETUA: SALDI ISRA [01:16:33]

Oh, apa? Menyalurkan (...)

571. KUASA HUKUM PIHAK TERMOHON: FRANS HANDRAJADI [01:16:36]

Menyalurkan pupuk di luar wilayah (...)

572. KETUA: SALDI ISRA [01:16:36]

Itu hukumannya berapa tahun?

573. KUASA HUKUM PIHAK TERMOHON: FRANS HANDRAJADI [01:16:39]

Putusan 3 ... 3 bulan percobaan dan masa percobaan 6 bulan.

574. KETUA: SALDI ISRA [01:16:44]

Masa percobaan 6 bulan. Ancaman hukumannya berapa?

575. KUASA HUKUM PIHAK TERMOHON: FRANS HANDRAJADI [01:16:46]

Sekitar 2 tahun, Yang Mulia.

576. KETUA: SALDI ISRA [01:16:48]

Kok pakai sekitar?

577. KUASA HUKUM PIHAK TERMOHON: FRANS HANDRAJADI [01:16:49]

Kalau tidak salah (...)

578. KETUA: SALDI ISRA [01:16:49]

Kan di dalam ... apa ... itu kan enggak ada sekitar, Pak. 2 tahun, 6 bulan, segala macam (...)

579. KUASA HUKUM PIHAK TERMOHON: FRANS HANDRAJADI [01:16:55]

Ya, Yang Mulia.

580. KETUA: SALDI ISRA [01:16:55]

Yang sebenarnya yang mana nih? Berapa tahun ancaman hukumannya?

**581. KUASA HUKUM PIHAK TERMOHON: FRANS HANDRAJADI
[01:16:59]**

Kurang paham, Yang Mulia.

582. KETUA: SALDI ISRA [01:17:02]

Kurang paham, oke. Apa lagi yang mau disampaikan?

**583. KUASA HUKUM PIHAK TERMOHON: FRANS HANDRAJADI
[01:17:05]**

Bahwa kebenaran identitas calon bupati atas nama Elfianah ini juga diperkuat berdasarkan Surat Dinas Kepundudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mesuji, Yang Mulia.

584. KETUA: SALDI ISRA [01:17:13]

Oke, jadi sudah ada surat dari Dinas Mesuji, ya?

**585. KUASA HUKUM PIHAK TERMOHON: FRANS HANDRAJADI
[01:17:17]**

Ya.

KETUA: SALDI ISRA [01:17:18]

Oke.

**586. KUASA HUKUM PIHAK TERMOHON: FRANS HANDRAJADI
[01:17:19]**

Data kependudukan, Yang Mulia.

587. KETUA: SALDI ISRA [01:17:19]

Oke. Apa lagi?

**588. KUASA HUKUM PIHAK TERMOHON: FRANS HANDRAJADI
[01:17:22]**

Buat dalil berikutnya, bantahan terhadap dalil Pemohon[sic!] yang menyatakan Termohon[sic!] tidak melaksanakan tugas sesuai peraturan dengan melakukan pembiaran pada saat hari tenang.

589. KETUA: SALDI ISRA [01:17:33]

Ya.

590. KUASA HUKUM PIHAK TERMOHON: FRANS HANDRAJADI [01:17:33]

Dimana PK Paslon lain telah dibersihkan, namun banner Paslon Nomor Urut 2 tetap terpampang di mana-mana.

591. KETUA: SALDI ISRA [01:17:39]

Nah, bagaimana tuh penjelasannya?

592. KUASA HUKUM PIHAK TERMOHON: FRANS HANDRAJADI [01:17:42]

Bahwa terhadap alat kampanye yang difasilitasi Termohon, sudah dilakukan penertiban ketika memasuki masa tenang melalui Surat Nomor 1515. Surat itu ditujukan kepada para Paslon di Kabupaten Mesuji, ada 4 Paslon, yaitu di ... kami memberikan imbauan kepada Paslon untuk menertibkan surat itu, menertibkan APK[sic!] (...)

593. KETUA: SALDI ISRA [01:18:03]

Ya.

594. KUASA HUKUM PIHAK TERMOHON: FRANS HANDRAJADI [01:18:03]

Dan kami juga mengirimkan surat ke Bawaslu, terus terkait itu juga ke Pj Bupati.

595. KETUA: SALDI ISRA [01:18:13]

Ini yang menang incumbent bukan, ya? Baru, ya?

596. KUASA HUKUM PIHAK TERMOHON: FRANS HANDRAJADI [01:18:14]

Bukan.

597. KETUA: SALDI ISRA [01:18:15]

Baru, ya?

**598. KUASA HUKUM PIHAK TERMOHON: FRANS HANDRAJADI
[01:18:15]**

Bukan, Yang Mulia.

599. KETUA: SALDI ISRA [01:16:00]

Incumbent sudah tidak ikut lagi?

**600. KUASA HUKUM PIHAK TERMOHON: FRANS HANDRAJADI
[01:18:17]**

Enggak, Yang Mulia.

601. KETUA: SALDI ISRA [01:18:17]

Oke. Apa lagi yang mau disampaikan?

**602. KUASA HUKUM PIHAK TERMOHON: FRANS HANDRAJADI
[01:18:20]**

Bahwa pada saat sebelum dan sesudah pemasangan alat peraga kampanye yang difasilitasi oleh Termohon ataupun pada masa tenang sebagaimana yang didalikan oleh Pemohon, Termohon tidak mendapatkan laporan, temuan, dan/atau rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Mesuji untuk (...)

603. KETUA: SALDI ISRA [01:18:34]

Oke.

**604. KUASA HUKUM PIHAK TERMOHON: FRANS HANDRAJADI
[01:18:34]**

Dalil yang berikutnya, bantahan terhadap Pemohon yang menyatakan Termohon telah melakukan pelanggaran pemilu yang menurut Pemohon di TPS Tanjung Sari sebelum dilakukan pencoblosan, KPPS memintakan kepada seluruh saksi dan seluruh petugas TPS untuk menandatangani formulir.

Bahwa jumlah TPS di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Tanjung Raya yang telah ditetapkan oleh Termohon berjumlah 4 TPS dengan jumlah DPT=2.242 pemilih. Justru di TPS Tanjung Sari ini Pemohon menang, Yang Mulia.

605. KETUA: SALDI ISRA [01:19:03]

Oke, Pemohon menang, ya?

606. KUASA HUKUM PIHAK TERMOHON: FRANS HANDRAJADI [01:19:05]

Ya.

607. KETUA: SALDI ISRA [01:19:06]

Di empat-empat TPS itu?

608. KUASA HUKUM PIHAK TERMOHON: FRANS HANDRAJADI [01:19:07]

4 TPS menang, Yang Mulia.

609. KETUA: SALDI ISRA [01:19:07]

Oke, kalau dilakukan pemungutan suara ulang, jangan-jangan berubah suaranya itu.

610. KUASA HUKUM PIHAK TERMOHON: FRANS HANDRAJADI [01:19:13]

Mungkin. Siap, Yang Mulia.

611. KETUA: SALDI ISRA [01:19:14]

Lanjut, apa lagi?

612. KUASA HUKUM PIHAK TERMOHON: FRANS HANDRAJADI [01:19:14]

Bantahan terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu dengan baik. Hal ini dapat dibuktikan di TPS 2 Gedung Mulyo[sic!], PPS mengambil kertas suara atas nama Sugianto dan mencoblosnya, namun karena keburu ketahuan, maka PPS tersebut menghentikan aksinya.

613. KETUA: SALDI ISRA [01:19:34]

Oke, apa penjelasannya?

614. KUASA HUKUM PIHAK TERMOHON: FRANS HANDRAJADI [01:19:37]

Penjelasannya. Bahwa pada saat sebelum[sic!] dan sesudah pemungutan suara di TPS 2 Gedung Mulyo maupun perhitungan suara tingkat kecamatan dan perhitungan suara tingkat kabupaten, Termohon tidak pernah mendapat laporan dan/atau rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Mesuji beserta jajarannya berkenaan dengan pelanggaran, sebagaimana yang didalikan oleh Pemohon.

615. KETUA: SALDI ISRA [01:19:59]

Oke, terus?

616. KUASA HUKUM PIHAK TERMOHON: FRANS HANDRAJADI [01:20:00]

Bantahan terhadap dalil Pemohon yang menyatakan, Termohon tidak menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu yang baik.

617. KETUA: SALDI ISRA [01:20:08]

Itu yang tidak ... apa ... 40 mata katanya, kan?

618. KUASA HUKUM PIHAK TERMOHON: FRANS HANDRAJADI [01:20:11]

40 mata pemilih, Yang Mulia.

619. KETUA: SALDI ISRA [01:20:12]

Saya enggak tahu juga 40 mata itu, 40 pasang mata atau tidak itu. Oke, tapi dianggaplah 40 pemilih, begitu.

620. KUASA HUKUM PIHAK TERMOHON: FRANS HANDRAJADI [01:20:18]

Ya, Yang Mulia.

621. KETUA: SALDI ISRA [01:20:18]

Tidak menerima atau tidak berangkat ke TPS.

622. KUASA HUKUM PIHAK TERMOHON: FRANS HANDRAJADI [01:20:21]

Siap, Yang Mulia.

623. KETUA: SALDI ISRA [01:20:22]

Apa penjelasannya?

624. KUASA HUKUM PIHAK TERMOHON: FRANS HANDRAJADI [01:20:23]

Bahwa seandainya terdapat pemilih yang telah terdaftar dan DPT, akan tetapi tidak mendapatkan surat pemberitahuan pemungutan suara, Model C Pemberitahuan KWK, maka pemilih tersebut dapat menggunakan KTP elektronik.

Bahwa penggunaan KTP elektronik oleh pemilih sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 61 UU Nomor 1 Tahun 2019.

625. KETUA: SALDI ISRA [01:20:41]

Ya, itu saya tahu kalau itu. Pertanyaan sekarang, benar atau tidak 40 orang itu tidak diberi surat panggilan?

626. KUASA HUKUM PIHAK TERMOHON: FRANS HANDRAJADI [01:20:49]

Pada saat dibagikan, mereka itu tidak dilokasi, Yang Mulia.

627. KETUA: SALDI ISRA [01:20:53]

40 orang itu?

628. KUASA HUKUM PIHAK TERMOHON: FRANS HANDRAJADI [01:20:53]

Ya.

629. KETUA: SALDI ISRA [01:20:54]

Tidak dilokasi?

630. KUASA HUKUM PIHAK TERMOHON: FRANS HANDRAJADI [01:20:55]

Ya.

631. KETUA: SALDI ISRA [01:20:55]

Tidak dititip juga di tempat lain?
KPU. Saya tanya KPU ini. Ini kalau lawyer kan kadang-kadang karang-karang juga, mereka yang tahu ini. Coba Anda ceritakan.

632. TERMOHON: SAMINGAN [01:21:03]

Baik. Izin, Yang Mulia. Untuk 40 orang pemilih itu, itu berdomisili di wilayah register.

633. KETUA: SALDI ISRA [01:21:11]

Ya.

634. TERMOHON: SAMINGAN [01:21:11]

Register 45. Jadi kewenangan kami sebagai Badan ad hoc, itu tidak bisa memasuki wilayah register yang belum teregistrasi di Kabupaten Mesuji.

635. KETUA: SALDI ISRA [01:21:20]

Ya, terus? Sehingga?

636. TERMOHON: SAMINGAN [01:21:22]

Sehingga Surat C Pemberitahuan itu tidak bisa tersampaikan ke pemilih.

637. KETUA: SALDI ISRA [01:21:28]

Oke, pertanyaan saya, dari 40 yang tidak dipanggil itu, ada enggak yang datang ke TPS?

638. TERMOHON: SAMINGAN [01:21:36]

Tidak ada, Yang Mulia.

639. KETUA: SALDI ISRA [01:21:37]

40 itu tidak datang, ya?

640. TERMOHON: SAMINGAN [01:21:38]

Tidak ada.

641. KETUA: SALDI ISRA [01:21:40]

Betul, Pemohon? Mana Pemohon ini, Mesuji? Pemohonnya mana? Kuasa Pemohon Mesuji. Wah, ini kalau tidak ada, ini sudah, sudah menyerah duluan ini barang ini. Ke mana itu?
Oke, lanjutkan.

642. KUASA HUKUM PIHAK TERMOHON: FRANS HANDRAJADI [01:22:01]

Lanjut, Yang Mulia.

643. KETUA: SALDI ISRA [01:22:02]

Ya.

644. KUASA HUKUM PIHAK TERMOHON: FRANS HANDRAJADI [01:22:03]

Bantahan terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Termohon telah melakukan kecurangan dengan melakukan penambahan DPTb di beberapa TPS melebihi peraturan, yaitu Termohon melakukan DPTb melebihi 2,5% dari DPT.

Bahwa Pemohon telah keliru mela ... bahwa Pemohon telah melakukan kekeliruan dengan mendalilkan jumlah DPTb yang menurut Pemohon melebihi 2,5% dari DPT.

Bahwa dalil Pemohon ini menunjukkan ketidakjelasan Permohonan Pemohon. Bahwa hal ini membuktikan Pemohon tidak memahami ketentuan yang mengatur tentang DPT, DPTb, dan kebutuhan keta ... surat suara di tiap TPS, yakni DPT ditambah 2,5% surat suara cadangan dari jumlah pemilih yang dicantum dalam daftar pemilih tetap di tiap TPS.

645. KETUA: SALDI ISRA [01:22:47]

Oke, lanjut Petitem, Pak.

646. KUASA HUKUM PIHAK TERMOHON: FRANS HANDRAJADI [01:22:50]

Siap, Yang Mulia.

647. KETUA: SALDI ISRA [01:22:50]

Oke. Itu kalau Hakim suruh ke Petitem, senang sekali.

648. TERMOHON: SAMINGAN [01:22:54]

Izin melanjutkan, Yang Mulia.

649. KUASA HUKUM PIHAK TERMOHON: FRANS HANDRAJADI [01:22:55]

Prinsipal, Yang Mulia.

650. KETUA: SALDI ISRA [01:22:55]

Ya.

651. TERMOHON: SAMINGAN [01:22:58]

Petitem.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor 1800 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji Tahun 2024, tertanggal 3 Desember 2024, pukul 14.00 WIB.
3. Menetapkan perolehan suara. (...)

652. KETUA: SALDI ISRA [01:23:45]

Kalau sudah di (...)

653. TERMOHON: SAMINGAN [01:23:46]

Dianggap dibacakan.

654. KETUA: SALDI ISRA [01:23:47]

Bukan nih, kalau sudah dibenarkan yang lama, enggak usah diminta lagi yang baru.

655. TERMOHON: SAMINGAN [01:23:52]

Siap.

656. KETUA: SALDI ISRA [01:23:52]

Nanti Anda menetapkan lagi nanti, kan?

657. TERMOHON: SAMINGAN [01:23:53]

Siap, Yang Mulia.

658. KETUA: SALDI ISRA [01:23:52]

Nah itu apa lagi, cukup?

659. TERMOHON: SAMINGAN [01:23:57]

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian, Eksepsi dan jawaban dari Termohon. Atas perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, kami mengucapkan terima kasih.

660. KETUA: SALDI ISRA [01:24:09]

Terima kasih.
Pihak Terkait, Silakan.

661. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 39/PHPU.BUP-XXIII/2025: AIDA MARDATILLAH [01:24:14]

Terima kasih.
Assalamualaikum wr. wb.

662. KETUA: SALDI ISRA [01:24:17]

Walaikumsalam.

663. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 39/PHPU.BUP-XXIII/2025: AIDA MARDATILLAH [01:24:19]

Perkara 39, Kuasa Hukum yang hadir, saya sendiri Aida Mardatillah dan rekan saya M. Ridho, Yang Mulia.

664. KETUA: SALDI ISRA [01:24:25]

Ya.

665. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 39/PHPU.BUP-XXIII/2025: AIDA MARDATILLAH [01:24:26]

Mewakili Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Kabupaten Mesuji Tahun 2024, Nomor Urut 2.

666. KETUA: SALDI ISRA [01:24:34]

Ya.

667. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 39/PHPU.BUP-XXIII/2025: AIDA MARDATILLAH [01:24:34]

Yaitu, atas nama Hj. Elfianah dan M. Yugi Wicaksono. Langsung saja, Yang Mulia.

668. KETUA: SALDI ISRA [01:24:39]

Ya.

669. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 39/PHPU.BUP-XXIII/2025: AIDA MARDATILLAH [01:24:39]

Dalam Eksepsi.
Yang pertama, Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum (legal standing) dalam mengajukan Permohonan a quo.

670. KETUA: SALDI ISRA [01:24:48]

Oke.

671. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 39/PHPU.BUP-XXIII/2025: AIDA MARDATILLAH [01:24:48]

Dengan alasan, A.

672. KETUA: SALDI ISRA [01:24:50]

Eggak usah di ... disampaikan, Bu. Biar tidak (...)

673. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 39/PHPU.BUP-XXIII/2025: AIDA MARDATILLAH [01:24:51]

Baik, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil Ketentuan Pasal 158, Yang Mulia.

674. KETUA: SALDI ISRA [01:24:56]

Oke.

675. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 39/PHPU.BUP-XXIII/2025: AIDA MARDATILLAH [01:24:56]

Selanjutnya, ke halaman 3, poin pertama, Pemohon tidak memenuhi syarat ambang batas.

676. KETUA: SALDI ISRA [01:25:01]

Oke.

677. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 39/PHPU.BUP-XXIII/2025: AIDA MARDATILLAH [01:25:02]

Kemudian lanjut, Yang Mulia, ke halaman 3 ... ke halaman 5, Yang Mulia.

678. KETUA: SALDI ISRA [01:24:06]

Ya.

679. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 39/PHPU.BUP-XXIII/2025: AIDA MARDATILLAH [01:25:07]

Poin 3, jumlah penduduk Kabupaten Mesuji (...)

680. KETUA: SALDI ISRA [01:25:08]

Ya, itu enggak usah. Enggak usah, itu, sudah cukup. Jadi, tidak memiliki legal standing karena tidak memenuhi Pasal 158 dengan segala alasannya. Permohonan kabur.

Tenggat waktunya oke, ya? Enggak ada masalah, ya?

681. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 39/PHPU.BUP-XXIII/2025: AIDA MARDATILLAH [01:25:21]

Tidak ada masalah, Yang Mulia.

682. KETUA: SALDI ISRA [01:25:22]

Oke. Permohonan tidak jelas atau kabur, apa yang mau dijelaskan?

683. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 39/PHPU.BUP-XXIII/2025: AIDA MARDATILLAH [01:25:25]

Kemudian halaman 6, Yang Mulia, suara Pemohon adalah (...)

684. KETUA: SALDI ISRA [01:25:28]

Ya, enggak usah itu lagi.

685. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 39/PHPU.BUP-XXIII/2025: AIDA MARDATILLAH [01:25:29]

Oh, tidak usah lagi.

686. KETUA: SALDI ISRA [01:25:31]

Jangan diulang-ulang itu!

687. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 39/PHPU.BUP-XXIII/2025: AIDA MARDATILLAH [01:25:32]

Oke.

688. KETUA: SALDI ISRA [01:25:32]

Langsung ke halaman 11.

689. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 39/PHPU.BUP-XXIII/2025: AIDA MARDATILLAH [01:25:34]

Ke halaman 11, Yang Mulia, Permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur ... tidak menjelaskan TP ... TPS-TPS yang mengubah hasil suara.

Poin 10, bahwa Pe ... Permohonan Pemohon tidak menjelaskan dalil-dalil yang menarakan signifikansi kecurangan perolehan suara dari setiap TPS yang menurut Pemohon terjadi kecurangan. Bahwa Permohonan Pemohon hanya menjelaskan Pihak Terkait melakukan kecurangan yang tersistematis, terstruktur, dan massif, tanpa menjelaskan angka-angka pasti perolehan hasil suara yang terjadi kecurangan di setiap TPS-nya.

690. KETUA: SALDI ISRA [01:26:07]

Oke. Petitem tidak jelas itu, di mana tidak jelas, Petitemnya?

691. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 39/PHPU.BUP-XXIII/2025: AIDA MARDATILLAH [01:26:11]

Tidak jelasnya dalam Petitem premier dan sekundernya, Yang Mulia, Pemohon hanya meminta menghilangkan suara Pihak Terkait saja, yakni Pasangan Calon Nomor Urut 2, sehingga hak-hak dari pemilih yang telah memberikan suara dari Pihak Terkait itu hilang, Yang Mulia.

Kemudian Pemohon berarti melanggar Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar, terus kemudian Pasal 28D ... 28D ayat (3), khususnya terkait dengan hak politik dalam memberikan hak pilihnya di setiap pelaksanaan demokrasi langsung.

692. KETUA: SALDI ISRA [01:26:38]

Oke, lanjut.

693. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 39/PHPU.BUP-XXIII/2025: AIDA MARDATILLAH [01:26:39]

Lanjut, poin 12, Yang Mulia.

Petitem angka 8, Pemohon hanya meminta keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor 18.000, hanya menyangkut Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Padahal, Petitem Pemohon meminta pemungutan suara langsung di se ... di seluruh TPS se-Kabupaten Mesuji, yang berakibat pada suara-suara yang diperoleh dari Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji yang lainnya.

694. KETUA: SALDI ISRA [01:27:04]

Oke.

695. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 39/PHPU.BUP-XXIII/2025: AIDA MARDATILLAH [01:27:04]

Izin, Yang Mulia, untuk Pokok Permohonan, diteruskan rekan saya.

696. KETUA: SALDI ISRA [01:27:08]

Silakan.

697. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 39/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. RIDHO [01:27:13]

Terima kasih, Yang Mulia.
Izin membacakan Pokok Permohonan.

698. KETUA: SALDI ISRA [01:27:16]

Silakan. Jangan dibacakan, Pak! Kalau dibacakan, lama selesainya, ini. Diterangkan saja poin-poinnya.

699. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 39/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. RIDHO [01:27:23]

Ya. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan Dalam Eksepsi tersebut di atas, mohon dianggap diulang kembali, dalam Pokok Permohonan ini.
Selanjutnya, dalil Pemohon pada poin 3 halaman 5, pada poin 14, Yang Mulia.

700. KETUA: SALDI ISRA [01:27:40]

Ya.

701. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 39/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. RIDHO [01:27:41]

Pada intinya, Pemohon mendalilkan Pihak Terkait melanggar prinsip-prinsip pemilu yang luber dan jurdil. Hal ini tidak dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Mesuji, Yang Mulia.

702. KETUA: SALDI ISRA [01:27:54]

Oke. Itu intinya, apa lagi?

703. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 39/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. RIDHO [01:27:56]

Kemudian, berkaitan dengan dalil poin 8, halaman 5.

704. KETUA: SALDI ISRA [01:28:02]

Ya.

705. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 39/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. RIDHO [01:28:02]

Sampai dengan halaman 6, terkait dengan tidak dilakukan verifikasi terhadap syarat calon, Yang Mulia.

706. KETUA: SALDI ISRA [01:28:08]

Ya.

707. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 39/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. RIDHO [01:28:09]

Sudah kami lampirkan di sini ijazah SD, SMP, SMA, Strata 1, Kartu Tanda Penduduk Elektronik maupun Kartu Keluarga, Yang Mulia.

708. KETUA: SALDI ISRA [01:28:21]

Itu semuanya sama, ya?

709. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 39/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. RIDHO [01:28:22]

Semuanya sama.

710. KETUA: SALDI ISRA [01:28:23]

Dengan huruf f?

**711. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
39/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. RIDHO [01:28:24]**

Ya.

712. KETUA: SALDI ISRA [01:28:26]

Bukan v, ya?

**713. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
39/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. RIDHO [01:28:26]**

Bukan, Yang Mulia.

714. KETUA: SALDI ISRA [01:28:27]

Oke.

**715. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
39/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. RIDHO [01:28:29]**

Terkait dengan dua KTP yang berbeda, dengan nama yang berbeda tadi yang dimaksud adalah faktanya KTP atas nama Elfianah adalah KTP lama, yakni ketika Pihak Terkait masih bertempat tinggal di Kabupaten Tulang Bawang, Yang Mulia.

716. KETUA: SALDI ISRA [01:28:45]

Oke.

**717. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
39/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. RIDHO [01:28:46]**

KTP tersebut tidak sama pengejaannya dengan Akta Lahir dan ijazah.

718. KETUA: SALDI ISRA [01:28:51]

Oke.

**719. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
39/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. RIDHO [01:28:52]**

Dimana seharusnya nama Pihak Terkait adalah Elfianah pakai Fanta.

720. KETUA: SALDI ISRA [01:28:57]

Oke.

721. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 39/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. RIDHO [01:28:58]

Sehingga dilakukan perbaikan nama di KTP.

722. KETUA: SALDI ISRA [01:29:01]

KTP baru yang pindah alamat?

723. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 39/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. RIDHO [01:29:03]

Benar. Ketika (...)

724. KETUA: SALDI ISRA [01:29:04]

Oke, lanjut!

725. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 39/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. RIDHO [01:29:05]

Ketika Pihak Terkait pindah ke Kabupaten Mesuji, disesuaikan dengan Akta Lahir dan ijazah. Itu sudah di bukti dengan PT-8B, Yang Mulia.

726. KETUA: SALDI ISRA [01:29:16]

Oke.

727. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 39/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. RIDHO [01:29:16]

Telah dikuatkan juga melalui surat dari Dinas Kependudukan Catatan Sipil.

728. KETUA: SALDI ISRA [01:29:28]

Ya.

**729. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
39/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. RIDHO [01:29:16]**

Bahwa nama tersebut adalah Elfianah, Yang Mulia.

730. KETUA: SALDI ISRA [01:29:28]

Oke.

**731. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
39/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. RIDHO [01:29:29]**

Kemudian terkait dengan Putusan Mahkamah Agung RI dalam Perkara 774 Pidsus, Yang Mulia.

732. KETUA: SALDI ISRA [01:29:38]

Ya.

**733. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
39/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. RIDHO [01:29:39]**

Dalam Putusan Mahkamah Agung tersebut, amar putusan yang dikenakan kepada Pihak Terkait, bukan ancaman pidana yang lebih dari lima tahun, Yang Mulia.

734. KETUA: SALDI ISRA [01:29:48]

Oke.

**735. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
39/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. RIDHO [01:29:49]**

Ya, dimana (...)

736. KETUA: SALDI ISRA [01:29:50]

Itu apa tindak pidananya?

**737. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
39/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. RIDHO [01:29:52]**

Gimana, Yang Mulia?

738. KETUA: SALDI ISRA [01:29:53]

Apa tindak pidananya?

739. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 39/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. RIDHO [01:29:54]

Tindak pidana menyalurkan pupuk subsidi di luar wilayah.

740. KETUA: SALDI ISRA [01:29:59]

Oke. Sekarang masih jualan pupuk, enggak, Ibu itu?

741. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 39/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. RIDHO [01:30:01]

Enggak, Yang Mulia.

742. KETUA: SALDI ISRA [01:30:02]

Oke, nanti jadi bupati nanti, kalau misalnya selesai ini, kalau menang, nanti masih berdagang, enggak?

743. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 39/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. RIDHO [01:30:07]

Itu tahun 2003, Yang Mulia.

744. KETUA: SALDI ISRA [01:30:09]

Oh, sudah lama sekali, ya.

745. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 39/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. RIDHO [01:30:09]

Sudah lama, Yang Mulia.

746. KETUA: SALDI ISRA [01:30:11]

Sekarang bisnisnya apa, Ibu ini?

747. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 39/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. RIDHO [01:30:12]

Kemarin anggota DPR ... Ketua DPR.

748. KETUA: SALDI ISRA [01:30:18]

DPRD?

749. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 39/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. RIDHO [01:30:18]

DPRD, ya.

750. KETUA: SALDI ISRA [01:30:19]

DPR, DPRD itu beda, Pak!

751. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 39/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. RIDHO [01:30:20]

Ya.

752. KETUA: SALDI ISRA [01:30:21]

Lanjut, ada apa lagi?

753. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 39/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. RIDHO [01:30:23]

Ya. Kemudian bahwa perbaikan amar tersebut pun sudah digunakan dalam penetapan calon legislatif pada saat beliau mencalonkan diri, pada saat dia legislatif, Yang Mulia.

754. KETUA: SALDI ISRA [01:30:37]

Oke. Ketika mencalonkan sebagai anggota legislatif pun, sudah pakai f ya, bukan v?

755. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 39/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. RIDHO [01:30:42]

Benar.

756. KETUA: SALDI ISRA [01:30:42]

Oke.

757. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 39/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. RIDHO [01:30:43]

Bahkan, Yang Mulia, hal ini sudah diketahui oleh Pemohon, Yang Mulia.

758. KETUA: SALDI ISRA [01:30:48]

Jadi, enggak ada keberatan dulu soal nama ini ketika proses pencalonan?

759. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 39/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. RIDHO [01:30:52]

Tidak ada, Yang Mulia.

760. KETUA: SALDI ISRA [01:30:53]

Oke. Apa lagi?

761. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 39/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. RIDHO [01:30:54]

Karena dia sudah, Pemohon, Yang Mulia, wakil bupati, calon wakil bupati adalah ketua partainya dari Pihak Terkait, Yang Mulia, pada saat itu.

Dia sudah mendandatangani surat bahwa yang bersangkutan sebagai kader Nasdem memberikan surat keterangan bahwa nama Elvianah dan Elfianah adalah orang yang sama, Yang Mulia.

762. KETUA: SALDI ISRA [01:31:23]

Oke. Sudah dilampirkan, ya?

763. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 39/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. RIDHO [01:31:25]

Ya, Yang Mulia. Di Bukti PT-14, Yang Mulia.

764. KETUA: SALDI ISRA [01:31:28]

Oke. Sekarang kita tinggalkan soal nama. Apa lagi yang lain yang mau dijelaskan?

**765. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
39/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. RIDHO [01:31:33]**

Di TPS Tanjung Sari, Yang Mulia.

766. KETUA: SALDI ISRA [01:31:38]

Ya. Ada apa di TPS Tanjung Sari?

**767. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
39/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. RIDHO [01:31:40]**

Ya. Bahwa dalil Pemohon di TPS Tanjung Sari itu tidak benar, Yang Mulia. Bahwa ... karena di TPS Tanjung Sari ini, perolehan Pemohon justru lebih besar daripada Termohon.

768. KETUA: SALDI ISRA [01:31:54]

Oke. Tanjung Sari, Kecamatan Tanjung Raya, ya?

**769. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
39/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. RIDHO [01:31:57]**

Ya, benar. Perolehan Pemohon itu 1.455, sedangkan Pihak Terkait hanya 239, ya.

770. KETUA: SALDI ISRA [01:32:06]

Oke, lanjut. Apa lagi?

**771. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
39/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. RIDHO [01:32:08]**

Kemudian (...)

772. KETUA: SALDI ISRA [01:32:09]

Soal DPT sudah, ya. DPT yang 2,5%, enggak usah dijelaskan.

**773. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
39/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. RIDHO [01:32:13]**

Ya, Yang Mulia.

774. KETUA: SALDI ISRA [01:32:15]

Apa lagi? Lanjut ke Petitem.

775. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 39/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. RIDHO [01:32:21]

Silakan. Rekan saya, Pak.

776. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 39/PHPU.BUP-XXIII/2025: AIDA MARDATILLAH [01:32:23]

Izin melanjutkan kembali, Yang Mulia.

777. KETUA: SALDI ISRA [01:32:25]

Ya.

778. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 39/PHPU.BUP-XXIII/2025: AIDA MARDATILLAH [01:32:26]

Petitem.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Menerima Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki legal standing.
3. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.
4. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat dire ... diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor 18000[sic!] Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji Tahun 2024, pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, pukul 02.00 WIB.
3. Menetapkan perolehan suara yang benar (...)

779. KETUA: SALDI ISRA [01:33:16]

Ya, itu dianggap dibacakan.

780. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 39/PHPU.BUP-XXIII/2025: AIDA MARDATILLAH [01:33:18]

Baik, Yang Mulia.

781. KETUA: SALDI ISRA [01:33:19]

Itu kan sama saja maksudnya, ya.

782. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 39/PHPU.BUP-XXIII/2025: AIDA MARDATILLAH [01:33:19]

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, ex aequo et bono.

783. KETUA: SALDI ISRA [01:33:26]

Terima kasih.

784. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 39/PHPU.BUP-XXIII/2025: AIDA MARDATILLAH [01:33:27]

Terima kasih, Yang Mulia.

785. KETUA: SALDI ISRA [01:33:29]

Ya. Bawaslu, silakan.

786. BAWASLU: DEDEN CAHYONO [01:33:32]

Izin, Yang Mulia.

787. KETUA: SALDI ISRA [01:33:33]

Ya.

788. BAWASLU: DEDEN CAHYONO [01:33:33]

Assalamualaikum wr.wb.

Saya Prinsipal dari Bawaslu Mesuji, Deden Cahyono sebagai Ketua Bawaslu Mesuji beserta Wahyu Eko Persetyo, Divisi Hukum.

789. KETUA: SALDI ISRA [01:33:45]

Ya.

790. BAWASLU: DEDED CAHYONO [01:33:45]

Menerangkan keterangan Bawaslu Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung terhadap Perkara Nomor 39/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mesuji Nomor Urut 4.

Yang terhormat, Yang Mulia, langsung saja.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Perhitungan Perolehan Suara menurut Pemohon, angka 1 sampai dengan 5, halaman 5.

Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan Permohon[sic!] a quo tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan.

791. KETUA: SALDI ISRA [01:34:21]

Ada laporan, enggak ke Bawaslu?

792. BAWASLU: DEDED CAHYONO [01:34:25]

Laporan yang diterima oleh Bawaslu ada tiga laporan, Yang Mulia (...)

793. KETUA: SALDI ISRA [01:34:28]

Nah, apa saja itu?

794. BAWASLU: DEDED CAHYONO [01:34:29]

Dan tiga temuan. Tiga laporan ini, yang dua laporan adalah di masa sebelum pendaftaran calon, Yang Mulia.

795. KETUA: SALDI ISRA [01:34:36]

Oke.

796. BAWASLU: DEDED CAHYONO [01:34:37]

Pada tahapan kampanye hanya satu laporan, terkait netralitas kades.

797. KETUA: SALDI ISRA [01:34:42]

Terkait apa?

798. BAWASLU: DEDED CAHYONO [01:34:43]

Terkait netralitas kepala desa, Yang Mulia.

799. KETUA: SALDI ISRA [01:34:44]

Terkait netralitas kepala desa, oke. Apa lagi?

800. BAWASLU: DEDED CAHYONO [01:34:49]

Bahwa Bawaslu Mesuji telah melakukan tugas pencegahan dalam bentuk surat imbauan kepada Kabupaten Mesuji (...)

801. KETUA: SALDI ISRA [01:34:52]

Itu enggak usah dibacakan, ya.

802. BAWASLU: DEDED CAHYONO [01:34:55]

Siap, Yang Mulia.

803. KETUA: SALDI ISRA [01:34:56]

Ya, yang ... lanjut saja.

804. BAWASLU: DEDED CAHYONO [01:34:59]

Bahwa (...)

805. KETUA: SALDI ISRA [01:34:59]

Yang soal nama, soal nama, Hj. Elfianah dengan Elvianah itu, apa yang bisa dijelaskan? Ada laporan enggak kepada Bawaslu?

806. BAWASLU: DEDED CAHYONO [01:35:07]

Tidak ada, Yang Mulia.

807. KETUA: SALDI ISRA [01:35:08]

Tidak ada laporan soal itu?

808. BAWASLU: DEDED CAHYONO [01:35:09]

Tidak ada laporan.

809. KETUA: SALDI ISRA [01:35:10]

Apa yang Saudara ketahui terkait dengan hal itu?

810. BAWASLU: DEDEDEN CAHYONO [01:35:13]

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan kami.

811. KETUA: SALDI ISRA [01:35:16]

Ya.

812. BAWASLU: DEDEDEN CAHYONO [01:35:16]

Yang pada pokoknya, identitas Calon[sic!] Bupati dan atas nama Elfianah, telah terverifikasi oleh KPU Kabupaten Mesuji berdasarkan dokumen KTP elektronik yang diunggah pada aplikasi Sikonkada dengan status benar, Yang Mulia.

813. KETUA: SALDI ISRA [01:35:28]

Oke, cukup. Itu soal APK yang tidak ditarik itu pada hari masa tenang itu? Apa penjelasan Bawaslu? Itu kan tugas Bawaslu, kan?

814. BAWASLU: DEDEDEN CAHYONO [01:35:38]

Baik, Yang Mulia. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan a quo, tidak terdapat laporan atau temuan pada pelanggaran pemilihan dan maupun pemilihan (...)

815. KETUA: SALDI ISRA [01:35:28]

Bukan soal ... bukan soal laporan atau temuannya. Benar atau tidak bahwa pada masa tenang itu, APK-nya masih bersebaran di mana-mana?

816. BAWASLU: DEDEDEN CAHYONO [01:35:54]

Tidak benar, Yang Mulia.

Karena kami, Bawaslu Mesuji, telah melakukan patroli pengawasan se-Kabupaten Mesuji, sebagaimana data inventarisir Alat Peraga Kampanye yang telah kami tertibkan, Yang Mulia.

817. KETUA: SALDI ISRA [01:36:04]

Ya, jadi tidak benar itu, ya?

818. BAWASLU: DEDED CAHYONO [01:36:07]

Tidak benar, Yang Mulia.

819. KETUA: SALDI ISRA [01:36:08]

Oke, apa lagi yang mau dijelaskan?

820. BAWASLU: DEDED CAHYONO [01:36:11]

Cukup, Yang Mulia.

821. KETUA: SALDI ISRA [01:36:12]

Cukup.

822. BAWASLU: DEDED CAHYONO [01:36:13]

Terima kasih. Hormat kami, Bawaslu Mesuji.

823. KETUA: SALDI ISRA [01:36:16]

Oke, terima kasih. Kalau fokus ... apa namanya ... yang didalilkan itu jelas, Termohon menjelaskannya fokus, Pihak Terkait fokus, Bawaslu fokus. Hakim juga fokus, gitu. Nah, soal hasilnya, nanti saja ditunggu. Lanjut sekarang Kota Batam 169.

824. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [01:37:17]

Mohon izin, Yang Mulia.

825. KETUA: SALDI ISRA [01:37:18]

Ya, silakan!

826. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [01:37:20]

Assalamualaikum wr.wb.

827. KETUA: SALDI ISRA [01:37:21]

Walaikumsalam.

828. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [01:37:23]

Perkenalkan, kami Kuasa Hukum Termohon Perkara 169, Komisi Pemilihan Umum Kota Batam. Saya Anjar Nawan Yusky, didampingi di samping saya, Kordiv Hukum Bapak Bosar Hasibuan.

Yang Mulia, sebelum kami menjelaskan pokok-pokok jawaban kami.

829. KETUA: SALDI ISRA [01:37:40]

Ya.

830. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [01:37:41]

Untuk mempersingkat, mohon perkenan, Yang Mulia, kami menampilkan slide, Yang Mulia, tadi sudah diserahkan ke Panitera Pengganti.

831. KETUA: SALDI ISRA [01:37:47]

Silakan. Ini ndak mau kalah sama Profesor Denny ini.

832. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [01:37:51]

Siap, Yang Mulia.

833. KETUA: SALDI ISRA [01:37:52]

Ada komunikasi dengan Profesor Denny, enggak, ya?

834. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [01:37:54]

Tidak ada, Yang Mulia. Semata-mata hanya untuk mempercepat saja.

835. KETUA: SALDI ISRA [01:37:57]

Oke silakan, biar kita cek juga di sini ini. Lanjut.

836. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [01:38:06]

Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kota Batam terhadap Permohonan dengan Perkara Nomor 169 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Nuryanto, S.H., M.H., dan Drs. Hardi Selamat Hood, M.Si., Ph.D., Nomor Urut 1.

Dalam Eksepsi, terkait dengan Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

837. KETUA: SALDI ISRA [01:38:27]

Ya.

838. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [01:38:28]

Kami mohon langsung saja dianggap dibacakan, Yang Mulia.

839. KETUA: SALDI ISRA [01:38:29]

Ya.

840. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [01:38:30]

Kami langsung ke yang penting, selanjutnya.

841. KETUA: SALDI ISRA [01:38:32]

Tenggat Waktu bagaimana?

842. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [01:38:34]

Mengenai Tenggat Waktu, Yang Mulia, di slide sudah kami tampilkan. Sepintas nampaknya sesuai, Yang Mulia.

843. KETUA: SALDI ISRA [01:38:41]

Oke.

844. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [01:38:42]

Dalam artian, dalam batas waktu 3 hari kerja.

845. KETUA: SALDI ISRA [01:38:44]

Ya.

846. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [01:38:45]

Baik untuk permohonan awal, maupun perbaikan. Namun, kami Termohon mempunyai pendapat lain, Yang Mulia. Karena setelah kami cermati, di Perbaikan Permohonan, itu memuat perubahan dan/atau penambahan hal baru yang mengubah substansi dalam Petitumnya, Yang Mulia, terutama. Terutama (...)

847. KETUA: SALDI ISRA [01:39:01]

Oke, sehingga anggap ... Anda anggap permohon (...)

848. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [01:39:04]

Sehingga kami anggap itu patut dipersamakan dengan permohonan baru, Yang Mulia.

849. KETUA: SALDI ISRA [01:39:08]

Oke.

850. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [01:39:09]

Oleh karena itu, permohonan baru itu, ketika kami tarik mundur dengan pengumuman, kami anggap telah lewat waktu, Yang Mulia.

851. KETUA: SALDI ISRA [01:39:14]

Oke, lanjut.

852. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [01:39:16]

Lanjut mengenai (...)

853. KETUA: SALDI ISRA [01:39:17]

Biar kami yang mempertimbangkan nanti.

854. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [01:39:18]

Siap, Yang Mulia. Terima kasih.

855. KETUA: SALDI ISRA [01:39:19]

Ya.

856. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [01:39:20]

Mengenai Kedudukan Hukum atau Legal Standing, pada pokoknya tidak memenuhi ambang batas, Yang Mulia.

857. KETUA: SALDI ISRA [01:39:25]

Oke.

858. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [01:39:26]

Karena selisihnya adalah 32%.

859. KETUA: SALDI ISRA [01:39:28]

Oke, lanjut!

860. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [01:39:29]

Yang seharusnya 0,5%, Yang Mulia.

861. KETUA: SALDI ISRA [01:39:30]

Lanjut.

862. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [01:39:32]

Lanjut. Ini kami ada Eksepsi prosesual, di luar Eksepsi kompetensi. Ini berawal ketika kami kemarin melakukan inzage, Yang Mulia.

863. KETUA: SALDI ISRA [01:39:40]

Ya.

864. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [01:39:41]

Kami temukan ada perbedaan antara Surat Kuasa yang ditandatangani Kuasa Hukum Pemohon dengan pokok ... ulangi, dengan Surat Permohonan, di mana apabila kami sandingkan, ternyata kami menemui sejumlah nama kuasa yang itu bertanda tangan dan mengajukan permohonan, tapi tidak tercantum dalam Kuasa.

865. KETUA: SALDI ISRA [01:40:02]

Oke. Nanti kita cek.

866. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [01:40:03]

Sehingga akan menyimpulkan Permohonan Pemohon itu cacat formil, Yang Mulia.

867. KETUA: SALDI ISRA [01:40:08]

Oke, lanjut.

868. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [01:40:11]

Selanjutnya adalah tentang Eksepsi obscur libel, karena pemo ... pemp ... Permohonan Pemohon kami anggap tidak jelas, Yang Mulia.

869. KETUA: SALDI ISRA [01:40:17]

Ya.

870. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [01:40:18]

Tidak jelasnya.

Yang pertama adalah Pemohon tidak menyandingkan perolehan suara, yang benar menurut Pemohon, dengan suara yang ditetapkan oleh Termohon, Yang Mulia.

871. KETUA: SALDI ISRA [01:40:26]

Oke.

872. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [01:40:27]

Baik dalam Posita maupun Petitumnya.

Yang kedua, seperti yang kami sampaikan di awal, dalam Perbaikan Permohonan terdapat penambahan dalil-dalil dan Petitum baru, khususnya Petitum alternatif mengenai permintaan dilakukan pemungutan suara ulang, Yang Mulia.

Yang ketiga, Posita dan Petitum saling bertentangan, Yang Mulia, karena semula Pemohon mendalilkan terjadi kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif di 12 kecamatan, atau yang artinya di seluruh kecamatan yang ada di Kota Batam, Yang Mulia.

873. KETUA: SALDI ISRA [01:40:57]

Ya.

874. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [01:40:58]

Lanjut, apabila diperhatikan di petitumnya, yang paling terakhir, di situ hanya minta untuk dilakukan PSU di 8 kecamatan atau dengan kata lain tidak di seluruh kecamatan yang ada di Kota Batam. Tidak jelasnya di situ, Yang Mulia.

875. KETUA: SALDI ISRA [01:41:10]

Oke.

876. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [01:41:10]

Yang kedua, peristiwa kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif, tidak menyebutkan secara jelas terjadi di TPS mana, Yang Mulia. Jadi di Kota Batam itu ada 1.821 TPS, Yang Mulia. Nah, dari 8 kecamatan yang diminta PSU, tersisa 4 kecamatan yang tidak diminta atau sebanyak 385. Gitu, Yang Mulia.

877. KETUA: SALDI ISRA [01:41:34]

Oke.

878. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [01:41:36]

Itu menurut kami, tidak sejalan, seperti yang dijelaskan dalam penjelasan Pasal 135A, bahwa yang dimaksud dengan masif itu adalah dampak yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan, bukan hanya sebagian-sebagian saja. Itu menurut kami, Yang Mulia.

879. KETUA: SALDI ISRA [01:41:51]

Lanjut.

880. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [01:41:51]

Lanjut ke Pokok Permohonan, Yang Mulia.

881. KETUA: SALDI ISRA [01:41:52]

Ya.

882. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [01:41:53]

Sebelumnya, kami memberikan gambaran umum. Di Kota Batam jumlah Pasangan Calon Wali Kota dan Wali Kota, ada 2 pasang. Kemudian sebaran wilayah Kota Batam terdiri dari 12 kecamatan, 64 kelurahan, 1.821 TPS, dan DPT sebanyak 899.666 suara, Yang Mulia.

Kemudian masuk ke substansi, Yang Mulia. Di sini mohon izin, untuk mempersingkat agar kami tidak mengulang-ulang. Ini ada 3 dalil Pemohon yang akan kami tanggapi jadi satu, karena pada pokoknya sama, Yang Mulia.

Yang pertama, dalil mengenai kecurangan atas kejadian pemanfaatan jabatan selaku ASN yang dilakukan oleh Rashman ... aspan ... Rasman Apandi, selaku Lurah Sungai Pelunggut.

Yang kedua, pemanfaatan jabatan selaku ASN yang dilakukan oleh para Bapak Camat, Yang Mulia. Ini kami tidak bacakan satu per satu, itu sesuai dengan Dalil Permohonan halaman 18.

Yang ketiga, per ... pemanfaatan program pemerintah berupa bantuan sembako yang dilakukan oleh ... melibatkan ya, Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau, TNI Polri, Wakil Ketua DPRD Batam, dan juga LSM dan Ormas. Sebagaimana Permohonan halaman 19-20.

Jawaban kami termohon, Yang Mulia, Termohon bukanlah pihak yang memiliki kewenangan dalam menindaklanjuti dugaan pelanggaran tersebut, sesuai dalam Posita Permohonan Pemohon. Dan Pemohon sendiri sebenarnya sudah menjelaskan, Yang Mulia, bahwa hal-hal tersebut sudah dilaporkan ke Bawaslu Kota Batam. Sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara dan sampai dengan penetapan hasil pemilihan, kami, Termohon tidak menerima atau tidak ada rekomendasi maupun putusan dari Bawaslu, mengenai sanksi administrasi perihal peristiwa yang dipersoalkan tersebut.

Itu intinya, Yang Mulia.

883. KETUA: SALDI ISRA [01:43:41]

Ya, lanjut.

884. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [01:43:42]

Selanjutnya, ada lagi dalil mengenai penyerahan D.Hasil di Kecamatan Sekupang, yang diserahkan oleh Kapolsek Sekupang dan Sekretaris Kecamatan Sekupang. Sebagaimana dalil Permohonan, halaman 19, 24, dan 25.

Jawaban kami Termohon. Berdasarkan catatan yang tertuang di D ... Model D.Kejadian Khusus dan/atau keberatan di tingkat kecamatan itu, tidak ada yang mempermasalahkan, Yang Mulia, dari saksi Pemohon, sebagaimana Bukti T-8.

Namun, pada Rapat Pleno rekapitulasi di tingkat kota, terdapat keberatan dari saksi Paslon 1 atau Pemohon yang kemudian telah dituangkan dalam formulir tersebut, sebagaimana Bukti T-9.

885. KETUA: SALDI ISRA [01:44:22]

Oke, sebentar, itu benar ya, dibawa oleh apa itu ... oleh Kapolsek itu?

886. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [01:44:28]

Ya (...)

887. KETUA: SALDI ISRA [01:44:28]

Benar, ya (...)

888. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [01:44:28]

Di situ ada penjelasannya, Yang Mulia, dari PPK (...)

889. KETUA: SALDI ISRA [01:44:30]

Bukan. Pertanyaan saya dijawab, benar atau tidak (...)

890. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [01:44:31]

Benar, benar, Yang Mulia, diserahkannya.

891. KETUA: SALDI ISRA [01:44:36]

Oke (...)

892. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [01:44:37]

Ya.

893. KETUA: SALDI ISRA [01:44:37]

Yang kedua, ada enggak, perbedaan suara di TPS dengan (...)

894. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [01:44:42]

Kami, ya (...)

895. KETUA: SALDI ISRA [01:44:42]

Ada perbedaan suara? (...)

896. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [01:44:43]

Sesuai yang ada di jawaban kami, tidak ada, Yang Mulia.

897. KETUA: SALDI ISRA [01:44:43]

Tidak ada perbedaan, ya?

898. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [01:44:43]

Tetap ... tidak ada perbedaan.

899. KETUA: SALDI ISRA [01:44:45]

Mengapa sampai dibawa oleh polisi itu?

900. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [01:44:47]

Nah, itu yang akan kami jelaskan (...)

901. KETUA: SALDI ISRA [01:44:49]

Ya.

902. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [01:44:51]

Jadi, di Model D itu jуда ... sudah diberikan penjelasan oleh PPK (...)

903. KETUA: SALDI ISRA [01:44:52]

Ya.

904. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [01:44:54]

Bahwa itu PPK secara spontan saja menyerahkan kepada tamu undangan, mempersilakan maksud saya kepada tamu undangan untuk menyerahkan ke saksi.

905. KETUA: SALDI ISRA [01:45:01]

Oke.

906. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [01:45:02]

Itu yang terjadi. Dan yang lebih penting lagi, prinsipnya tidak ada perubahan perolehan suara.

907. KETUA: SALDI ISRA [01:45:08]

Ya, itu satu.

908. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [01:45:08]

Dan untuk PPK-nya, dari KPU Kota Batam, telah melakukan mekanisme internal berupa teguran, Yang Mulia, kepada PPK yang bersangkutan.

909. KETUA: SALDI ISRA [01:45:14]

Dulu ketika di-briefing menjelang pemilihan, diberi tahu enggak, Anda enggak boleh kasih ke siapa-siapa, begitu? KPU? Bawahan Anda itu?

910. TERMOHON: BOSAR HASIBUAN [01:45:23]

Baik, Yang Mulia.

Sebenarnya setelah selesai rekapitulasi di tingkat kecamatan, dalam menyerahkan D.Hasil itu, PPK-nya secara spontan memberikan kepada Kapolsek (...)

911. KETUA: SALDI ISRA [01:45:32]

Ya.

912. TERMOHON: BOSAR HASIBUAN [01:45:33]

Jadi, sebenarnya spontanitas saja (...)

913. KETUA: SALDI ISRA [01:45:36]

Kapolseknya enggak nolak juga?

914. TERMOHON: BOSAR HASIBUAN [01:45:39]

Tidak menolak, Yang Mulia.

915. KETUA: SALDI ISRA [01:45:41]

Mau jadi KPU juga Kapolsek ini, kayaknya, nih.

916. TERMOHON: BOSAR HASIBUAN [01:45:41]

Siap, Yang Mulia. Kita sudah melakukan pengawasan internal, Yang Mulia, dan sudah me ... memberikan peringatan kepada PPK-nya.

917. KETUA: SALDI ISRA [01:45:53]

Ya, mestinya itu kan tahu, ya.

918. TERMOHON: BOSAR HASIBUAN [01:45:53]

Betul, Yang Mulia.

919. KETUA: SALDI ISRA [01:45:56]

Kepada siapa itu barang harus diserahkan.

920. TERMOHON: BOSAR HASIBUAN [01:45:57]

Betul, Yang Mulia.

921. KETUA: SALDI ISRA [01:45:58]

Oke, lanjut, apa lagi yang mau disampaikan?

922. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [01:46:01]

Selanjutnya, Yang Mulia.

923. KETUA: SALDI ISRA [01:46:01]

Ya.

924. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [01:46:04]

Yang di ... ne ... apa ... slide next selanjutnya, itu dalil Pemohon mengenai masifnya money politics. Di situ juga ada beberapa kejadian, Yang Mulia, ada empat, kami nanti tanggapi jadi satu, karena pada pokoknya sama.

Yang pertama, pemberian sejumlah uang oleh dua orang bernama Emi Nasution, yang uangnya ... dan Kiki, ya, yang uangnya sejumlah Rp5.650.000,00, sesuai Permohonan halaman 21.

Yang kedua, tangkap tangan money politics atas nama M. Jamil, sesuai Permohonan halaman 22.

Kemudian yang ketiga, tangkap tangan, money politics atas nama Wan Suryani atau Mama Anggi dan Apriani, sesuai Permohonan halaman 22. Tertangkap tangan warga dengan barang bukti, uang sejumlah Rp500.000,00.

Nah, jawaban kami Termohon, Yang Mulia, Termohon bukanlah pihak yang memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti, dari dugaan pelanggaran dimaksud. Dan dalam positanya, sebenarnya Pemohon sendiri sudah menjelaskan kalau hal tersebut sudah dilaporkan ke Bawaslu Kota Batam.

925. KETUA: SALDI ISRA [01:47:00]

Oke.

926. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [01:47:02]

Yang menjadi penting, sampai dengan proses pemungutan suara dan juga penghitungan suara, kami Termohon belum menerima rekomendasi dan/atau putusan dari Bawaslu, Yang Mulia.

927. KETUA: SALDI ISRA [01:47:11]

Lanjut!

928. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [01:47:13]

Dalil selanjutnya, terkait dengan pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk kampanye terselubung, berupa kegiatan konser Batak Marsada di alun-alun Dataran Engku Putri, sesuai Permohonan halaman 23, Yang Mulia.

Jawaban kami Termohon, panitia konser memang pernah bersurat kepada KPU Kota Batam, sesuai dengan Bukti T-11, perihal Permohonan Dukungan Acara. Selanjutnya, Termohon sudah merespons surat tersebut, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Termohon tidak memiliki kewenangan dan kewajiban untuk memberikan izin dan dukungan terhadap acara tersebut, Yang Mulia, sebagaimana Bukti T (...)

929. KETUA: SALDI ISRA [01:47:50]

Ada orang kampanye enggak, di situ? Selama konser itu?

930. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [01:47:55]

Kami tidak mengetahui, Yang Mulia, kalau dari Termohon.

931. KETUA: SALDI ISRA [01:47:55]

Enggak ... enggak dipantau juga?

932. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [01:47:57]

Tidak mengetahui, Yang Mulia. Karena (...)

933. KETUA: SALDI ISRA [01:48:00]

Pertanyaan saya, itu dipantau, tidak?

934. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [01:48:01]

Tidak, Yang Mulia.

935. KETUA: SALDI ISRA [01:48:00]

Ini kan dalam masa kampanye, ... kerja Bawaslu, ya.

936. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [01:48:03]

Ya, betul, Yang Mulia.

937. KETUA: SALDI ISRA [01:48:05]

Nanti kita tanya. Lanjut.

938. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [01:48:06]

Pada intinya itu. Selanjutnya (...)

939. KETUA: SALDI ISRA [01:48:07]

Pokoknya kalau yang berat-berat itu, lempar Bawaslulah, gitu ya?

940. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [01:48:12]

Kami lanjutkan, Yang Mulia, mohon izin.

Dalil selanjutnya, ketidaknetralan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam sehubungan kejadian pembatalan sepihak debat publik yang kedua, sesuai Permohonan halaman 24.

Jawaban kami Termohon, Yang Mulia. Pada awalnya memang debat disepakati bersama, dilangsungkan 2x, tanggal 1 November dan tanggal 15 November. Tanggal 1 November, debat pertama sudah terlaksana, Yang Mulia. Kemudian menjelang (...)

941. KETUA: SALDI ISRA [01:48:34]

Yang kedua, yang kedua terlaksana tidak?

942. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [01:48:37]

Nah, ini. Sebenarnya terlaksana, Yang Mulia, sudah sempat dibuka, tapi tidak dapat dilanjutkan, Yang Mulia.

943. KETUA: SALDI ISRA [01:48:41]

Karena?

944. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [01:48:41]

Karena salah satu pasangan calon tidak berkenan untuk masuk di arena debat, karena (...)

945. KETUA: SALDI ISRA [01:48:45]

Ini kayak Donald Trump saja ini kejadiannya, ya kan? Donald Trump tuh debat kedua kan ndak mau juga.

946. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [01:48:51]

Ya.

947. KETUA: SALDI ISRA [01:48:51]

Jangan-jangan terinspirasi dari Donald Trump ini?

948. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [01:48:54]

Mungkin, Yang Mulia.

Jadi, pada pokoknya kami menjelaskan, bukan kami yang membatalkan secara sepihak, tapi karena alasan-alasan tertentu, sebagaimana tertuang dalam jawaban kami, sehingga kegiatan tersebut tidak dapat dilanjutkan, Yang Mulia.

949. KETUA: SALDI ISRA [01:49:06]

Yang penting ini bukan KPU yang membatalkan, ya?

950. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [01:49:09]

Betul, Yang Mulia.

951. KETUA: SALDI ISRA [01:49:10]

Tapi karena satu (...)

952. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [01:49:12]

Satu tidak hadir.

953. KETUA: SALDI ISRA [01:49:13]

Satu tidak hadir, ya?

954. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [01:49:14]

Betul.

955. KETUA: SALDI ISRA [01:49:14]

Ditanya enggak? Ke mana dia?

956. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [01:49:14]

Sebenarnya ada di luar, Yang Mulia, sesuai kronologi sudah kami sampaikan (...)

957. KETUA: SALDI ISRA [01:49:18]

Ya.

958. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [01:49:18]

Jadi pasangan satunya itu ada di sekitar lokasi kegiatan, namun menunggu di luar.

959. KETUA: SALDI ISRA [01:49:24]

Oke.

960. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [01:49:24]

Oleh karena tidak ada kesamaan pendapat atau titik temu mengenai tata tertib.

961. KETUA: SALDI ISRA [01:49:28]

Ya.

962. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [01:49:28]

Sehingga yang bersangkutan tidak berkenan masuk. Karena tidak berkenan masuk, hanya ada 1 paslon, kami tidak dapat melanjutkan, Yang Mulia.

963. KETUA: SALDI ISRA [01:49:35]

Ketidaksamaan pendapat?

964. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [01:48:36]

Siap. Betul, Yang Mulia.

965. KETUA: SALDI ISRA [01:49:37]

Atau ketidaksamaan pendapatan?

966. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [01:49:38]

Tidak sama pendapat, Yang Mulia.

967. KETUA: SALDI ISRA [01:48:41]

Oke.

968. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [01:49:41]

Mengenai tata tertib, Yang Mulia.

969. KETUA: SALDI ISRA [01:49:43]

Lanjut. Cukup, ya? Langsung ke Petitum? Ada lagi yang lain?

970. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [01:49:46]

Ada lagi, Yang Mulia, terkait keberatan saksi (...)

971. KETUA: SALDI ISRA [01:49:49]

Ya.

972. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [01:49:49]

Yang dituangkan di D.Kejadian Khusus. Tanggapan kami, pada intinya keberatan tersebut bukan mengenai perolehan hasil, Yang Mulia,

tapi mengenai pelanggaran-pelanggaran yang diduga TSM itu tadi, Yang Mulia.

973. KETUA: SALDI ISRA [01:50:00]

Oke.

974. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [01:50:01]

Kemudian ini yang kami anggap penting, mohon izin. Karena di pemeriksaan pertama kemarin menjadi atensi Yang Mulia Saldi Isra.

975. KETUA: SALDI ISRA [01:50:09]

Ya.

976. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [01:50:09]

Terkait kurangnya partisipasi masyarakat, sehingga kami harus merespons ini, Yang Mulia.

977. KETUA: SALDI ISRA [01:50:12]

Ya, silakan.

978. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [01:50:13]

Jadi, kami menjelaskan upaya yang sudah dilakukan KPU Kota Batam itu banyak, Yang Mulia, mulai sosialisasi di media sosial, sosialisasi melalui baliho, spanduk, publikas di media elektronik, termasuk memfasilitasi masing-masing paslon bahan kampanye, APK, kami sertakan semua buktinya mulai Bukti T-19 sampai dengan T-20, Yang Mulia.

Kemudian kami, KPU Kota Batam juga telah melakukan kegiatan launching, ada juga banyak kegiatan ... apa ... tahapan ya, mulai dari pemuktahiran data pemilih, cokolit, sampai dengan penetapan DPT, Yang Mulia, semua ada dokumentasinya, tersosialisasi dengan baik.

Kemudian, Termohon juga sudah melaksanakan sosialisasi kepada 11 basis pemilih, laporan kegiatannya semua kami lampirkan, mulai Bukti T-32 sampai dengan T-39, Yang Mulia. Termohon juga melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait dengan pemilihan kepala daerah serentak, sebagaimana Bukti T-40.

Dan yang penting, Yang Mulia, pada saat hari H, Termohon juga melaksanakan pengumuman di rumah-rumah ibadah dan juga mobile, Yang Mulia, keliling, mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya. Itu sebagaimana Bukti T-41 sampai dengan T-43, Yang Mulia.

979. KETUA: SALDI ISRA [01:51:29]

Oke.

980. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [01:51:30]

Lebih dari itu, Yang Mulia, meskipun kami sudah berusaha maksimal sesuai dengan jawaban kami, ada beberapa faktor yang dimungkinkan berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat.

Yang pertama adalah cuaca Kota Batam, hujan seharian itu, Yang Mulia.

981. KETUA: SALDI ISRA [01:51:44]

Ya.

982. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [01:51:44]

Di situ kami sampaikan juga ada laporan cuaca dari BMKG Kelas I Hang Nadim Batam, Yang Mulia, sebagaimana Bukti T-44, hujan mulai jam 07.00 pagi sampai jam 13.00 siang, Yang Mulia.

983. KETUA: SALDI ISRA [01:51:55]

Jadi, pas jadwal pemilihan, turun hujan, ya?

984. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [01:51:56]

Betul, Yang Mulia, sehingga karena faktor alam itu, di luar kendali kami, Yang Mulia.

985. KETUA: SALDI ISRA [01:51:59]

Ini jangan-jangan pemilihnya pakai motor semua, jadi takut basah kan ke tempat pemilihan, enggak jadi datang. Apa lagi?

986. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [01:52:05]

Yang kedua, yang terakhir, Yang Mulia, mobilitas masyarakat Kota Batam itu sangat tinggi, Yang Mulia. Kami menemukan release dari Badan Pusat Statistik pada halaman 10 laporannya, sebagaimana Bukti T-45, diketahui bahwa penduduk berdasarkan kesesuaian alamat domisili dan KTP, KK terdapat 17,62% yang berdomisili tidak sesuai dengan KTP, KK artinya, saat administrasi beralamat di sana, tap ... namun tidak tinggal di sana, itu, Yang Mulia.

987. KETUA: SALDI ISRA [01:52:32]

Oke.

988. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [01:52:33]

Yang terakhir, kami masuk ke Petitum, Yang Mulia.

989. KETUA: SALDI ISRA [01:52:36]

Ya.

990. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [01:52:36]

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Permohonan.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor 744 dan seterusnya.
3. Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan Wali Kota dan Wali Kota[sic!] Kota Batam yang benar sebagaimana tercantum itu, Yang Mulia, mohon dianggap dibacakan.

991. KETUA: SALDI ISRA [01:53:09]

Ya.

992. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [01:53:10]

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon.

Selain dan selebihnya, kami mohon dianggap dibacakan sesuai dengan jawaban kami, Yang Mulia. Terima kasih.

993. KETUA: SALDI ISRA [01:53:23]

Terima kasih.

Pihak Terkait.

994. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 169/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [01:53:27]

Terima kasih, Yang Mulia. Selamat pagi menjelang siang, Yang Mulia.

995. KETUA: SALDI ISRA [01:53:31]

Nah, memperbaiki yang tadi kayaknya.

996. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 169/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [01:53:34]

Renvoi.

Yang Mulia, Kami menyampaikan Pokok-Pokok Keterangan Pihak Terkait Pilkada Kota Batam, mewakili Prinsipal Paslon Nomor 2, Amsakar Ahmad dan Li Claudia Chandra. Alurnya, sebagaimana dilihat di slide selanjutnya, ada eksepsi dua, ada dalam pokok perkara, kami memberikan keterangan umum maupun tanggapan atas dalil-dalil Pemohon dan ditutup dengan Petitum.

Izin, kami mulai dengan Eksepsi, Yang Mulia.

Sebagaimana sudah disampaikan juga, memang tidak memenuhi ambang batas dari jumlah penduduk lebih dari 1 ... hampir 1,2, selisihnya mestinya setengah persen, tetapi ini selisihnya 32,01% suara sahnya 421.000, selisihnya 134.887. Karena itu, Pemohon tidak punya Legal Standing.

Alasan yang diajukan tentu bisa diduga adalah TSM menggunakan beberapa Putusan MK di halaman 12, putusan yang terkait Nomor 84, ini jumlah DPT melebihi jumlah penduduk, Putusan 132 dan 145 tentang Syarat Calon, Putusan 39 dan seterusnya sampai Putusan 21 itu yang terkait dengan konstusionalitas. Tetapi, kami cermati kondisi-kondisi

tersebut sebenarnya tidak terjadi dan tidak dapat digunakan untuk kondisi di Pemillukada Kota Batam.

Yang Mulia, kami juga ingin menegaskan bahwa TSM itu ada di halaman 11 Perbaikan Permohonan yang tadi disoal oleh Termohon. Kami membaca putusan satu-satunya diskualifikasi di Kota Waringin Barat, Putusan 45, yang pada dasarnya memberikan syarat yang sangat ketat, yaitu TSM didahului dengan adanya persiapan dan perencanaan, pelanggaran sejak awal, tersusun dari tingkat paling atas sampai dengan tingkat RT, terjadi di seluruh kecamatan se-kabupaten/kota dan berdampak hasil secara menyeluruh. Karenanya, kami menolak argumentasi TSM itu. Argumentasi TSM juga ... ulangi, kami juga menyoal tentang permohonan yang bertentangan, tadi sedikit disampaikan di slide 9, Yang Mulia.

Di kutipan Posita halaman 16, Perbaikan Permohonan dikatakan pelanggaran atau kecurangan-kecurangan TSM itu, di seluruh wilayah Kota Batam. Tapi kemudian, di halaman 17-nya, itu dikatakan terjadi di hampir setiap wilayah Kota Batam. Jadi, Permohonan sendiri tidak cermat dan justru saling bertentangan.

Slide selanjutnya, slide 10, Yang Mulia, Permohonan tidak jelas karena diakui sendiri, dilakukan secara random. Bagaimana Anda membuktikan terstruktur, sistematis, massif, tapi secara random. Di halaman 17 itu dikatakan, yang kami garis bawah dengan warna merah. Dalam Permohonan ini Pemohon akan menyampaikan kecurangan-kecurangan pelanggaran-pelanggaran tersebut secara random. Kemudian di list 12 kecamatan. Apalagi, Yang Mulia, hasil Inzage kami di tanggal 17 Januari, tidak ada bukti-bukti yang menunjukkan terdapat pelanggaran TSM, serta pengaruhnya terhadap hasil pemilihan. Dan terutama untuk memenuhi syarat masif minimal 50% kecamatan, dari 12 kecamatan, itu nanti akan kami jelaskan secara rinci, Yang Mulia, tidak terbukti.

Keterangan umum kami, di halaman ... slide 12, Bawaslu pada dasarnya telah memberikan penilaian terhadap dugaan-dugaan ini. Jadi secara dalil Pemohonan yang ... ada 9 laporan, Yang Mulia, nanti kami jelaskan.

Pemohon yang ... dalil Pemohon yang termuat dalam laporan-laporan Bawaslu dan yang kemudian direpetisi dalam Permohonan a quo, sesungguhnya telah diperiksa dan diputus oleh Bawaslu Kota Batam. Ada 8, di slide selanjutnya 13, yang kemudian tidak di ... tidak dite ... tidak dite ... ulangi ... dihentikan laporannya, hanya 1 yang kemudian diteruskan, yaitu yang terkait dengan dugaan ketidaknetralan. Kami garis bawah, itupun masih merupakan dugaan pelanggaran-pelanggaran peraturan perundang-undangan.

Jadi 9 laporan sudah diperiksa oleh Bawaslu. Kami ingin tegaskan, Yang Mulia, bahwa unsur-unsur TSM, sebagaimana diatur dalam Putusan MK 45 tadi maupun Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 15 ayat sat ... ayat (3)

Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020, apa itu terstruktur? Apa itu sistematis? Apa itu masif? Sebenarnya tidak diuraikan dan dipenuhi oleh dalil-dalil atau posita dari Pemohon.

Yang Mulia, kami ingin menanggapi pihak ... apa ... dalil-dalil dari Pemohon satu per satu. Tuduhan pemanfaatan Jabatan ASN, ini sudah dilaporkan memang ditindaklanjuti, tetapi lagi-lagi tadi hanya masih merupakan dugaan.

Yang mulia, ini walaupun benar ... walaupun benar hanya terjadi di sungai lurah ... apa ... dilakukan oleh Lurah-Lurah Sungai Pelungut, itu pun satu kelurahan tidak jelas bagaimana detail kejadiannya.

Tuduhan pemanfaatan Jabatan ASN, Yang Mulia, ini sudah dilaporkan di Kecamatan Batu Ampar, dihentikan oleh Bawaslu. Kejadiannya itu adalah foto yang dipotret pada tanggal 14 Agustus 2024, artinya sebelum penetapan calon, kita sama-sama paham. Kemudian juga, ini pun kalau mau dikatakan sebagai pelanggaran TSM, hanya di satu daerah.

Selanjutnya slide 19, tuduhan pemanfaatan jabatan ASN, dugaan tadi yang Polsek, Yang Mulia, sudah dijelaskan dan kami tidak ingin mengulang, dianggap dibacakan saja, karena relatif sama jawaban kami.

Yang selanjutnya, Yang Mulia.

Slide 20, tuduhan adanya bantuan sembako yang dilakukan oleh Iman Sutiawan, ini sudah ada Berita Acaranya di Bukti PT-24, Yang Mulia, tidak terkait dengan Pihak Terkait dan kemudian juga sudah dilaporkan dan dihentikan oleh Bawaslu.

Selanjutnya Slide 21, Yang Mulia, terkait dengan tuduhan masifnya politik uang, jadi kata-kata *masif* ini ada dalam Permohonan itu sendiri, yang tentunya membawa konsekuensi yang harus dibuktikan, halaman 21 dan 22. Tetapi pada saat bicara masif, kemudian dalilnya hanya bicara 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Batam dan Kecamatan Batu Aji serta satu kelurahan, yaitu kelurahan Sungai Pelungut[sic!], 4 laporan yang diajukan semua dihentikan, tapi titik tekan kami adalah bicara masif harusnya 6 kecamatan dari 12, tapi dalil mereka sendiri hanya 2 kecamatan.

Yang Mulia, di slide 22, tuduhan pemanfaatan fasilitas terkait dengan Pesta Budaya Bangso, kami dapat pastikan tidak ada kampanye di sana. Tidak ada peraga dan juga kemudian ini adalah betul-betul ajang pelestarian budaya, laporannya sendiri dihentikan oleh Bawaslu.

Yang Mulia, slide selanjutnya, slide 23, ketidaknetralan pihak penyelenggara. Tadi soal debat sudah dijelaskan, justru kami sudah siap, kami yang ada di ruangan untuk siap debat, Yang Mulia. Kaitannya dengan ada pernyataan ketidaknetralan penyelenggara, laporan-laporan ke Bawaslu dihentikan, kami sendiri mengajukan laporan 3, Yang Mulia. Dan laporan kami semuanya juga dihentikan. Jadi, kalau kemudian dianggap berpihak misalnya kepada kami, laporan kami sendiri tidak ditindaklanjuti.

997. KETUA: SALDI ISRA [02:01:43]

Itu justru yang tidak datang debat bukan Pihak Terkait, ya?

998. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 169/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [02:01:47]

Bukan, Yang Mulia. Yang pasangan satunya lagi, Yang Mulia.

999. KETUA: SALDI ISRA [02:01:53]

Silakan!

1000. TERMOHON: BOSAR HASIBUAN [02:01:54]

Dua-duanya datang, Yang Mulia.

1001. KETUA: SALDI ISRA [02:01:55]

Dua-duanya datang?

1002. TERMOHON: BOSAR HASIBUAN [02:01:55]

Datang, Yang Mulia.

1003. KETUA: SALDI ISRA [02:01:56]

Tapi tidak (...)

1004. TERMOHON: BOSAR HASIBUAN [02:01:58]

Namun, karena ada tata tertib yang belum disepakati, tidak ada titik temu, sehingga (...)

1005. KETUA: SALDI ISRA [02:02:04]

Oke.

1006. TERMOHON: BOSAR HASIBUAN [02:02:04]

Ini yang menimbulkan ... apa namanya ... perdebatanlah begitu sampai molor 2 jam (...)

1007. KETUA: SALDI ISRA [02:02:09]

Siapa yang keberatan dengan tata tertib itu?

1008. TERMOHON: BOSAR HASIBUAN [02:02:12]

Paslon 02, Yang Mulia.

1009. KETUA: SALDI ISRA [02:02:14]

Paslon 02 yang keberatan?

1010. TERMOHON: BOSAR HASIBUAN [02:02:16]

Ya, Yang Mulia.

1011. KETUA: SALDI ISRA [02:02:19]

Oke, Silakan!

1012. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 169/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [02:02:21]

Kami lanjutkan, Yang Mulia.

1013. KETUA: SALDI ISRA [02:02:21]

Ya.

1014. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 169/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [02:02:22]

Slide 24, mengenai keberatan saksi-saksi, Yang Mulia. Keberatan saksi-saksi diajukan, kami dapat tegaskan yang didalilkan untuk TSM itu tidak ada. Jadi, yang ada justru kalau di sebelah kanannya itu selisih suara terkait dengan ... apa ... administratif. Kalau TSM-nya justru tidak ada. Dan ada satu Form Model.D Kejadian Khusus yang general, itu yang di nomor 13 yang paling bawah sebelah kanan, Yang Mulia. Jadi, tidak dicantumkan kecamatan yang mana, tanggalnya tanggal tidak dicantumkan, keberatannya general karena adanya dugaan pelibatan ASN politik uang pembagian sembako secara masif di 12 kecamatan, titik, sedemikian saja.

Yang Mulia, slide 25, mengenai kurangnya partisipasi, tadi sudah dijelaskan juga oleh Termohon. Yang pasti walaupun ini dijadikan dasar untuk TSM, kami rasa bukan dalil yang tepat.

Yang Mulia, izinkan kami sedikit memberikan tabel di slide 26, Yang Mulia, untuk memudahkan, terutama untuk membantah unsur masif dari Permohonan. Di situ, misalnya kluster pelanggaran pembagian sembako, Yang Mulia. Kecamatan Belakang Padang yang paling atas, kelurahannya tidak dijelaskan, TPS-nya mana tidak dijelaskan, kejadiannya hanya satu, tapi di Petikum minta di seluruh kecamatan dilakukan PSU, ini tidak terbukti yang mestinya.

Sekupang, kelurahannya tidak dijelaskan, TPS-nya tidak dijelaskan. Satu kejadian, tapi yang diminta di seluruh kecamatan diulang.

Kalau kita lihat di slide selanjutnya, politik uang, Yang Mulia, kami supaya lebih cepat saja, tidak satu-satu. Politik uang itu kecamatannya disebut 3 saja ... ulangi ... di Kecamatan Batam Kota, kelurahan mana tidak dijelaskan, TPS mana tidak dijelaskan, hanya disebut satu kejadian, tapi diminta seluruh kecamatan. Ini pun dikatakan masif, tapi hanya dua kecamatan dan satu kelurahan.

Ada dalil tentang kampanye terselubung disebut di Batam Kota. Kelurahan mana, TPS mana, satu kejadian, PSU-nya minta di seluruh kecamatan.

Kesimpulan kami, Yang Mulia. Seluruh kecamatan yang dimintakan PSU oleh Pemohon dalam Petikurnya ada 8, tapi sebenarnya unsur masifnya betul-betul, sebagaimana yang disampaikan oleh Pemohon random. Dan karenanya di slide 28, kami ingin tegaskan unturnya tidak terpenuhi dan sebenarnya permintaan yang dikonstruksikan itu over claim.

Kami tutup dengan Petikum, Yang Mulia.

Dalam Eksepsi, slide 30.

Menyatakan Eksepsi Pihak Terkait diterima.

Dalam Pokok Permohonan.

1. Menyatakan Permohonan Pemohon ditolak seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan mengikat Keputusan kepu ... Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor 744 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, ex aequo et bono.

Terima kasih, Yang Mulia.

1015. KETUA: SALDI ISRA [02:05:47]

Terima kasih, Pihak Terkait.

Silakan sekarang Bawaslu, giliran Anda. Ini tadi ... ini bukan tanggung jawab kami menunjuk ... ini KPU menunjuk Bawaslu saja dari tadi banyak ini.

1016. BAWASLU: JAZULI [02:05:57]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Saya bersama Pak Ketua Antonius Itoloha Gaho akan membacakan ... izin membacakan resume Keterangan Bawaslu Perkara 169 dan seterusnya.

Terkait Pokok Permohonan.

Satu. Bahwa terkait ke ... Penetapan Hasil Penghitungan Surat Suara, Penghitungan Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Batam Nomor 115.a dan seterusnya. Bahwasanya diperoleh hasil penghitungan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nuryanto dan Hardi Selamat Hood.

1017. KETUA: SALDI ISRA [02:06:39]

Itu dianggap dibacakan, ya.

1018. BAWASLU: JAZULI [02:06:40]

Dianggap dibacakan.

1019. KETUA: SALDI ISRA [02:06:42]

Lanjut.

1020. BAWASLU: JAZULI [02:06:43]

Untuk selanjutnya, poin 2. Pokok Permohonan.

Bahwa terkait pemanfaatan jabatan selaku ASN untuk menguntungkan dan mengampanyekan Paslon 02, angka 1 halaman 18.

2.1. Bawaslu Kota Batam telah melakukan proses penanganan pelanggaran netralitas ASN berdasarkan Laporan 004, tertanggal 2 Oktober 2024 dan 006. Bahwasanya yang 004 ini telah ditindaklanjuti dan diteruskan, direkomendasi ke BKN.

Terkait dengan laporan (...)

1021. KETUA: SALDI ISRA [02:07:22]

Apa rekomendasinya itu? Memang ... memang ada ASN yang terlibat?

1022. BAWASLU: JAZULI [02:07:26]

Ada, Pak, dilanjutkan ke BKN, direkomendasi.

1023. KETUA: SALDI ISRA [02:07:29]

Berapa orang?

1024. BAWASLU: JAZULI [02:07:29]

Satu.

1025. KETUA: SALDI ISRA [02:07:30]

Satu orang, ya. Apa yang dikerjakan sama dia?

1026. BAWASLU: JAZULI [02:07:34]

Pak Lurahnya mengumpulkan ketua atau kader Posyandu.

1027. KETUA: SALDI ISRA [02:07:39]

Kader Posyandu, ya?

1028. BAWASLU: JAZULI [02:07:41]

Ya.

1029. KETUA: SALDI ISRA [02:07:42]

Lalu di situ mengampanyekan salah satu pasangan calon?

1030. BAWASLU: JAZULI [02:07:45]

Menyampaikan profil.

1031. KETUA: SALDI ISRA [02:07:47]

Pasangan calon nomor berapa yang disampaikan profilnya?

1032. BAWASLU: JAZULI [02:07:51]

Pada prinsipnya, disampaikan alasannya dua-duanya disampaikan, cuma yang dalam hasil klarifikasi itu yang banyak disampaikan Paslon 02.

1033. KETUA: SALDI ISRA [02:07:58]

02. Tapi dua-duanya dikemukakan, ya? Tapi 02 lebih diperbanyak, begitu?

1034. BAWASLU: JAZULI [02:08:02]

Siap!

1035. KETUA: SALDI ISRA [02:08:04]

Gitu. Lanjut!

1036. BAWASLU: JAZULI [02:08:05]

Baik (...)

1037. KETUA: SALDI ISRA [02:08:06]

Apa hasil dari BKN-nya? Sudah ada atau belum?

1038. BAWASLU: JAZULI [02:08:07]

Sampai saat ini belum ada, Yang Mulia.

1039. KETUA: SALDI ISRA [02:08:10]

Oke. Kalau dulu, ada namanya Komisi Aparatur Sipil Negara.

1040. BAWASLU: JAZULI [02:08:13]

Ya.

1041. KETUA: SALDI ISRA [02:08:14]

Tapi kan itu barang sekarang sudah ndak ada lagi, sudah melekat sekarang di Kantor Menpan RB. Ada dilaporkan ke situ juga enggak?

1042. BAWASLU: JAZULI [02:08:21]

Tidak.

1043. KETUA: SALDI ISRA [02:08:22]

Oke, lanjut!

1044. BAWASLU: JAZULI [02:08:25]

Terima kasih, Yang Mulia.

Bahwasanya Bawaslu Kota Batam telah menerima Laporan 004, tanggal 4 Oktober 2024, laporan tersebut sudah tidak ditindaklanjuti dan dihentikan karena tidak terbukti memenuhi unsur dugaan pelanggaran (vide Bukti BK-7605).

Tiga ... 2.3. Berdasarkan LHP Panwascam Sekupang Nomor 026 dan seterusnya. Bahwa pelaksanaan rekapitulasi di Kecamatan Sekupang telah selesai dilaksanakan dengan menyerahkan berkas kepada saksi Pasangan Calon Gubernur Nomor Urut 2 oleh Kepala Sekretariat PPK Kecamatan Sekupang dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 oleh Kapolsek Kecamatan Sekupang. Berdasarkan LHP tersebut, tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran. Sebagaimana sudah kami jelaskan dalam keterangan tertulis halaman 4 sampai 8, Yang Mulia.

1045. KETUA: SALDI ISRA [02:09:18]

Ya, lanjut!

1046. BAWASLU: JAZULI [02:09:19]

Poin 3. Bahwa terkait pemanfaatan program Pemerintah Pusat berupa Bantuan Sembako untuk Keuntungan Paslon 02, halaman 2, halaman 19, 3.1. Berdasarkan LHP Panwascam Belakang Padang Nomor 153 dan 169, Panwascam Sekupang Nomor 020 dan seterusnya, Panwascam Lubuk Baja Nomor 692 dan seterusnya, LHP Panwascam Sagulung Nomor 312 dan seterusnya, terkait pembagian sembako tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran.

3.5. Bawaslu Kota Batam telah melakukan proses penanganan pelanggaran tindak pidana pemilihan berdasarkan Laporan 012, tertanggal 26 November 2024, laporan tersebut dihentikan karena tidak terbukti memenuhi unsur dugaan pelanggaran tindak pidana.

Poin 4. Bahwa terkait masifnya pemberian uang kepada pemilih untuk memilih Paslon Nomor Urut 2, yang diduga dilakukan oleh Tim Kampanye Paslon Nomor Urut 2, angka 3, halaman 21. Bahwa Bawaslu Kota Batam telah melakukan proses penanganan pelanggaran berdasarkan Laporan Nomor 014 tanggal 26 November, Nomor 015 tanggal 27 November, Nomor 13 tanggal 26 November, Nomor 16 tanggal 2 Desember 2024. Dengan laporan itu sudah ditindaklanjuti dan di pembahasan bersama Sentra Gakkumdu, laporan tersebut dihentikan karena tidak terbukti memenuhi unsur dugaan pelanggaran tindak pidana politik uang.

1047. KETUA: SALDI ISRA [02:11:09]

Oke, lanjut!

1048. BAWASLU: JAZULI [02:11:10]

Poin 5. Bahwa terkait pemanfaatan fasilitas pemerintah dalam kampanye terselubung dan dibuat ... terselubung yang dibuat untuk keuntungan Paslon 02, angka 4, halaman 23, berdasarkan LHP Panwasdam Batam Kota Nomor 304 dan seterusnya, terkait pelaksanaan pesta rakyat Budaya Bangso Batak tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran.

5.2. Bawaslu Kota Batam telah melakukan proses penanganan pelanggaran berdasarkan Laporan 0 ... Nomor 009, tertanggal 19 November 2024. Bahwa laporan tersebut dihentikan karena tidak terbukti memenuhi unsur dugaan pelanggaran tindak pidana penggunaan fasilitas pemerintah.

Poin 6. Bahwa terkait ketidaknetralan KPU Kota Batam dan Bawaslu Kota Batam, angka 5 halaman 23. Berdasarkan LHP Bawaslu Kota Batam Nomor 129 dan seterusnya, terkait pelaksanaan debat ke-2 Pemilihan Kepala Daerah Kota Batam ... KPU Kota Batam, tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran.

Poin 6.2. Bawaslu Kota Batam menerima laporan dugaan pemilihan, sebanyak 16 laporan dugaan pelanggaran, sejak tanggal 20 nov ... September sampai tanggal 2 Desember 2024. 6 laporan dugaan pelanggaran terkait netralitas ASN dan 10 laporan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan. Terhadap 10 laporan dugaan tindak pidana pemilihan yang telah diregister tersebut, Bawaslu Kota Batam telah melakukan pembahasan bersama Sentra Gakkumdu Kota Batam, untuk menentukan keterpunan unsur pelanggaran tindak pidana pemilihan.

Poin 3.6 ... Poin 6.3. Bawaslu Kota Batam, telah melakukan proses penanganan pelanggaran. Berdasarkan Laporan Nomor 011, tertanggal 21 November 2024, laporan tersebut dihentikan karena tidak terbukti memiliki unsur dugaan pelanggaran tindak pidana.

Poin 7, bahwa terkait keterlibatan Anggota Polri dalam pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam, angka 6 halaman 24, bahwa berdasarkan LHP Panwasdam Sekupang Nomor 026 dan seterusnya, hasil pengawasan, bahwa pelaksanaan rekapitulasi dilaksanakan di Kecamatan Sekupang, telah selesai dilaksanakan. Dengan penyerahan berkas kepada saksi Pasangan Calon Gubernur Nomor Urut 2, oleh Kepala Sekretariat PPK Kecamatan Sekupang. Saksi Pasangan Calon Wali Kota Nomor Urut 1, oleh Kapolsek Kecamatan Sekupang. Berdasarkan LHP tersebut, tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran.

Nomor 8. Bahwa terkait keberat ... keberatan saksi-saksi dalam catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi saat rekapitulasi hasil

penghitungan suara, pada angka 7 halaman 25, berdasarkan LHP Panwascam se-Kota Batam, sebanyak 12 kecamatan, 2 kecamatan menandatangani Form Model D.Hasil Kecamatan, dan 10 kecamatan tidak menandatangani Form Model D.Hasil Kecamatan, sebagaimana sudah kami jelaskan dalam keterangan tertulis halaman 28 sampai 32.

9. Bahwa terkait kurangnya partisipasi pemilih dalam Pilkada Kota Batam, yang tidak mencapai 50%, angka 8 halaman 26.

9.1. Bahwa Bawaslu Kota Batam, telah melakukan pencegahan berupa pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat sebanyak tiga kali, yaitu tertanggal 8 Juli, 24 Agustus, dan 5 Oktober 2024.

9.2. Bawaslu ... bahwa Panwaslu Kecamatan se-Kota Batam, telah melakukan pencegahan berupa pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat di 12 Kecamatan se-Kota Batam, pelaksanaan kegiatan sosialisasi sebanyak dua kali, di setiap kecamatan (vide Bukti PK-7.6-36).

Berdasarkan LHP Bawaslu Kota Batam Nomor 115 dan seterusnya, tanggal 4 Desember, terkait penyerahan rekapitulasi pengembalian Formulir C.Pemberitahuan yang tidak terdistribusi dari setiap tingkat kecamatan.

9.4. Berdasarkan LHP Bawaslu Kota Batam Nomor 115.A dan seterusnya, terkait penyerahan rekapitulasi pengembalian formulir C.Pemberitahuan yang di ... yang terdistribusi dari setiap desa atau kelurahan. Tahun 2024 di tingkat Kota Batam, yaitu sebanyak=664.304 atau 73,84%. Bahwa terdapat pengembalian Surat Model C.Pemberitahuan KPU sebanyak=235.362 atau 26,16%, dengan rincian=1.986 pemilih telah meninggal dunia, 28.764 pemilih telah pindah domisili, 2.459 pemilih telah pindah memilih, 4 ... 128.308 pemilih tidak dikenal, 807 pemilih telah berubah status TNI Polri, dan 73.038 pemilih tidak berada di tempat, dan tidak terdapat kelu ... keluarga atau pihak yang dipercaya untuk diberikan, vide Bukti PK-7.6-3, sebagaimana sudah kami jelaskan dalam keterangan tertulis halaman 32-39.

Demikian, Yang Mulia, terima kasih.

1049. KETUA: SALDI ISRA [02:17:18]

Terima kasih. Ini soal partisipasi itu, tidak melulu soal diundang itu, soal ada ... apa namanya ... apa namanya ... kartu C berapa, C-6, ya.

Tapi kadang-kadang itu, tergantung calon juga, kalau calon ada yang menarik orang, orang akan datang dengan sendirinya. Nah, itu banyak faktor, salah satunya memang aktivitasnya penyelenggara KPU dan Bawaslu, salah satu, tapi faktor lain, pasti juga menentukan. Terima kasih, Bawaslu, cukup, ya?

1050. BAWASLU: JAZULI [02:17:33]

Cukup, Yang Mulia.

1051. KETUA: SALDI ISRA [02:17:34]

Oke, terima kasih.

Sekarang dari Batam, kita pindah ke Deli Serdang. Deli Serdang dengan Lubuk Pakam itu beda kabupaten, ya? Sama, ya? Ya, saya ingat film Naga Bonar saja, kan gitu.

Silakan, KPU! KPU Kabupaten Deli Serdang.

1052. KUASA HUKUM TERMOHON: FAJAR MAULANA YUSUF [02:18:25]

Assalamualaikum wr. wb.

1053. KETUA: SALDI ISRA [02:18:26]

Walaikumsalam wr. wb.

1054. KUASA HUKUM TERMOHON: FAJAR MAULANA YUSUF [02:18:27]

Izin untuk memperkenalkan diri, nama Fajar Maulana Yusuf dari HDH Law Office bersama Ibu Relis Yanthy Panjaitan, selaku Ketua KPU Kabupaten Deli Serdang, akan menyampaikan jawaban selaku Termohon dalam Perkara Nomor 152/PHPU.BUP-XXIII/2025.

1055. KETUA: SALDI ISRA [02:18:49]

Ya.

1056. KUASA HUKUM TERMOHON: FAJAR MAULANA YUSUF [02:18:50]

Izin untuk menyampaikan pokok-pokok jawaban.

1057. KETUA: SALDI ISRA [02:18:51]

Silakan!

1058. KUASA HUKUM TERMOHON: FAJAR MAULANA YUSUF [02:18:51]

Dalam Eksepsi, mengenai Kewenangan Mahkamah kotitu ...
Konstitusi, dianggap dibacakan.

1059. KETUA: SALDI ISRA [02:18:57]

Ya.

1060. KUASA HUKUM TERMOHON: FAJAR MAULANA YUSUF [02:19:00]

Mengenai Kedudukan Hukum atau Legal Standing. Bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Deli Serdang (...)

1061. KETUA: SALDI ISRA [02:19:04]

Eenggak usah, kesimpulannya saja, apa?

1062. KUASA HUKUM TERMOHON: FAJAR MAULANA YUSUF [02:19:07]

Gimana, maaf, Majelis?

1063. KETUA: SALDI ISRA [02:19:08]

Kesimpulannya apa?

1064. KUASA HUKUM TERMOHON: FAJAR MAULANA YUSUF [02:19:09]

Kesimpulannya dia ... bahwa per ... sehingga Permohonan ini diajukan tidak memenuhi ambang batas atau persentase.

1065. KETUA: SALDI ISRA [02:19:16]

Oke, lanjut!

1066. KUASA HUKUM TERMOHON: FAJAR MAULANA YUSUF [02:19:18]

Lanjut! Tenggang waktu, meskipun masuk, ka ... kami ingin menyampaikan, Majelis.

Bahwa Permohonan Pemohon bukan merupakan perselisihan hasil pemilihan, melainkan merupakan kategori sengketa Pemilihan dan sengketa Tata Usaha Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024 yang semestinya tenggang waktu penyelesaiannya dilakukan sebelum tahapan penetapan perolehan hasil pemilihan. Maka seharusnya Permohonan Pemohon tidak dapat diterima dalam Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan.

Kemudian, mengenai Permohonan Pemohon tidak jelas.

1067. KETUA: SALDI ISRA [02:19:53]

Lanjut!

1068. KUASA HUKUM TERMOHON: FAJAR MAULANA YUSUF [02:19:54]

Bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Termohon, antar Petitum tidak jelas dan saling bertentangan. Karena setiap poin Petitumnya memuat substansi yang saling bertentangan. Andaikan Mahkamah mengabulkan Permohonan Pembatalan Penetapan Hasil Perolehan Suara, di satu sisi, kemudian mengabulkan pemungutan suara ulang atau menyatakan diskualifikasi salah satu pasangan calon di sisi yang lain, maka akan terjadi pertentangan antara pembatalan penetapan hasil perolehan suara dengan dilaksanakannya pemungutan suara ulang.

Dengan demikian (ucapan tidak terdengar jelas) Petitum yang dimohonkan oleh Pemohon tidak saling berkesesuaian.

Kemudian mengenai Pokok-Pokok Permohonan.

Mengenai pelanggaran ASN Calon Nomor Urut 2 dengan melibatkan camat dan kepala desa, serta ASN di Kabupaten Deli Serdang untuk memenangkan pilkada Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024.

1069. KETUA: SALDI ISRA [02:20:42]

Ini Pihak Terkaitnya incumbent, ya?

1070. KUASA HUKUM TERMOHON: FAJAR MAULANA YUSUF [02:20:46]

Bukan.

1071. KETUA: SALDI ISRA [02:20:47]

Bukan. Ada hubungan dengan incumbent?

1072. KUASA HUKUM TERMOHON: FAJAR MAULANA YUSUF [02:20:51]

Tidak, ya. Tidak, Majelis.

1073. KETUA: SALDI ISRA [02:20:51]

Oke, lanjut.

1074. KUASA HUKUM TERMOHON: FAJAR MAULANA YUSUF [02:20:52]

Bahwa faktanya sejak dimulainya tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang sampai

dengan ditetapkannya Keputusan Termohon yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo, tidak pernah ada rekomendasi atau saran dan putusan dari Bawaslu yang menyatakan dalil Pemohon terbukti.

Kemudian mengenai adanya para ... pelanggaran TSM yang terjadi pada tanggal 1 Oktober oleh Ketua PPS Desa Telaga Sari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang yang bernama Buono Syahputa tersebut merupakan Anggota Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 2.

Bahwa pada tanggal 07/2024, Termohon melakukan klarifikasi kepada Ketua dan Anggota PPK Tanjung Morawa, serta Ketua dan Anggota PPS Desa Telaga Sari.

Kemudian, pada tanggal 23 Oktober, Termohon menerima surat dari Ketua PPK Tanjung Morawa tertanggal 21 Oktober, perihal surat pengantar pengunduran diri Anggota PPS Kecamatan Tanjung Morawa beserta lampiran berupa surat pengunduran diri asli atas nama Buono Syahputra selaku Ketua PPS Desa Telaga Sari, Kecamatan Tanjung Morawa.

1075. KETUA: SALDI ISRA [02:22:04]

Alasannya mengundurkan diri apa?

1076. KUASA HUKUM TERMOHON: FAJAR MAULANA YUSUF [02:22:07]

Itu atas keinginan yang bersangkutan, Majelis.

1077. KETUA: SALDI ISRA [02:20:00]

Atas keinginan?

1078. KUASA HUKUM TERMOHON: FAJAR MAULANA YUSUF [02:22:11]

Atas keinginan bersangkutan.

1079. KETUA: SALDI ISRA [02:22:13]

Tanggal 21 Oktober, ya?

1080. KUASA HUKUM TERMOHON: FAJAR MAULANA YUSUF [02:22:15]

Tanggal 21 Oktober.

1081. KETUA: SALDI ISRA [02:22:16]

Itu suratnya. Diganti semua?

1082. KUASA HUKUM TERMOHON: FAJAR MAULANA YUSUF [02:22:19]

Ya, 1 orang saja, 1 orang (...)

1083. KETUA: SALDI ISRA [02:22:21]

1 orang (...)

1084. KUASA HUKUM TERMOHON: FAJAR MAULANA YUSUF [02:22:22]

Ketua KPPS-nya. Kemudian pada tanggal 21 Oktober, Termohon melantik Ade Irmaya Hasibuan sebagai Anggota PPS Desa Telaga Sari melalui Surat Undangan Nomor 314 dan seterusnya.

Selanjutnya, mengenai terjadinya ... dalil mengenai terjadinya bencana alam (...)

1085. KETUA: SALDI ISRA [02:22:41]

Oke.

1086. KUASA HUKUM TERMOHON: FAJAR MAULANA YUSUF [02:22:41]

Yang mengakibatkan pemilih tidak bisa hadir yang telah mengakibatkan pemilih tidak bisa memberikan dan/atau terhalang untuk memberikan hak suara ke TP (...)

1087. KETUA: SALDI ISRA [02:22:49]

Berapa persentase kemarin sudah saya tanya, lupa saya. Berapa persentase kehadiran di Deli Serdang?

1088. KUASA HUKUM TERMOHON: FAJAR MAULANA YUSUF [02:22:54]

32%, Majelis.

1089. KETUA: SALDI ISRA [02:22:55]

32%, kurang-lebih agak mirip-mirip Kota Medan juga ini, ya. Lanjut.

1090. KUASA HUKUM TERMOHON: FAJAR MAULANA YUSUF [02:23:03]

Baik. Ada 31 TPS di 5 kecamatan yang melakukan PSS dan PSL, dapat kami uraikan.

1. Kecamatan Tanjung Morawa TPS 9 dan TPS 10 Desa Dalu 10 B.

2. Kecamatan Sunggal.
 - 1) Desa Lalang TPS 1 sampai 12.
 - 2) Desa Paya Geli, TPS 1, 2, 3, 4, 19, 20, 21, 22.
 - 3) Kemudian untuk Desa Tanjung Gusta, TPS 2, 10, 13, 16.
 - 4) Untuk Kecamatan Batang Kuis, TPS 8 dan TPS 10, Desa Tumpatan Nibung.
 - 5) Untuk Kecamatan Hamparan Perak, di TPS 28 Desa Klambir Lima Kebun.
 - 6) Untuk Kecamatan Sibolangit, TPS 3 Desa Batu Mbelin.
Kemudian TPS yang melaksanakan penghitungan suara lanjutan, yaitu Kecamatan Batang Kuis, ada di TPS 2 Desa Sena.

1091. KETUA: SALDI ISRA [02:24:00]

Oke, berapa TPS semuanya?

1092. KUASA HUKUM TERMOHON: FAJAR MAULANA YUSUF [02:24:02]

Semuanya 2.780 TPS.

1093. KETUA: SALDI ISRA [02:24:05]

Yang di 5 kecamatan tadi berapa TPS?

1094. KUASA HUKUM TERMOHON: FAJAR MAULANA YUSUF [02:24:08]

Yang di keca ... 5 kecamatan tersebut 1.004 TPS ... eh, 30 TPS.

1095. KETUA: SALDI ISRA [02:24:15]

Tapi kan TPS yang mengalami pemungutan suara susulan adalah berapa jumlahnya ini?

1096. KUASA HUKUM TERMOHON: FAJAR MAULANA YUSUF [02:24:24]

Kemudian lanjut.

1097. KETUA: SALDI ISRA [02:24:25]

Bukan, pertanyaan saya belum dijawab. Berapa jumlahnya ini, yang PSU ini, PSS ini?

1098. KUASA HUKUM TERMOHON: FAJAR MAULANA YUSUF [02:24:30]

Yang PSS 30 TPS, yang PSL 1 TPS.

1099. KETUA: SALDI ISRA [02:24:33]

30 tambah 1, ya?

1100. KUASA HUKUM TERMOHON: FAJAR MAULANA YUSUF [02:24:35]

Betul.

1101. KETUA: SALDI ISRA [02:24:37]

Oke. Lanjut. PSU itu kenapa?

1102. KUASA HUKUM TERMOHON: FAJAR MAULANA YUSUF [02:24:44]

Tidak ada PSU, Majelis. Tidak ada PSU.

1103. KETUA: SALDI ISRA [02:24:00]

Apa PSL?

1104. KUASA HUKUM TERMOHON: FAJAR MAULANA YUSUF [02:24:49]

PSL dan PSS saja.

1105. KETUA: SALDI ISRA [02:24:50]

PSS-nya 30, PSL-nya 1, ya?

1106. KUASA HUKUM TERMOHON: FAJAR MAULANA YUSUF [02:24:52]

1, ya.

1107. KETUA: SALDI ISRA [02:24:52]

Oke.

1108. KUASA HUKUM TERMOHON: FAJAR MAULANA YUSUF [02:24:53]

Di 5 kecamatan.

1109. KETUA: SALDI ISRA [02:24:56]

Lanjut.

1110. KUASA HUKUM TERMOHON: FAJAR MAULANA YUSUF [02:25:00]

Lanjut ke Petitem, Majelis.

1111. KETUA: SALDI ISRA [02:25:01]

Oh. Lanjut.

1112. KUASA HUKUM TERMOHON: FAJAR MAULANA YUSUF [02:25:02]

Sudah.

1113. KETUA: SALDI ISRA [02:25:03]

Langsung saja ke Petitemnya.

1114. KUASA HUKUM TERMOHON: FAJAR MAULANA YUSUF [02:25:05]

Berdasarkan uraian uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1115. KETUA: SALDI ISRA [02:25:12]

Enggak, pertanyaan saya dulu sebelum Petitem. Itu perubahan-perubahan jadwal. Ada yang PSS, itu kan ada pergeseran jadwal dari seharusnya pemungutan suara, digeser beberapa waktu, proses apa yang dilakukan KPU?

1116. KUASA HUKUM TERMOHON: FAJAR MAULANA YUSUF [02:25:27]

Tanggal 2 (...)

1117. KETUA: SALDI ISRA [02:25:27]

Ceritakan! Biar, Ibunya yang ceritain nih, kita dengar suaranya.

1118. TERMOHON: RELIS YANTHY PANJAITAN [02:25:31]

Baik. Izin, Majelis.

1119. KETUA: SALDI ISRA [02:25:33]

Ya.

1120. TERMOHON: RELIS YANTHY PANJAITAN [02:25:33]

Sebagaimana kita ketahui bahwasanya pem ... pemilihan itu, tanggal 27 November 2024. Tapi dari mulai tanggal 26 sampai 27 ada hujan deras.

1121. KETUA: SALDI ISRA [02:25:44]

Ya.

1122. TERMOHON: RELIS YANTHY PANJAITAN [02:25:44]

Kemudian, pada tanggal 27, kita melaksanakan, yaitu bersama dengan PPK melakukan rapat at ... melalui zoom meeting, untuk kondisi yang terjadi di masing-masing kecamatan dan tentu saja kita untuk mengetahui bagaimana kondisi di 2.780 TPS yang ada di seluruh Kabupaten Deli Serdang. Oleh karena itu, kemudian kami juga melakukan rapat kornasi[sic!] dengan pimpinan kami, yaitu di KPU provinsi terkait dengan hal ini.

1123. KETUA: SALDI ISRA [02:26:16]

Oke.

1124. TERMOHON: RELIS YANTHY PANJAITAN [02:26:17]

Kemudian di tanggal 28.

1125. KETUA: SALDI ISRA [02:26:18]

Bukan, tanggal 27-nya dulu. Kan tanggal 27 itu ada yang harusnya pukul 7 digeser menjadi pukul berapa. Itu dijelaskan, Bu.

1126. TERMOHON: RELIS YANTHY PANJAITAN [02:26:25]

Baik, kami ... baik kami jelaskan.

1127. KETUA: SALDI ISRA [02:26:27]

Karena itu tidak ada dijelaskan di sini, kan?

1128. TERMOHON: RELIS YANTHY PANJAITAN [02:26:29]

Ya. Baik.

1129. KETUA: SALDI ISRA [02:26:30]

Padahal itu ada dipersoalkan oleh Pemohon.

1130. TERMOHON: RELIS YANTHY PANJAITAN [02:26:32]

Baik, kami jelaskan.

Ini dalam jawaban kami juga ada di ... yaitu Kecamatan Sibolangit ada beberapa TPS dan di beberapa desa, yaitu ada penambahan waktu sebagaimana dalam ... disebutkan dalam surat dinas yang disampaikan oleh KPU RI, yaitu masa waktu, yaitu 6 jam. Tapi ada karena terjadi hujan, sehingga ada beberapa TPS, yang sehingga ... kesannya penundaan, sehingga yaitu ... tapi total untuk masa, yaitu pemungutan suara itu adalah sampai 6 jam. Ini ada kami sampaikan di Kecamatan Sibolangit.

1131. KETUA: SALDI ISRA [02:27:10]

Ibu, KPU Kabupaten Deli Serdang berkomunikasi dengan KPU Provinsi. Oke. Lalu apa kata KPU Provinsi, Bu?

1132. TERMOHON: RELIS YANTHY PANJAITAN [02:27:19]

Baik, sesuai dengan hasil rapat kornasi[sic!] untuk dijelaskan, yaitu untuk melaksanakan, yaitu surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2734/PL.02.6/SD06/2024 dan ini kita tanyakan ke masing-masing dan kita sampaikan ke teman-teman PPK dan tentunya ini disampaikan teman-teman PPK ke PPS dan kemudian ke KPPS. Ketika ada TPS-TPS yang mengalami kendala, itu yang terjadi.

1133. KETUA: SALDI ISRA [02:27:50]

Oke. Jadi sudah ada koordinasi, ya? Koordinasi Ibu dengan Bawaslu?

1134. TERMOHON: RELIS YANTHY PANJAITAN [02:27:54]

Ya, kita juga melakukan koordinasi by phone dengan teman-teman Bawaslu dan teman-teman PPK juga melakukan kornasi[sic!], baikpun juga ... bertemu juga dengan Panwascam.

1135. KETUA: SALDI ISRA [02:28:04]

Oke.

1136. TERMOHON: RELIS YANTHY PANJAITAN [02:28:04]

Sehingga pada tanggal 27, kita dapatkan, yaitu 30 TPS yang PSS di 5 kecamatan, 9 desa, termasuk yaitu Desa Palalang[sic!], yaitu seluruh TPS di Kecamatan Sunggal, itu yang mengalami.

1137. KETUA: SALDI ISRA [02:28:21]

Oke. Jadi, ini semua pihak sudah mengetahui, sudah sepakat, bahwa hanya 30 TPS tambah satu itu saja, ya, yang dilakukan PSS dan PSL, begitu, ya?

1138. TERMOHON: RELIS YANTHY PANJAITAN [02:28:32]

Ya. Izin Majelis.

1139. KETUA: SALDI ISRA [02:28:32]

Begitu, ya, Bu, ya?

1140. TERMOHON: RELIS YANTHY PANJAITAN [02:28:33]

Ya.

1141. KETUA: SALDI ISRA [02:28:34]

Itu apa bentuk produknya, Bu? Ada ketentuan bersama? Kesepakatan bersama? Atau apa?

1142. TERMOHON: RELIS YANTHY PANJAITAN [02:28:41]

Secara ... secara ... itu adalah di ... kita laksanakan di tanggal 28, untuk pertemuan dengan Bawaslu, dengan Stakeholder kita, Forkopimda, termasuk juga dengan BPBD, kita hadirkan pada saat itu.

1143. KETUA: SALDI ISRA [02:28:52]

Oke. Ketika ini diputuskan ... dilanjutkan tetap, pada tanggal 27 itu, dengan beberapa pergeseran, sepanjang tidak melebihi 6 jam, ya.

1144. TERMOHON: RELIS YANTHY PANJAITAN [02:29:02]

Ya.

1145. KETUA: SALDI ISRA [02:29:02]

Ada ndak pasangan calon yang keberatan?

1146. TERMOHON: RELIS YANTHY PANJAITAN [02:29:05]

Pada saat itu tidak ada, tidak ada yang menyampaikan keberatan terkait dengan itu. Sehingga ini kami sampaikan.

1147. KETUA: SALDI ISRA [02:29:12]

Bukan. Berhenti di situ dulu. Ndak ada yang keberatan, ya?

1148. TERMOHON: RELIS YANTHY PANJAITAN [02:29:15]

Tidak ada, pada saat itu.

1149. KETUA: SALDI ISRA [02:29:16]

Kapan mulai muncul keberatan ini?

1150. TERMOHON: RELIS YANTHY PANJAITAN [02:29:18]

Ya, keberatan itu mulai muncul pada saat direkapitulasi tingkat kecamatan, yaitu (...)

1151. KETUA: SALDI ISRA [02:29:23]

Setelah suara diketahui? Ya? Oke.

Nah ini, seperti kita ingatkan kemarin, ini memang soal yang bisa jadi isu siapa saja. Kalau ini misalnya Pemohon yang menang, maka Termohon yang kalah akan dibalikkan saja. Putar balik, begitu saja. Makanya berkait dengan hal ini, proses untuk memutuskannya itu benar atau tidak, itu yang paling penting yang harus kami telisik.

Maka pertanyaannya seperti itu. Ini sudah dilakukan dengan cara benar atau tidak. Kepada siapa saja? Kepada Bawaslu? Ada ndak keberatan dari pasangan calon? Itu menjadi poin-poin yang akan kami alami dan kami pertimbangkan.

Ada Berita Acara, enggak? Terkait dengan ... apa ... itu? Ada yang di PSS dan PSL itu. Ada Berita Acaranya, Bu?

1152. TERMOHON: RELIS YANTHY PANJAITAN [02:30:15]

Ya. Izin, Majelis, Berita Acaranya di T (...)

1153. KETUA: SALDI ISRA [02:30:22]

Ada, ya, disampaikan.

1154. TERMOHON: RELIS YANTHY PANJAITAN [02:30:22]

Ya. T-21, ya ... T-21, T-22.

1155. KETUA: SALDI ISRA [02:30:23]

Disampaikan ke kami, ya. Biar nanti kita, lihat.

1156. TERMOHON: RELIS YANTHY PANJAITAN [02:30:24]

Ya, ya.

1157. KETUA: SALDI ISRA [02:30:27]

Oke, lanjut. Apa yang mau disampaikan lagi? Cukup?

1158. TERMOHON: RELIS YANTHY PANJAITAN [02:30:31]

Cukup.

1159. KETUA: SALDI ISRA [02:30:32]

Oke. Petitemnya, tadi Petitem sudah dibacakan, belum?
Nah, silakan baca Petitemnya.

1160. KUASA HUKUM TERMOHON: FAJAR MAULANA YUSUF [02:30:38]

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Perkara.

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Dua, menyatakan benar dan tetap berlaku Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Deli Serdang Nomor 309 ... 3098 Tahun 2024, tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024 pukul 15.04 WIB.

Tiga, menetapkan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024, dianggap dibacakan.

1161. KETUA: SALDI ISRA [02:31:12]

Oke.

1162. KUASA HUKUM TERMOHON: FAJAR MAULANA YUSUF [02:31:12]

Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon ditandatangani.
Terima kasih, Majelis.

1163. KETUA: SALDI ISRA [02:31:15]

Terima kasih.
Sekarang Pihak Terkait, Silakan. Kuasa Pihak Terkait.

1164. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 152/PHPU.BUP-XXIII/2025: DONI HENDRA LUBIS [02:31:21]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.
Izinkan kami Pihak Terkait dari Dr. Asri Ludin Tambunan, Lom Lom Suwondo Paslon Nomor Urut 02, menyampaikan Keterangan Pihak Terkait
Dalam Eksepsi.
Yang pertama, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili dalam perkara a quo, dianggap dibacakan.

1165. KETUA: SALDI ISRA [02:31:41]

Kalau gitu, kita tutup saja Sidangnya, ya.

1166. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 152/PHPU.BUP-XXIII/2025: DONI HENDRA LUBIS [02:31:43]

Siap, Yang Mulia.

1167. KETUA: SALDI ISRA [02:31:43]

Karena kan, "Tidak berwenang," kata Anda.

1168. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 152/PHPU.BUP-XXIII/2025: DONI HENDRA LUBIS [02:31:44]

Siap, Yang Mulia.

1169. KETUA: SALDI ISRA [02:31:45]

Ya?

1170. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 152/PHPU.BUP-XXIII/2025: DONI HENDRA LUBIS [02:31:45]

Izin, Yang Mulia.

1171. KETUA: SALDI ISRA [02:31:46]

Gimana baiknya?

1172. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 152/PHPU.BUP-XXIII/2025: DONI HENDRA LUBIS [02:31:47]

Siap.

1173. KETUA: SALDI ISRA [02:31:48]

Kita lanjutkan atau tidak sidangnya?

1174. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 152/PHPU.BUP-XXIII/2025: DONI HENDRA LUBIS [02:31:49]

Lanjut, Yang Mulia.

1175. KETUA: SALDI ISRA [02:31:49]

Kalau enggak, bagaimana kalau tidak ada kewenangan?

1176. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 152/PHPU.BUP-XXIII/2025: DONI HENDRA LUBIS [02:31:51]

Siap, Yang Mulia.

1177. KETUA: SALDI ISRA [02:31:53]

Jadi ... apa namanya ... lawyer ini, aduh, pusing saya.

1178. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 152/PHPU.BUP-XXIII/2025: DONI HENDRA LUBIS [02:31:58]

Siap, Yang Mulia.

1179. KETUA: SALDI ISRA [02:32:00]

Carilah alasan lain yang agak lebih bermutu sedikit (...)

1180. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 152/PHPU.BUP-XXIII/2025: DONI HENDRA LUBIS [02:32:03]

Siap, Yang Mulia.

1181. KETUA: SALDI ISRA [02:32:04]

Untuk menjelaskan soal-soal yang begini. Kan sudah saya ingatkan, dari zaman baheula itu sudah ditegaskan, tidak hanya soal angka, semua proses itu bisa dinilai oleh Mahkamah. Anda paham itu?

1182. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 152/PHPU.BUP-XXIII/2025: DONI HENDRA LUBIS [02:32:14]

Siap, Yang Mulia.

1183. KETUA: SALDI ISRA [02:32:16]

Nah, makanya, kalau Anda mengatakan tidak berwenang, ya, tidak ada gunanya kita duduk di sini. Oke, lanjut!

1184. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 152/PHPU.BUP-XXIII/2025: DONI HENDRA LUBIS [02:32:23]

Izin melanjutkan, Yang Mulia. Baik (...)

1185. KETUA: SALDI ISRA [02:32:24]

Itu melanjutkan juga, kan berarti ada wewenang, kan?

1186. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 152/PHPU.BUP-XXIII/2025: DONI HENDRA LUBIS [02:32:26]

Siap, Yang Mulia.

1187. KETUA: SALDI ISRA [02:32:31]

Silakan!

1188. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 152/PHPU.BUP-XXIII/2025: DONI HENDRA LUBIS [02:32:32]

Mohon izin, Yang Mulia.

1189. KETUA: SALDI ISRA [02:32:32]

Ya.

1190. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 152/PHPU.BUP-XXIII/2025: DONI HENDRA LUBIS [02:32:33]

Baik. Yang kedua, kedudukan hukum ataupun Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum. Berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang dimana batasnya itu adalah yang ditetapkan adalah 0,5, yang dimana dalam hal ini sebesar 2.237, tetapi kenyataannya ambang batas tersebut dilewati karena Pihak Terkait mendapatkan suara 90.546, jika dipersentasekan sekitar 20% (...)

1191. KETUA: SALDI ISRA [02:33:06]

Oke, cukup. Pokoknya ini melewati Ketentuan 158. Apa lagi?

1192. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 152/PHPU.BUP-XXIII/2025: DONI HENDRA LUBIS [02:33:11]

Baik. Kemudian, eksepsi poin yang ketiga, Permohonan Pemohon tidak jelas ataupun obscur liber.

Yang pertama bahwasanya Pemohon dalam permohonannya tidak jelas menguraikan dalil permohonannya yang terdapat dalam poin A sampai dengan Poin I halaman 24 mengenai tentang bencana alam berupa banjir yang terdapat di Deli Serdang. Seyogianya, agar tegas dan jelas, Pemohon harus menguraikan locus atau tempat secara terperinci.

Semisal nya, TPS atau desa yang terdampak banjir di kecamatan yang menurut Pemohon terdampak banjir. Karena dalil yang disusun oleh Pemohon yang seakan-akan 9 kecamatan, Kecamatan Namorambe, Birubiru, Kecamatan Sunggal, Tanjung Murawa, Batang Kuis, Patumbak, Hampanan Perak, Deli Tua, Percut Sei Tuan terendam banjir secara keseluruhan yang berakibat tidak dapat terlaksananya pemilihan pada tanggal 20 November 2024. Dan semakin tidak jelasnya, Pemohon dalam Petitum Nomor 2 memintakan KPU Deli Serdang untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2024 di seluruh TPS se-Kabupaten Deli Serdang dalam waktu paling lama 4 bulan setelah putusan ditetapkan. Bahwa (...)

1193. KETUA: SALDI ISRA [02:34:33]

Yang namanya orang minta, kan, bolehlah.

1194. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 152/PHPU.BUP-XXIII/2025: DONI HENDRA LUBIS [02:34:35]

Siap, Yang Mulia.

1195. KETUA: SALDI ISRA [02:34:36]

Masa enggak boleh.
Apa lagi? Terus!

1196. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 152/PHPU.BUP-XXIII/2025: DONI HENDRA LUBIS [02:34:38]

Siap. Bahwa Pemohon kontradiktif antara Posita dan Petitem. Didapati Petitem Permohonan Poin 3 memintakan ... memerintahkan KPU Kabupaten Deli Serdang untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2024 seluruh TPS se-Kabupaten Deli Serdang dalam waktu paling lama 4 bulan setelah putusan ditetapkan.

Tetapi, dalam uraian Posita yang terdapat di dalam halaman 24, A sampai J, hanya mendalilkan 9 kecamatan dengan alasan banjir dan 1 kecamatan dengan alasan tanah longsor. Uraian ... Uraian Posita dan Petitem demikian menandakan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.

Selanjutnya, Pihak Terkait juga menyampaikan di sini bahwasanya Pemohon dalam uraian dalilnya tidak menjelaskan mengenai perhitungan yang jelas ataupun yang benar menurut Pemohon, yang dimana seyogianya telah bertentangan atau tidak tepat menurut Pemohon ... Pihak Terkait dengan Pasal 8 angka 4 dan angka 5 PMK Nomor 3 Tahun 2024.

Selanjutnya, mohon izin, Yang Mulia, Pihak Terkait menyampaikan Dalam Pokok Permohonan.

1197. KETUA: SALDI ISRA [02:35:51]

Ya, silakan!

1198. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 152/PHPU.BUP-XXIII/2025: DONI HENDRA LUBIS [02:35:52]

Yang pertama itu adalah ... yang pertama bahwa pada pokoknya Pemohon menyatakan ada 18 pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait dalam Permohonannya, halaman 15 sampai dengan halaman 18. Dan kesemuanya pelanggaran tersebut menurut Pemohon terjadi disebabkan Calon Bupati Pasangan 02 atas nama Dr. AsriLudin Tambunan adalah merupakan mantan Aparatur Sipil Negara dengan jabatan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang yang mengundur ... mengundurkan diri pada pencalonan dirinya sebagai Calon Bupati Deli Serdang.

Bahwa kemudian Pemohon dalam permohonannya menyampaikan dalam halaman 18, paragraf pertama. Bahwa terhadap sebagian pelanggaran-pelanggaran di atas, sebagian besar telah dilaporkan oleh Pemohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang.

Bahwa terhadap asumsi pertama Pemohon sebagai landasan bangunan dalil adanya pelanggaran Pihak Terkait, menanggapinya dalilan ... dalil tersebut tidak berdasar karena pihak terse ... Pihak Terkait selaku mantan Kepala Dinas Kesehatan tidak mempunyai kewenangan untuk menggerakkan Aparatur Sipil Negara, camat, kepala desa apabila asumsi tersebut juga dijadikan bangunan alasan terjadinya pelanggaran terstruktur, sistematif, dan masif (...)

1199. KETUA: SALDI ISRA [02:37:10]

Quod non apa itu? Quod non apabila ... kok tidak dibaca?

1200. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 152/PHPU.BUP-XXIII/2025: DONI HENDRA LUBIS [02:37:13]

Ya. Siap, Yang Mulia.

Namun, apabila asumsi tersebut juga dijadikan bangunan alasan terjadinya pelanggaran terstruktur, sistematif, dan massif, maka Pemohonlah yang seharusnya paling besar peluang pelanggaran terstruktur, sistematif, dan masif ter ... tersebut dalam proses Pilkada Deli Serdang. Karena pemohon calon bupati petahana, yaitu selaku kabu ... Bupati Kabupaten Deli Serdang, dibuktikan dengan Bukti PT-6.

1201. KETUA: SALDI ISRA [02:37:39]

Oh, jadi petahananya Pemohon, ya?

1202. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 152/PHPU.BUP-XXIII/2025: DONI HENDRA LUBIS [02:37:41]

Ya, Yang Mulia. Petahana, Yang Mulia

1203. KETUA: SALDI ISRA [02:37:43]

Oke, lanjut.

1204. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 152/PHPU.BUP-XXIII/2025: DONI HENDRA LUBIS [02:37:43]

Bahwa terhadap asumsi kedua, permohonan yang menyampaikan sebagian besar pelanggaran telah dilakukan lap ... laporan ke Bawaslu, merupakan dalil yang tidak berdasar karena variabelnya hanya terdapat 3 laporan yang didalilkan. Berdasarkan uraian tersebut, kalimat paling tepat adalah sebagian kecil.

Bahwa terhadap dalil poin 2 dan 3, Pemohon dalam Permohonannya halaman 15 Pokok Perkara, Pihak Terkait menyampaikan pada pokoknya persoalan laporan tersebut, Bawaslu telah melakukan kajian dugaan pelanggaran dengan Nomor 002 dianggap dibacakan, dan merekomendasikan temuan dilakukan proses penanganan pelanggaran oleh pejabat pembina terkait, yang dimana telah dibuktikan dengan Bukti PT-9.

Bahwa terhadap rekomendasi Bawaslu Deli Serdang tersebut, Inspektorat Kabupaten Deli Serdang (...)

1205. KETUA: SALDI ISRA [02:38:35]

Oke, itu tidak usah.

1206. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 152/PHPU.BUP-XXIII/2025: DONI HENDRA LUBIS [02:38:35]

Siap, Yang Mulia.

1207. KETUA: SALDI ISRA [02:38:37]

Biar kami yang baca. Apa poin lain lagi?

1208. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 152/PHPU.BUP-XXIII/2025: DONI HENDRA LUBIS [02:38:38]

Izin, Yang Mulia.

1209. KETUA: SALDI ISRA [02:38:40]

Ya.

1210. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 152/PHPU.BUP-XXIII/2025: DONI HENDRA LUBIS [02:38:41]

Poin 10.

1211. KETUA: SALDI ISRA [02:38:41]

Ya.

1212. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 152/PHPU.BUP-XXIII/2025: DONI HENDRA LUBIS [02:38:41]

Bahwa terhadap dalil poin 13. Permohonan Pemohon, Pihak Terkait menyampaikan tidak ada Ketua PPS Telaga Sari, Kecamatan Tanjung Morawa atas nama Buono Syahputra, sebagaimana tertulis di dalam Permohonan.

1213. KETUA: SALDI ISRA [02:38:55]

Tadi dibenarkan, tapi kan diganti.

1214. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 152/PHPU.BUP-XXIII/2025: DONI HENDRA LUBIS [02:38:56]

Izin, Yang Mulia. Di dalam Permohonan salah penulisan namanya, Yang Mulia.

1215. KETUA: SALDI ISRA [02:39:00]

Oke.

1216. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 152/PHPU.BUP-XXIII/2025: DONI HENDRA LUBIS [02:39:01]

Izin, Yang Mulia.

1217. KETUA: SALDI ISRA [02:39:02]

Oke.

1218. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 152/PHPU.BUP-XXIII/2025: DONI HENDRA LUBIS [02:39:03]

Baik.

1219. KETUA: SALDI ISRA [02:39:02]

Apanya yang salah?

1220. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 152/PHPU.BUP-XXIII/2025: DONI HENDRA LUBIS [02:39:04]

Jadi di dalam (...)

1221. KETUA: SALDI ISRA [02:39:05]

Yang tidak pakai W, ya?

1222. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 152/PHPU.BUP-XXIII/2025: DONI HENDRA LUBIS [02:39:07]

Ya. Izin, Yang Mulia.

1223. KETUA: SALDI ISRA [02:39:08]

Yang sebenarnya pakai W atau tidak?

1224. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 152/PHPU.BUP-XXIII/2025: DONI HENDRA LUBIS [02:39:09]

Tidak, Yang Mulia.

1225. KETUA: SALDI ISRA [02:39:09]

Oke.

1226. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 152/PHPU.BUP-XXIII/2025: DONI HENDRA LUBIS [02:39:10]

Buo pakai O, Yang Mulia.

1227. KETUA: SALDI ISRA [02:39:11]

Oke. Itu saja penting juga bagi Para Lawyer ini, lanjut.

1228. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 152/PHPU.BUP-XXIII/2025: DONI HENDRA LUBIS [02:39:13]

Siap, Yang Mulia. Izin melanjutkan, Yang Mulia.

1229. KETUA: SALDI ISRA [02:39:17]

Ya, itu enggak usah dilanjutkan.

1230. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 152/PHPU.BUP-XXIII/2025: DONI HENDRA LUBIS [02:39:20]

Baik. Poin 11.

Bahwa terhadap dalil Poin 17, Pemohon dalam Permohonannya halaman 18 yang menuduhkan adanya sekretaris ... Sekretaris Desa Klumpang Kampung yang bernama Luffi[sic!] Juwanda, S.Pd., mengikuti kampanye Paslon Nomor Urut 2 pada tanggal 19 November 2024 merupakan dalil yang tidak berdasar dan harus dikesampingkan. Alasannya, Luffi[sic!] Juwanda, S.Pd., pada tanggal 18 November 2024 telah menyampaikan surat izin cuti kepada Kepala Desa Klumpang Kampung untuk menjadi Master of Ceremony dalam kegiatan Kampanye Paslon Nomor Urut 02, sebagaimana Bukti PT-11 (...)

1231. KETUA: SALDI ISRA [02:40:00]

Jadi karena alasan dia mengajukan surat izin cuti, lalu dia terlibat menjadi MC di acara itu, ya?

1232. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 152/PHPU.BUP-XXIII/2025: DONI HENDRA LUBIS [02:40:08]

Siap, Yang Mulia.

1233. KETUA: SALDI ISRA [02:40:09]

Oke. Jadi ini aneh juga kepala desanya ini. Dia ajukan surat cuti (...)

1234. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 152/PHPU.BUP-XXIII/2025: DONI HENDRA LUBIS [02:40:13]

Siap.

1235. KETUA: SALDI ISRA [02:40:14]

Lalu hadir di saat kampanye. Dia terdaftar enggak, sebagai tim kampanye?

1236. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 152/PHPU.BUP-XXIII/2025: DONI HENDRA LUBIS [02:40:17]

Tidak, Yang Mulia.

1237. KETUA: SALDI ISRA [02:40:21]

Ini ... oke, lanjut.

1238. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 152/PHPU.BUP-XXIII/2025: DONI HENDRA LUBIS [02:40:22]

Siap. Izin, Yang Mulia.

1239. KETUA: SALDI ISRA [02:40:23]

Ya.

1240. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 152/PHPU.BUP-XXIII/2025: DONI HENDRA LUBIS [02:40:25]

Poin 14. Bahwa fakta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli ... Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024, dikontestasikan 3 calon bupati dan calon wakil bupati, dan satu-satunya calon petahana adalah Pemohon, in casu Drs. H Muhammad Ali Yusuf Siregar selaku bupati (...)

1241. KETUA: SALDI ISRA [02:40:43]

In casu, itu s-nya satu, ya?

1242. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 152/PHPU.BUP-XXIII/2025: DONI HENDRA LUBIS [02:40:45]

Ya. Siap, Yang Mulia.

1243. KETUA: SALDI ISRA [02:40:46]

Nanti terlalu dingin kalau banyak s-nya.

1244. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 152/PHPU.BUP-XXIII/2025: DONI HENDRA LUBIS [02:40:48]

Siap, Yang Mulia.

1245. KETUA: SALDI ISRA [02:40:49]

Lanjut.

1246. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 152/PHPU.BUP-XXIII/2025: DONI HENDRA LUBIS [02:40:51]

Bupati Kabupaten Deli Serdang yang apabila mengikuti asumsi Pemohon dalam dasar menyampaikan dalil pelanggaran terstruktur, sistematis[sic!], dan masif, seharusnya Pemohon lah yang lebih berpeluang besar melakukan pelanggaran tersebut. Alasannya, Pemohon dapat menggerakkan ASN, Camat, dan Kepala Desa se-Kabupaten Deli Serdang untuk mendapatkan suara.

1247. KETUA: SALDI ISRA [02:41:10]

Oke.

1248. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 152/PHPU.BUP-XXIII/2025: DONI HENDRA LUBIS [02:41:10]

Izin, izin, Yang Mulia.

1249. KETUA: SALDI ISRA [02:41:12]

Ya.

1250. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 152/PHPU.BUP-XXIII/2025: DONI HENDRA LUBIS [02:41:12]

Kami dari Pihak Terkait membacakan sekilas saja pelanggaran-pelanggaran yang menurut hemat kami dilakukan oleh Pihak 03 ataupun selaku Pemohon. Izin, Yang Mulia.

1251. KETUA: SALDI ISRA [02:41:20]

Ya, ini sudah cukup di sini, biar kita baca. Yang lain poinnya?

1252. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 152/PHPU.BUP-XXIII/2025: DONI HENDRA LUBIS [02:41:23]

Siap, Yang Mulia.

1253. KETUA: SALDI ISRA [02:41:24]

Ya.

1254. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 152/PHPU.BUP-XXIII/2025: DONI HENDRA LUBIS [02:41:24]

Siap.

1255. KETUA: SALDI ISRA [02:41:25]

Apa yang mau ... yang mau disampaikan?

1256. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 152/PHPU.BUP-XXIII/2025: DONI HENDRA LUBIS [02:41:27]

Baik.

1257. KETUA: SALDI ISRA [02:41:28]

Ada lagi tambahannya?

1258. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 152/PHPU.BUP-XXIII/2025: DONI HENDRA LUBIS [02:41:30]

Ada, Yang Mulia. Mengenai adanya pemungutan suara susulan dan pemungutan suara lanjutan terhadap kami selaku Paslon 03, Yang Mulia.

1259. KETUA: SALDI ISRA [02:41:39]

Oke, silakan. Apa yang mau disampaikan?

1260. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 152/PHPU.BUP-XXIII/2025: DONI HENDRA LUBIS [02:41:51]

Izin, Yang Mulia.

1261. KETUA: SALDI ISRA [02:41:52]

Ya.

1262. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 152/PHPU.BUP-XXIII/2025: DONI HENDRA LUBIS [02:41:52]

Terhadap pemilihan ... pemilihan[sic!] suara susulan dan pemilihan[sic!] suara lanjutan terhadap (...)

1263. KETUA: SALDI ISRA [02:41:59]

Pemungutan suara.

1264. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 152/PHPU.BUP-XXIII/2025: DONI HENDRA LUBIS [02:42:00]

Pemungutan. Siap, Yang Mulia.
Pemungutan suara susulan dan pemungutan suara lanjutan sebagai Pihak Terkait selaku Paslon (...)

1265. KETUA: SALDI ISRA [02:42:07]

Ya.

1266. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 152/PHPU.BUP-XXIII/2025: DONI HENDRA LUBIS [02:42:07]

Kami telah diberitahukan oleh Pihak Termohon, yaitu telah yang kami buktikan di dalam bukti, mulai dari Bukti PT-31A sampai PT-31D, Yang Mulia.

1267. KETUA: SALDI ISRA [02:42:24]

Oke.

1268. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 152/PHPU.BUP-XXIII/2025: DONI HENDRA LUBIS [02:42:24]

Proses pemberitahuannya, Yang Mulia. Dan (...)

1269. KETUA: SALDI ISRA [02:42:26]

Tapi enggak, enggak ada komposisi suara di TPS ini, ya?

1270. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 152/PHPU.BUP-XXIII/2025: DONI HENDRA LUBIS [02:42:29]

Izin, Yang Mulia. Kami sampaikan di poin 18.10 bahwasanya (...)

1271. KETUA: SALDI ISRA [02:42:35]

Ya.

1272. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 152/PHPU.BUP-XXIII/2025: DONI HENDRA LUBIS [02:42:35]

30 TPS pemilihan suara lanjutan ini dan ... dan susulan ini bahwasanya didapati Pihak Terkait juga perolehan suara terbanyaknya, Yang Mulia, izin.

1273. KETUA: SALDI ISRA [02:42:47]

Oke. Jadi Pihak Terkait suaranya yang terbanyak juga, ya?

1274. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 152/PHPU.BUP-XXIII/2025: DONI HENDRA LUBIS [02:42:50]

Ya, Yang Mulia. Itu pun dilaksanakan pada tanggal 1 Desember 2025, tepatnya di hari Minggu, Yang Mulia.

1275. KETUA: SALDI ISRA [02:42:57]

Oke. Apa lagi?

1276. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 152/PHPU.BUP-XXIII/2025: DONI HENDRA LUBIS [02:42:58]

Ya. Selanjutnya, izinkan kami Pihak Terkait menyampaikan Petitum.

1277. KETUA: SALDI ISRA [02:43:04]

Ya.

1278. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 152/PHPU.BUP-XXIII/2025: DONI HENDRA LUBIS [02:43:04]

Yang Pertama. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Yang Kedua.

Dalam Pokok Perkara.

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Deli Serdang Nomor 3098 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024, pukul 15.04 WIB.

3. Menetapkan perolehan suara tahap akhir Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2024 yang benar sebagai berikut, tidak dibacakan lagi.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat Pihak Terkait, Kuasa Hukumnya.

1279. KETUA: SALDI ISRA [02:43:56]

Terima kasih.

1280. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 152/PHPU.BUP-XXIII/2025: DONI HENDRA LUBIS [02:43:56]

Ya.

1281. KETUA: SALDI ISRA [02:43:56]

Pihak Terkait.

Bawaslu, silakan.

1282. BAWASLU: ZULKIFLI NASIB MARULI TUA LUMBANGAOL [02:44:00]

Ya. Terima kasih, Majelis.

Perkenalkan, saya Zulkifli Lumbangaol dan bersama Ketua Febry. Kami dari Bawaslu Kabupaten Deli Serdang ingin menyampaikan keterangan tertulis, tapi saya hanya me-resume-kan saja ping ... Majelis.

1283. KETUA: SALDI ISRA [02:44:14]

Ya.

1284. BAWASLU: ZULKIFLI NASIB MARULI TUA LUMBANGAOL [02:44:14]

Apa-apa saja.

Yang pertama, yang ingin kami sampaikan adalah hal-hal yang dimohonkan oleh Pemohon yang berkaitan.

1285. KETUA: SALDI ISRA [02:44:24]

Saya ingin KPU menjelaskan lebih kepada poin, ketika hujan, lalu kemudian ... apa namanya ... mau melanjutkan dengan PSS, PSL itu, gimana keterlibatan Bawaslu dalam kejadian itu. Nah, itu yang harus dijelaskan.

1286. BAWASLU: ZULKIFLI NASIB MARULI TUA LUMBANGAOL [02:44:41]

Ya. Sekaligus (...)

1287. KETUA: SALDI ISRA [02:44:41]

Peran apa yang dilakukan Bawaslu?

1288. BAWASLU: ZULKIFLI NASIB MARULI TUA LUMBANGAOL [02:44:43]

Ya. Terima kasih, Majelis.
Sebelum ke situ saya bacakan dulu pihak-pihak permohonan yang terkait ... yang soal ... apa ... yang keterlibatan Bawaslu.

1289. KETUA: SALDI ISRA [02:44:52]

Yang lainnya, nanti kita baca, poinnya akan lebih fokus di situ.

1290. BAWASLU: ZULKIFLI NASIB MARULI TUA LUMBANGAOL [02:44:55]

Oh, ya. Kalau soal keterlibatan Bawaslu, pada saat (...)

1291. KETUA: SALDI ISRA [02:44:58]

Ya.

1292. BAWASLU: ZULKIFLI NASIB MARULI TUA LUMBANGAOL [02:45:00]

Terjadinya hujan pada tanggal 27 November pemungutan suara (...)

1293. KETUA: SALDI ISRA [02:45:04]

Kalau hujan terjadi, pasti Bawaslu ndak terlibat. Ya, kan?

1294. BAWASLU: ZULKIFLI NASIB MARULI TUA LUMBANGAOL [02:45:09]

Kami telah menyurat (...)

1295. KETUA: SALDI ISRA [02:45:10]

Bukan. Maksud saya, ini kan ada yang ditunda sekian jam, ada yang PSS atas[sic!] PSL. Apa yang dilakukan Bawaslu? Sebagai pengawas untuk kondisi yang di luar normal ini?

1296. BAWASLU: ZULKIFLI NASIB MARULI TUA LUMBANGAOL [02:45:23]

Ya. Yang pertama, kami pada saat.

1297. KETUA: SALDI ISRA [02:45:25]

Ada dijelaskan dalam keterangan?

1298. BAWASLU: ZULKIFLI NASIB MARULI TUA LUMBANGAOL [02:45:27]

Dalam keterangan, tidak ada kami jelaskan.

1299. KETUA: SALDI ISRA [02:45:28]

Nah, itu yang salahnya Bawaslu. Padahal itu salah satu argumentasi utamanya, mempersoalkan semuanya ini.

1300. BAWASLU: ZULKIFLI NASIB MARULI TUA LUMBANGAOL [02:45:37]

Ya, kar ... Majelis.

1301. KETUA: SALDI ISRA [02:45:39]

Ya, ya. Tapi kok ndak dibuat? Begitu?

1302. BAWASLU: ZULKIFLI NASIB MARULI TUA LUMBANGAOL [02:45:41]

Ya, karena dalil-dalilnya yang soal penanganan pelanggaran saja, Bawaslu fokus menjelaskan di keterangan tertulis. Karena pada saat tanggal 27 November itu, kenapa tidak kita libatkan? Karena, saksi dari pasangan calon, dari kedua belah pihak tidak juga ada yang melakukan keberatan terhadap hal tersebut.

1303. KETUA: SALDI ISRA [02:46:00]

Oke. Satu, tidak ada keberatan.

1304. BAWASLU: ZULKIFLI NASIB MARULI TUA LUMBANGAOL [02:46:02]

Ya.

1305. KETUA: SALDI ISRA [02:46:02]

Apa lagi?

1306. BAWASLU: ZULKIFLI NASIB MARULI TUA LUMBANGAOL [02:46:03]

Baru, kami tanggal 27 November itu, juga sudah menyurati be ... KPU Kabupaten Deli Serdang dengan bukti surat, ada juga kami lampirkan dalam ini (...)

1307. KETUA: SALDI ISRA [02:46:12]

Ada P ... di bukti ... dibukti PK, berapa?

1308. BAWASLU: ZULKIFLI NASIB MARULI TUA LUMBANGAOL [02:46:16]

Bawaslu.

1309. KETUA: SALDI ISRA [02:46:16]

Pemberi Keterangan berapa?

**1310. BAWASLU: ZULKIFLI NASIB MARULI TUA LUMBANGAOL
[02:46:18]**

Di bukti (...)

1311. KETUA: SALDI ISRA [02:46:20]

Ada, ya?

**1312. BAWASLU: ZULKIFLI NASIB MARULI TUA LUMBANGAOL
[02:46:21]**

Ada, Majelis. Di bukti (...)

1313. KETUA: SALDI ISRA [02:46:22]

Bukti PK, berapa?

**1314. BAWASLU: ZULKIFLI NASIB MARULI TUA LUMBANGAOL
[02:46:24]**

PK ... PK-7319[sic!].

1315. KETUA: SALDI ISRA [02:46:30]

Oke.

**1316. BAWASLU: ZULKIFLI NASIB MARULI TUA LUMBANGAOL
[02:46:31]**

Ya.

1317. KETUA: SALDI ISRA [02:46:31]

Nanti kita cek.

**1318. BAWASLU: ZULKIFLI NASIB MARULI TUA LUMBANGAOL
[02:46:31]**

Yang pada tanggal 27 itu juga, kami sudah menyurati untuk memberikan sikap atas hujan yang terjadi.

1319. KETUA: SALDI ISRA [02:46:38]

Oke.

**1320. BAWASLU: ZULKIFLI NASIB MARULI TUA LUMBANGAOL
[02:46:39]**

Maka, pada saat itu, KPU menyatakan dan Panwascam juga, di seluruh Kabupaten Deli Serdang, kami instruksikan, tolong diperhatikan, mana-mana TPS yang tidak bisa dilaksanakan pemungutan suara, maka terdapatlah 31 TPS.

1321. KETUA: SALDI ISRA [02:46:58]

Oke.

**1322. BAWASLU: ZULKIFLI NASIB MARULI TUA LUMBANGAOL
[02:46:58]**

Yang di-PSS dan PSL-kan. Terutama itu di Kecamatan Sunggal, memang sama sekali tidak bisa dilakukan pemungutan suara, karena sudah terjadi banjir PSS. Makanya disitulah kita laksanakan rekomendasi, dan surat itu juga kita buktikan melalui surat pembuktian dari kecamatan-kecamatan yang sudah melakukan pengawasan pada saat pemi ... pemilihan tanggal 27 November tersebut.

1323. KETUA: SALDI ISRA [02:47:24]

Oke.

**1324. BAWASLU: ZULKIFLI NASIB MARULI TUA LUMBANGAOL
[02:47:25]**

Gitu, Majelis.

1325. KETUA: SALDI ISRA [02:47:25]

Jadi, ketika peristiwa itu terjadi, Bawaslu aktif, ya?

**1326. BAWASLU: ZULKIFLI NASIB MARULI TUA LUMBANGAOL
[02:47:30]**

Aktif, Majelis.

1327. KETUA: SALDI ISRA [02:47:30]

Untuk menyarankan.

**1328. BAWASLU: ZULKIFLI NASIB MARULI TUA LUMBANGAOL
[02:47:32]**

Ya, Majelis.

1329. KETUA: SALDI ISRA [02:47:33]

Lalu memerintahkan kepada Panwascam untuk meninjau mana-mana yang tidak mungkin dilakukan pemungutan suara, ya?

**1330. BAWASLU: ZULKIFLI NASIB MARULI TUA LUMBANGAOL
[02:47:40]**

Siap, Majelis.

1331. KETUA: SALDI ISRA [02:47:41]

Oke.

**1332. BAWASLU: ZULKIFLI NASIB MARULI TUA LUMBANGAOL
[02:47:42]**

Nah, untuk berikutnya.

1333. KETUA: SALDI ISRA [02:47:45]

Nah, yang lain-lain sekarang Anda terangkan. Apa yang lain-lain?

**1334. BAWASLU: ZULKIFLI NASIB MARULI TUA LUMBANGAOL
[02:47:48]**

Ya. Terima kasih, Majelis.

1335. KETUA: SALDI ISRA [02:47:49]

Waduh, senyum Anda manis sekali.

**1336. BAWASLU: ZULKIFLI NASIB MARULI TUA LUMBANGAOL
[02:47:53]**

Ya. Hal-hal yang dimohonkan oleh Pemohon yang berkaitan dengan tugas pengawasan Bawaslu Deli Serdang.

Pertama, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa dalam Pokok Permohonan.

Pertama, tentang Penetapan Hasil Perhitungan Suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing calon yang tertulis pada halaman 14 angka pertama dan terhadap hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Deli Serdang telah melakukan pengawasan pada saat rekapitulasi, di kecamatan serta di kabupaten, dan telah dijelaskan oleh Bawaslu Kabupaten Deli Serdang, sebagaimana yang tercantum pada halaman 2 dan halaman 3 Keterangan Tertulis Bawaslu Kabupaten Deli Serdang, kami mohon untuk dianggap sudah dibacakan, Majelis.

1337. KETUA: SALDI ISRA [02:48:37]

Ya.

1338. BAWASLU: ZULKIFLI NASIB MARULI TUA LUMBANGAOL [02:48:38]

Kedua. Bahwa Pemohon mendalihkan dalam Pokok Permohonan tentang Pelanggaran Pasangan Calon Nomor 2 dengan melibatkan camat, kepala desa, dan Aparatur Negeri Sipil atau (ASN) dalam hal keterlibatan pemenangan dalam Pilkada Deli Serdang dalam halaman 15 angka 2. Dan terhadap hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Deli Serdang juga sudah melakukan pengawasan, sebagaimana yang tercantum dalam halaman 4 dan halaman 8, keterangan tertulis Bawaslu Kabupaten Deli Serdang.

Izin, Majelis, ini sedikit ada koreksi dari kami, ada penulisan mengulang dari apanya ... soal angka DPT dan perolehan suaranya ada yang mau direnvoi, Majelis.

1339. KETUA: SALDI ISRA [02:49:24]

Ya, nanti Anda renvoi, lah.

1340. BAWASLU: ZULKIFLI NASIB MARULI TUA LUMBANGAOL [02:49:26]

Ya, terima kasih, Majelis.

Bahwa Pemo ... yang ketiga. Bahwa Pemohon mendalihkan dalam Pokok Permohonan tentang terjadinya bencana alam, hujan lebat, angin yang meng ... mengakibatkan TPS banjir dan/atau mengakibatkan pemilih tidak bisa hadir di TPS, dalam halaman 19 angka 2, dan terdapat hal tersebut Bawaslu Kabupaten Deli Serdang telah melakukan pengawasan dan telah dijelaskan Bawaslu Kabupaten Deli Serdang sebagaimana yang tercantum dalam halaman 9 sampai 14 keterangan tertulis, kami mohon untuk dianggap sudah dibacakan.

1341. KETUA: SALDI ISRA [02:50:03]

Ya.

1342. BAWASLU: ZULKIFLI NASIB MARULI TUA LUMBANGAOL [02:50:03]

B. Hal-hal yang dimohonkan Pemohon berkaitan dengan wewenang penindakan Bawaslu Kabupaten Deli Serdang.

Pertama, Bawaslu Kabupaten Deli Serdang dalam bentuk pengawasan di rekapultasi kabupaten tanggal 3 sampai tanggal 6 Desember 2024, dibuktikan dengan Bukti PK/7/2, terkait dengan pengawas ... pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Deli Serdang.

Kedua. Bawa ... bawa ... Bawaslu Kabupaten Deli Serdang menerima Permohonan Sengketa pada tanggal 3 Desember 2024 dengan Nomor Tanda Terima Permohonan 001/PS.PNM.LG/SU-04/XII (...)

1343. KETUA: SALDI ISRA [02:50:57]

Kalau begitu, saya tanyalah! Daripada Anda bacakan kayak begitu. Itu terkait kepala desa yang jadi MC di acara kampanye Pasangan 02 itu, apa yang bisa dijelaskan?

1344. BAWASLU: ZULKIFLI NASIB MARULI TUA LUMBANGAOL [02:51:06]

Ya, untuk pelanggaran ... penanganan pelanggaran para itu, kami sudah periksa bahwa dia tidak terbukti, setelah kami telusuri, tidak terbukti pelanggaran-pelanggarannya (...)

1345. KETUA: SALDI ISRA [02:51:18]

Dia hadir di situ, kan?

1346. BAWASLU: ZULKIFLI NASIB MARULI TUA LUMBANGAOL [02:51:19]

Hadir, cuma dia dalam bentuk klarifikasinya, dia tidak tahu kalau ternyata dia jadi MC dan dia ... diapakan di tim pemenangannya dan dia juga sudah izin (...)

1347. KETUA: SALDI ISRA [02:51:32]

Ini aneh nih, orang kepala desa (...)

**1348. BAWASLU: ZULKIFLI NASIB MARULI TUA LUMBANGAOL
[02:51:36]**

Bukan ... bukan kepala desa, Majelis, yang menjadi MC, tapi (...)

1349. KETUA: SALDI ISRA [02:51:42]

Apa dia?

**1350. BAWASLU: ZULKIFLI NASIB MARULI TUA LUMBANGAOL
[02:51:43]**

Aparatur pembantu desa.

1351. KETUA: SALDI ISRA [02:51:47]

Apar (...)

**1352. BAWASLU: ZULKIFLI NASIB MARULI TUA LUMBANGAOL
[02:51:47]**

Bukan kepala desanya, kalau kepala desanya, tidak terbukti dia melakukan MC, kepala desa.

1353. KETUA: SALDI ISRA [02:51:52]

Ini (...)

**1354. BAWASLU: ZULKIFLI NASIB MARULI TUA LUMBANGAOL
[02:51:52]**

Yang kepala desa, tidak ada MC, Majelis.

1355. KETUA: SALDI ISRA [02:51:54]

Bukan kepala desa yang jadi MC, itu?

**1356. BAWASLU: ZULKIFLI NASIB MARULI TUA LUMBANGAOL
[02:51:55]**

Bukan, bukan, bukan, bukan.

1357. KETUA: SALDI ISRA [02:51:57]

Oke. Tapi dia hadir di situ, ya?

1358. BAWASLU: ZULKIFLI NASIB MARULI TUA LUMBANGAOL [02:51:59]

Kepala desanya juga tidak hadir, yang hadir itu adalah ... aparatur itu yang kami periksa, makanya (...)

1359. KETUA: SALDI ISRA [02:52:02]

Ya.

1360. BAWASLU: ZULKIFLI NASIB MARULI TUA LUMBANGAOL [02:52:03]

Bisa kami buk ... tidak bisa kami buktikan bahwa kepala desa yang dilaporkan ini menjadi MC dalam acara itu.

1361. KETUA: SALDI ISRA [02:52:06]

Oke. Tapi yang jadinya aparatnya, ya?

1362. BAWASLU: ZULKIFLI NASIB MARULI TUA LUMBANGAOL [02:52:09]

Apara ... ya, aparat desa yang bukan PNS.

1363. KETUA: SALDI ISRA [02:52:12]

Oke. Jadi minta izin cuti, lalu hadir sebagai MC?

1364. BAWASLU: ZULKIFLI NASIB MARULI TUA LUMBANGAOL [02:52:16]

Ya, begitu dalam keterangannya kepada Bawaslu.

1365. KETUA: SALDI ISRA [02:52:19]

Oke. Apa lagi?

1366. BAWASLU: ZULKIFLI NASIB MARULI TUA LUMBANGAOL [02:52:22]

Baru pelanggaran-pelanggaran yang seperti disampaikan tadi oleh Pemohon soal Anggota PPS, itu setelah kami periksa, kami rekomendasikan ke KPU, baru dia mengajukan surat pengunduran diri.

1367. KETUA: SALDI ISRA [02:52:35]

Oke. Itu setelah Anda periksa?

1368. BAWASLU: ZULKIFLI NASIB MARULI TUA LUMBANGAOL [02:52:36]

Ya, setelah kami melakukan pemeriksaan.

1369. KETUA: SALDI ISRA [02:52:38]

Hasil pemeriksaan apa Anda? Apa hasilnya?

1370. BAWASLU: ZULKIFLI NASIB MARULI TUA LUMBANGAOL [02:52:41]

Hasil pemeriksaan ini, temuan bahwa memang dalam SK, dia terbukti ada masuk dalam SK Tim Pemenangan 02.

1371. KETUA: SALDI ISRA [02:52:46]

Oke. Berarti kalau (...)

1372. BAWASLU: ZULKIFLI NASIB MARULI TUA LUMBANGAOL [02:52:47]

Baru yang berikutnya, penanganan pelanggaran kami yang seperti[sic!] disampaikan tadi, yang netralitas ASN.

1373. KETUA: SALDI ISRA [02:52:53]

Ya.

1374. BAWASLU: ZULKIFLI NASIB MARULI TUA LUMBANGAOL [02:52:53]

Itu juga terbukti kami ... dalam bentuk pelanggaran dan sudah kami rekomendasikan ke Pj. Bupati untuk ditindak, tapi sampai saat ini belum ditindak.

1375. KETUA: SALDI ISRA [02:53:03]

Oke.

**1376. BAWASLU: ZULKIFLI NASIB MARULI TUA LUMBANGAOL
[02:53:03]**

Itu saja dalam bentuk pelanggaran yang dalam dalil Pemohon yang bisa kami jelaskan. Yang selebihnya, yang dilaporkan oleh Pemohon terhadap Bawaslu, tidak kami register karena tidak ... kurang alat bukti dan berbagai macam ... kurang alat bukti pendukung untuk medu ... mendukung laporan daripada Pemohon.

1377. KETUA: SALDI ISRA [02:53:23]

Ini semuanya ada surat rekomendasi, ya?

**1378. BAWASLU: ZULKIFLI NASIB MARULI TUA LUMBANGAOL
[02:53:25]**

Ya, Majelis.

1379. KETUA: SALDI ISRA [02:53:26]

Oke, terima kasih. Ada lagi?

**1380. BAWASLU: ZULKIFLI NASIB MARULI TUA LUMBANGAOL
[02:53:28]**

Cukup, Majelis.

1381. KETUA: SALDI ISRA [02:53:29]

Oke. Terima kasih kalau begitu. Silakan, sekarang selesai. Anda bisa berga ... berganti dengan Pihak lain.

Terakhir, 257 PHPU Gubernur Sulawesi Selatan. Silakan. Pihak Terkait Sulawesi Selatan? Oke, silakan.

1382. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [02:55:06]

Terima kasih, Yang Mulia.
Mohon izin, Pihak Termohon hadir.

1383. KETUA: SALDI ISRA [02:55:11]

Sudah lama saya tidak mendengar suara Pak Hifdzil Alim ini.

1384. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [02:55:14]

Siap, Yang Mulia.

1385. KETUA: SALDI ISRA [02:55:15]

Silakan.

1386. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [02:55:16]

Hadir Prinsipal, Bapak Ahmad Adiwijaya, Kadiv[sic!] Teknis dan Penyelenggaraan. Didampingi Kuasa Hukum, saya Hifdzil Alim dari Firma Hicon.

Izin menyampaikan jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 257.

Mohon izin, Yang Mulia, kami tidak membacakan semuanya. Namun demikian, semua yang terdapat dalam jawaban kami, mohon dianggap telah dibacakan poin-poin yang kami sampaikan.

Yang pertama, mengenai Eksepsi Termohon.

1387. KETUA: SALDI ISRA [02:55:49]

Ya.

1388. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [02:55:50]

Kami menyampaikan 3 Eksepsi mengenai Kewenangan Mahkamah, kemudian Kedudukan Hukum Pemohon, dan Obscur Libel terhadap Permohonannya.

Terhadap Kewenangan Mahkamah, mohon dianggap telah dibacakan, Yang Mulia.

Kemudian terkait dengan Eksepsi mengenai Kedudukan Hukum Pemohon. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena perolehan suaranya dengan peserta terbanyak, jauh melebihi ambang batas, sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Pemilihan.

Kemudian selanjutnya, yang ketiga. Mengenai Permohonan Pemohon tidak jelas, kami mulai di halaman 8. Pada pokoknya ada beberapa hal yang pertama di halaman 10 bahwa berdasarkan PMK Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8[sic!] ... maaf Nomor 3 Tahun 2024 Pasal 8 ayat (3) bahwa hal-hal yang dimohonkan atau dalam petitum itu memuat antara lain. Permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Di dalam dalil Permohonan Pemohon, di dalam Petitumnya tidak disebutkan perolahan suara yang benar menurut Pemohon berapa, hanya meminta diskualifikasi terhadap pasangan calon.

Kemudian yang berikutnya, terhadap hal-hal yang masuk dalam eksepsi selengkapnya mohon dianggap telah dibacakan.

1389. KETUA: SALDI ISRA [02:57:23]

Ya, lanjut.

1390. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [02:57:24]

Selanjutnya, Yang Mulia.

Dalam Pokok Permohonan.

Bahwa dalam Pokok Permohonan kami memulainya di halaman 14 bahwa segala hal yang termuat pada bagian Dalam Eksepsi di atas, mohon kiranya secara mutatis, mutandis tetap menjadi satu kesatuan.

Kemudian yang berikutnya, dalam dalil Permohonan Pemohon, Pemohon mendalilkan adanya anomali jumlah surat suara tidak sah dalam Pilkada Tahun 2024 di tempat pemungutan suara di Kota Makassar. Ini terdapat di halaman 23 sampai dengan halaman 25 permohonan (...)

1391. KETUA: SALDI ISRA [02:57:59]

Pak, Hifdzil Alim, DPT Kota Makassar, berapa jumlahnya?

1392. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [02:58:02]

DPT Kota Makassar (...)

1393. KETUA: SALDI ISRA [02:58:07]

Ada, enggak? Bisa ... Pak KPU, bisa jawab enggak?

1394. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [02:58:12]

Kami cek datanya, Yang Mulia.

1395. KETUA: SALDI ISRA [02:58:43]

Ada ketemu angkanya?

1396. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [02:58:44]

Ada.

1397. TERMOHON: AHMAD ADIWIJAYA [02:58:50]

Izin, Yang Mulia.

1398. KETUA: SALDI ISRA [02:58:51]

Ya.

1399. TERMOHON: AHMAD ADIWIJAYA [02:58:52]

Terkait dengan jumlah DPT yang ada di Kota Makassar itu sejumlah 1.037.164.

1400. KETUA: SALDI ISRA [02:59:02]

1.037.1 (...)

1401. TERMOHON: AHMAD ADIWIJAYA [02:59:07]

64[sic!].

1402. KETUA: SALDI ISRA [02:59:07]

Oke lanjut.

1403. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [02:59:15]

Mohon izin melanjutkan.

1404. KETUA: SALDI ISRA [02:59:16]

Ya.

1405. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [02:59:17]

Yang Mulia. Terhadap dalil terbut ... terhadap dalil mengenai anomali jumlah surat ... apa namanya ... surat suara tidak sah, telah menjelaskan di dalam jawaban bahwa tidak ada surat terhadap anomali tersebut. Sampai saat ini, memang tidak ada rekomendasi dari Bawaslu Sulawesi Selatan mengenai anomali surat suara tidak sah.

Kemudian selanjutnya dalil Pemohon mengenai netralitas dugaan pelanggaran netralitas ASN yang disebutkan oleh Pemohon pada halaman 26 sampai dengan halaman 32 Permohonan, kami menjawabnya di halaman ... mulai halaman 16, jawaban Termohon.

Pada pokoknya adalah soal netralitas, itu sudah diatur lebih teknis dalam Surat Keputusan Berdas ... Bersama antara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, kemudian Kepala Badan Kepegawaian Negara, kom ... Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022 dan seterusnya.

Prinsipnya adalah kita ... kami kemudian menilai bahwa terhadap dalil dugaan pelanggaran netralitas ASN, di halaman 19 jawaban kami. Apabila Pemohon mendalilkan adanya keterlibatan ASN dalam mendukung Paslon Nomor Urut 2, itu mengakibatkan adanya pelanggaran administrasi secara struktur, sistematis, dan masif. Bagi kami ... bagi kami, Berdasarkan Surat Edaran ... Surat Keputusan Bersama tersebut, mestinya diajukan ke BKN atau ke Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, apabila dalilnya dugaan netralitas itu dilakukan sebelum penetapan paslon, itu disampaikan ke BKN, apabila setelah penetapan paslon itu disampaikan ke Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan.

Selanjutnya, dalil Pemohon mengenai manipulasi Daftar Hadir Pemilih Tetap secara masif di Sulawesi Selatan, yang disampaikan pada halaman 41 sampai dengan halaman 97 Permohonan Pemohon. Kami menjawabnya ... Termohon menjawabnya mulai dari halaman 20, jawaban.

Pada pokoknya adalah dalil Pemohon mengenai manipulasi Daftar Hadir Pemilih Tetap secara masif di Sulawesi Selatan adalah tidak benar. Termohon tidak pernah melakukan manipulasi dalam bentuk apa pun, baik data maupun Proses Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024.

Termohon mendalilkan manipulasi daftar hadir pada 32 Kelurahan dan 15 Kecamatan di Kota Makassar, yang Termohon lakukan adalah menyandingkan masing-masing Kelurahan maupun Kecamatan di Kota Makassar itu, sehingga head-to-head dengan dalil Pemohon mulai dari Kecamatan Tallo, lalu kemudian selanjutnya ada di (...)

1406. KETUA: SALDI ISRA [03:02:25]

Itu membludak itu, apa tuh gambarannya, Pak Hifdzil Alim? Ini kan di beberapa TPS ini membludak datangnya.

1407. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [03:02:33]

Ya, Yang Mulia.

1408. KETUA: SALDI ISRA [03:02:34]

Apa? Bagaimana menjelaskan membludak itu?

1409. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [03:02:36]

Jadi pada saat itu, berdasarkan klarifikasi yang dilakukan kepada KPPS di KPPS ... di ... apa namanya ... TPS yang dimaksud tersebut TPS Bodoa ... TPS Bodoa, TPS 13 Kaluku Bodoa, itu memang banyak sekali para pemilih yang hadir secara bersamaan, karena waktu itu yang dipilih adalah ingin memilih pagi, kenapa memilih pagi? Karena setelah memilih, mereka langsung bekerja.

1410. KETUA: SALDI ISRA [03:03:07]

Bekerja? Kan hari libur, Pak.

1411. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [03:03:10]

(Ucapan tidak terdengar jelas), Yang Mulia.

1412. KETUA: SALDI ISRA [03:03:11]

Ya.

1413. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [03:03:12]

Ya, (ucapan tidak terdengar jelas).

1414. KETUA: SALDI ISRA [03:03:14]

(Ucapan tidak terdengar jelas) kan hari libur, diliburkan ketika pemungutan suara.

1415. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [03:03:16]

Betul, betul, betul. Membludak (...)

1416. KETUA: SALDI ISRA [03:03:18]

Bekerja apa itu?

1417. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [03:03:20]

Betul. Melakukan pencomblo ... karena yang di hasil klarifikasi itu ... karena selain itu, mereka (...)

1418. KETUA: SALDI ISRA [03:03:25]

Enggak, membludak itu apakah melebihi dari jumlah DPT atau tidak? Nah, itu pertanyaannya.

1419. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [03:03:30]

Tidak, Yang Mulia.

1420. KETUA: SALDI ISRA [03:03:30]

Ha?

1421. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [03:03:31]

Tidak, Yang Mulia.

1422. KETUA: SALDI ISRA [03:03:32]

Tidak, ya.

1423. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [03:03:32]

Tidak. Jadi (...)

1424. KETUA: SALDI ISRA [03:03:33]

Tapi ini kebetulan datang (...)

1425. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [03:03:34]

Mereka (...)

1426. KETUA: SALDI ISRA [03:03:36]

Pada waktu yang bersamaan begitu, ya.

1427. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [03:03:37]

Betul.

1428. KETUA: SALDI ISRA [03:03:37]

Karena mungkin mau libur dan segala macam.

1429. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [03:03:40]

Ya, ingin liburan. Kemudian yang kedua, juga harus menjaga rumah yang ditinggalkannya.

Berdasarkan hasil klarifikasi, demikian, Yang Mulia.

1430. KETUA: SALDI ISRA [03:03:47]

Alasannya begitu semua?

1431. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [03:03:48]

Betul, Yang Mulia. Di halaman 25, kami sampaikan begitu.

1432. KETUA: SALDI ISRA [03:03:52]

Soalnya begini lho, ini kalau yang didalilkan itu tidak dibantah. Nah, itu kan jumlah sejuta itu, itu kan signifikan. Nah, makanya kami ingin dapat penjelasan yang agak lebih komprehensif dari Termohon, berkaitan dengan ini. Kan, di situ itu pemilih begini, banyak tanda tangan yang sama, dan segala macam. Nah, itu yang kami perlukan penjelasannya, Pak Hifdzil Alim. Ya? Nah, itu. Tolong itu dijelaskan agak detail. Oke, silakan!

Ini kan misalnya, orang datang, Kota Makassar itu kan buk ... bukan kota yang tingkat pendidikannya lebih rendah dibanding kota lain kalau di Sulawesi Selatan, sama Padang kalau Sumatera Barat, misalnya. Masa orang datang memilih, lalu tidak tanda tangan dengan jumlah yang banyak? Nah, itu harus dikasih rasionya ke kami, dengan bukti-bukti yang kuat.

Silakan! Apa yang bisa KPU jelaskan? KPU sebagai pemain utama, coba jelaskan. Kalau 1, 2 lupa, itu masih masuk akal. Tapi kalau puluhan orang tidak tanda tangan dalam satu TPS, itu pertanyaan besar.

1433. TERMOHON: AHMAD ADIWIJAYA [03:05:10]

Baik, terima kasih.

1434. KETUA: SALDI ISRA [03:05:13]

Ya.

1435. TERMOHON: AHMAD ADIWIJAYA [03:05:14]

Yang Mulia. Memang di jawaban yang kami buat, Yang Mulia, memang faktanya di lapangan bahwa terjadi di beberapa TPS, dimana ada penumpukan pemilih yang datang secara bersamaan di waktu tertentu (...)

1436. KETUA: SALDI ISRA [03:05:34]

Pak, orang kalau menumpuk datang, kan ndak menumpuk datang ke tempat pemungutan suara langsung, kan? Ke bilik suara itu. Tetap saja (...)

1437. TERMOHON: AHMAD ADIWIJAYA [03:05:40]

Ya.

1438. KETUA: SALDI ISRA [03:05:40]

Bergilir, kan?

1439. TERMOHON: AHMAD ADIWIJAYA [03:05:41]

Ya, tetap.

1440. KETUA: SALDI ISRA [03:05:41]

Gilir, keluar, tanda tangan, kan?

1441. TERMOHON: AHMAD ADIWIJAYA [03:05:43]

Siap, Yang Mulia.

1442. KETUA: SALDI ISRA [03:05:44]

Apa rasionya, orang bisa sebanyak itu tidak tanda tangan?

1443. TERMOHON: AHMAD ADIWIJAYA [03:05:50]

Ya. Kalau penjelasan dari kabupaten/kota, Yang Mulia (...)

1444. KETUA: SALDI ISRA [03:05:54]

Ya.

1445. TERMOHON: AHMAD ADIWIJAYA [03:05:54]

Apa yang disampaikan di jawaban. Bahwa memang (...)

1446. KETUA: SALDI ISRA [03:06:00]

Bawaslu.

1447. TERMOHON: AHMAD ADIWIJAYA [03:06:01]

Berbagai alasan (...)

1448. KETUA: SALDI ISRA [03:06:02]

Sebentar, saya mau tanya Bawaslu. Apa hasil pengawasan Saudara tentang hal ini? Kan ada pengawas di tiap TPS, kan?

1449. BAWASLU: MARDIANA RUSLI [03:06:11]

Izin, Yang Mulia.

1450. KETUA: SALDI ISRA [03:06:11]

Ya.

1451. BAWASLU: MARDIANA RUSLI [03:06:12]

Menjelaskan. Kami melakukan pengawasan di 14.548 seluruh[sic!] Sulsel dan juga di Kota Makassar. Dari hasil laporan pengawasan yang kami terima dari pet ... pengawas TPS, sebenarnya penyebab dari suara tidak sah dan sah adalah variatif. Yang pertama adalah keliru mencoblos.

1452. KETUA: SALDI ISRA [03:06:34]

Ya.

1453. BAWASLU: MARDIANA RUSLI [03:06:35]

Dan kedua adalah salah ... adanya kertas suara yang rusak.

1454. KETUA: SALDI ISRA [03:06:39]

Yang ini, persoalan yang saya tanya itu belum di situ. Ini orang datang mencoblos tidak tanda tangan dan jumlahnya banyak, dan itu

sebagiannya di Kota Makassar. Nah, apa yang bisa Ibu jelaskan itu sebagai pengawas?

1455. BAWASLU: MARDIANA RUSLI [03:06:51]

Baik. Izin, Yang Mulia. Di beberapa TPS sebenarnya variatif kasusnya. Misalnya ada TPS yang terjadi, pemilih yang datang kemudian mencatatkan dalam daftar hadir, tetapi dia kembali lagi. Sehingga pada saat selesai pembukaan suara, itu tidak menggunakan hak pilihnya.

Nah, yang kedua adalah ... itu yang rata-rata kita temukan informasi bahwa adanya perlakuan pen ... pengawas KPPS yang tidak memberikan ruang kepada pemilih jika dia tidak membawa C.Pemberitahuan, meski memiliki KTP elektronik.

1456. KETUA: SALDI ISRA [03:07:30]

Ya. Yang orang tidak tanda tangan itu apa penjelasannya, Bu, yang banyak-banyak itu?

1457. BAWASLU: MARDIANA RUSLI [03:07:36]

Variatif. Yang 2 tadi, poinnya, Majelis.

1458. KETUA: SALDI ISRA [03:07:41]

Bu, kalau kita mengawasi itu, orang keluar bilik suara, cek, masukkan hasilnya ke kotak suara, kemudian kan dikasih ... apa namanya (...)

1459. BAWASLU: MARDIANA RUSLI [03:07:51]

Tinta.

1460. KETUA: SALDI ISRA [03:07:51]

Tanda itu, kan.

1461. BAWASLU: MARDIANA RUSLI [03:07:52]

Ya, KPPS 7.

1462. KETUA: SALDI ISRA [03:07:53]

Tanda tangan setelah itu, kan?

1463. BAWASLU: MARDIANA RUSLI [03:07:55]

Benar. Benar, Yang Mulia.

1464. KETUA: SALDI ISRA [03:07:57]

Sebelumnya tanda tangan, kan?

1465. BAWASLU: MARDIANA RUSLI [03:07:57]

Sebelum tanda tangan (...)

1466. KETUA: SALDI ISRA [03:07:59]

Ya. Sebelum tanda tangan ... sebelumnya tanda tangan. Nah, ini kan menjadi aneh (...)

1467. BAWASLU: MARDIANA RUSLI [03:08:03]

Ya.

1468. KETUA: SALDI ISRA [03:08:03]

Masa orang belum tanda tangan (...)

1469. BAWASLU: MARDIANA RUSLI [03:08:03]

Izin, Yang Mulia (...)

1470. KETUA: SALDI ISRA [03:08:03]

Sudah dikasih masuk bilik suara?

1471. BAWASLU: MARDIANA RUSLI [03:08:06]

Sebelum tanda tangan, dipersilakan untuk antrian duduk di tempat yang telah disediakan.

1472. KETUA: SALDI ISRA [03:08:10]

Ya. Menunggu giliran (...)

1473. BAWASLU: MARDIANA RUSLI [03:08:11]

Menunggu giliran, benar.

1474. KETUA: SALDI ISRA [03:08:12]

Masuk ke tempat kotak suara, kan?

1475. BAWASLU: MARDIANA RUSLI [03:08:13]

Ya.

1476. KETUA: SALDI ISRA [03:08:14]

Nah, itu. Kalau sebanyak itu, apa yang bisa Ibu jelaskan sebagai pengawas? Enggak bisa?

1477. BAWASLU: MARDIANA RUSLI [03:08:23]

Karena sebenarnya kasusnya berbeda-beda di beberapa TPS-nya (...)

1478. KETUA: SALDI ISRA [03:08:26]

Ya, berbeda-bedanya. Tapi yang saya tanya, yang ini, Ibu.

1479. BAWASLU: MARDIANA RUSLI [03:08:27]

Ya.

1480. KETUA: SALDI ISRA [03:08:30]

Kalau 1, 2 orang tidak tanda tangan, make sense?

1481. BAWASLU: MARDIANA RUSLI [03:08:33]

Ya.

1482. KETUA: SALDI ISRA [03:08:33]

Mungkin lupa, ya. Tapi kalau ada segorombolan yang tidak tanda tangan, apa yang bisa menjelaskan, ini?

1483. BAWASLU: MARDIANA RUSLI [03:08:42]

Tentu dari sisi pengawasannya, kami akan mem ... memproses terkait dengan ada kemungkinan potensi penanganan pelanggaran administrasi.

1484. KETUA: SALDI ISRA [03:08:52]

Oke, nanti saya akan ke, Ibu.
Lanjut, KPU. Silakan, Pak Hifdzil.

1485. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [03:09:00]

Selanjutnya, Yang Mulia.

1486. KETUA: SALDI ISRA [03:09:02]

Ya.

1487. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [03:09:02]

Di halaman 26, dalil Pemohon menyatakan masih mengenai ...
apa namanya itu ... daftar hadir.

1488. KETUA: SALDI ISRA [03:09:16]

Ya.

1489. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [03:09:17]

Di halaman 26. Bahwa di Kelurahan Bunga Eja Beru, ada 4 ... ada 5 nama yang didalikan oleh Pemohon dan semua setelah kita klarifikasi melalui KPPS ... KPPS kami, badan ad hoc kami, kemudian nama-nama yang didalikan oleh Pemohon itu, ternyata bertanda tangan sendiri dan mencoblos, jadi tidak sama dengan apa yang disampaikan oleh Pemohon.

Kemudian selanjutnya, di Kecamatan Ujung Pandang, Kelurahan Bulogading, kami mengklarifikasi badan ad hoc kami, KPPS 02 melalui Kadiv Hukum dan Pengawasan Komisioner Kota Makassar, KPU Kota Makassar, kemudian didapatkan hasil klarifikasi bahwa jumlah DPT di TPS 02=467, pemilih yang hadir di TPS sebanyak 242, TPS dibuka pada jam 07.00 WITA sampai dengan jam 14.00 WITA. Kemudian dibuka kembali untuk mela ... mulai proses penghitungan suara pada pukul 14.00 WITA.

Kemudian di TPS 02 terdapat 7 KPPS, PTPS (Pengawas TPS) 1 orang, Saksi Pasangan Calon Gubernur=1 orang, Saksi Pasangan Calon Gubernur Nomor Urut 2 juga 1 ... sebanyak 2 ... 1 orang, dan Saksi Pasangan Calon Wali Kota juga ada 1 orang, Saksi Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Nomor Urut 2=1 orang, dan Saksi Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Nomor Urut 3=1 orang. Seluruh pemilih yang hadir mencoblos di TPS dan menandatangani daftar hadir.

Di TPS 02 tidak ada keberatan dari saksi maupun pengawas TPS, sehingga di ... di ... apa namanya ... KP ... TPS 02 Kelurahan Bulogading tidak ada manipulasi daftar hadir.

Mohon izin, Yang Mulia. Hal-hal tersebut, klarifikasi-klarifikasi itu kami sampaikan secara lengkap di dalam jawaban kami dan untuk beberapa TPS yang ... yang disebutkan dalam klarifikasi, mohon dianggap telah dibacakan karena itu berkaitan dengan data-data atau keterangan yang kami sampaikan, dan keterangannya, semuanya kita bantah mengenai dalil Pemohon, mengenai daftar hadir yang direkayasa dan seterusnya.

Selanjutnya (...)

1490. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:11:38]

Pak Hifdzil, ya.

1491. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [03:11:40]

Siap, Yang Mulia.

1492. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:11:41]

Ini soal daftar hadir yang direkayasa. Ini kan, Mahkamah ini kan, memeriksa dan mengadili 310 Permohonan (...)

1493. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [03:11:52]

Ya.

1494. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:11:52]

Sengketa Pilkada. Yang kami temukan itu, biasanya ya, Pak Hifdzil, ya. Ada TPS dimana seluruh pemilih enggak tanda tangan, terus ada juga yang kemudian ditandatangani oleh KPPS. Tapi bagaimana Anda menjelaskan, kalau ada di TPS, satu TPS, ada yang tanda tangan dan sekelompok pemilih tidak tanda tangan. Itu menjelaskannya bagaimana? Kalau itu tidak tanda tangan semua, kami malah ngerti. Berarti KPPS-nya enggak paham ini, dengan kerja ... apa ... KPPS. Itu ada di beberapa tempat, termasuk dalam sengketa Pileg juga begitu, ya. Jadi KPPS-nya ini enggak ngerti bahwa yang pemilih itu masuk, ketika diberi itu harus tanda tangan, itu kami bisa ngerti. Tetapi kalau ada, ya, katakanlah 300 pemilih, terus ada 100 yang tidak tanda tangan itu menjelaskannya bagaimana kira-kira?

1495. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [03:12:58]

Izin, Yang Mulia (...)

1496. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:13:00]

Itu yang ... yang saya kira ... apa ... Termohon, KPU Sulsel harus menjelaskan ini kepada Mahkamah.

1497. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [03:12:55]

Ya. Izin, Yang Mulia. Dari dalil yang disampaikan oleh Pemohon, sebanyak 65 pemilih itu, memang ada 14 pemilih yang mencoblos dan bertanda tangan. Jadi, tidak semuanya tidak bertanda tangan atau semuanya bertanda tangan. Nah, 14 pemilih itu mencoblos dan bertanda tangan sendiri, kemudian 51 pemilih, itu mencoblos, tapi tidak bertanda tangan. Berdasarkan klarifikasi yang kami lakukan, memang yang disampaikan oleh KPPS bahwa prosedurnya Pemohon datang mengumpulkan ... menumpuk c ... C.Pemberitahuan, terlebih dahulu.

1498. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:13:26]

Ya.

1499. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [03:13:27]

Nah, kemudian setelah itu, mereka ingin cepat-cepat ingin mencoblos. Padahal sudah diingatkan oleh ... apa ... badan ad hoc kami untuk antre, Yang Mulia.

1500. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:13:44]

Oh, ya.

1501. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [03:13:47]

Ya.

1502. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:13:50]

Ya, kan kita semua memilih. Saya juga memilih, ya.

1503. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [03:13:50]

Ya.

1504. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:13:51]

Waktu Pilgub DKI. Ngantre juga, gitu kan. Datang ke TPS, masuk kan (...)

1505. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [03:13:55]

Ya.

1506. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:13:58]

Kita kan, terus diminta C-6 nya, kan? Diminta C-6 karena banyak kan ditumpuk dulu, ya kan. Kemudian duduk, nunggu. Begitu kemudian dipanggil, ya kan, tanda tangan, ya kan. Tanda tangan dan kemudian diberi kertas suara. Pergilah kita ke bilik. Coblos, masukkan, kembali, nyelup jari, baru keluar. Lah ini, kalau ada yang seperti itu, bagaimana? Dia kok bisa kasih kertas suara, ya. Sementara dia enggak tanda tangan. Itu lho. Itu kalau enggak tanda tangan, bagaimana itu? Nanti kalau datang lagi terus saya belum nyoblos, gitu ya. Dengan KTP kan boleh, jam 12. Gitu, kan?

1507. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [03:14:45]

Ya.

1508. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:14:46]

Bagaimana itu?

1509. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [03:14:48]

Tapi pengamannya (...)

1510. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:14:46]

Apalagi kalau ... kalau terus enggak nyelip ... enggak nyelup.

1511. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [03:14:48]

Pengamannya, Yang Mulia.

1512. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:14:47]

He eh.

1513. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [03:14:49]

Dari kasus berdua itu ... pe ... apa namanya ... pemilih yang hadir.

1514. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:14:56]

He em.

1515. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [03:14:58]

Meskipun dia tidak bertanda tangan.

1516. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:14:58]

He em.

1517. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [03:14:59]

Itu mencelupkan kelingkingnya, Yang Mulia.

1518. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:14:57]

Oke.

1519. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [03:14:59]

Berdasarkan hasil karifikasi yang kami lakukan. Jadi, memang situasinya waktu itu kami di luar kendali. Yang faktanya adalah sebagaimana disampaikan klarifikasi oleh KPPS 4 dan KPPS 5, itu semuanya ingin cepat-cepat. Salah satu alasannya adalah ingin menjaga rumahnya yang ditinggalkannya.

1520. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:15:19]

Oke, secara kumulatif, berapa itu yang kasus seperti itu? Secara kumulatif itu? Ketahuan enggak?

1521. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [03:15:30]

Kalau yang berdasarkan ... apa namanya ... setelah ada dalil dari Permohonan itu, yang kami lakukan klarifikasi itu terhadap apa yang ditetapkan oleh Pemohon, Yang Mulia.

1522. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:15:39]

Ya, oke. Berapa itu?

1523. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [03:15:42]

Hanya satu TPS saja, Yang Mulia.

1524. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:15:44]

Satu TPS, gitu ya. Oke.
Oke. Apa yang lain, silakan.

1525. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [03:15:51]

Selanjutnya, Yang Mulia.

Mengenai Dalil Pemohon bahwa di halaman 51. Bahwa Pemohon menuduh Termohon dan jajarannya serta secara sistematis tidak melakukan distribusi sebagian Formulir C-6 atau formulir pemberitahuan kepada pemilih. Menurut Termohon itu tidak benar, Yang Mulia. Karena tidak terdistribusinya C Pemberitahuan bukan karena Termohon tidak mendistribusikan, tetapi karena ada beberapa hal, karena pemilih meninggal dunia, pindah alamat, pindah pemilih, atau pemilih tidak dikenal. Jadi, sampai dilaksanakannya pemungutan suara. Kami tidak mendapatkan saran perbaikan atau tidak mendapatkan rekomendasi apa pun dari Bawaslu terhadap Formulir C Pemberitahuan, yang tidak terdistribusi. Jadi sebenarnya bukan tidak terdistribusi, kami distribusikan, tetapi ketika kami mendistribusikan di lapangan, ternyata ditemukan beberapa ... beberapa hal, ada pemilih yang meninggal dunia, ketika meninggal, maka tidak kami berikan. Kemudian ada yang pindah alamat, ada yang pindah pemilih, dan pemilih tidak dikenal.

Demikian, Yang Mulia. Beberapa dalil Pemohon yang kami jawab di dalam jawaban kami.

1526. KETUA: SALDI ISRA [03:17:06]

Oke, masih ada yang mau ditambahkan?

1527. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [03:17:0]

Cukup, Yang Mulia. Selanjutnya kami membacakan Petitem.

1528. KETUA: SALDI ISRA [03:17:12]

Silakan.

1529. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [03:17:13]

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok permohonan.

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3.119 Tahun 2024 tentang Penetapan Perlengkapan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 bertanggal 8 Desember 2024 pukul 23.20 WITA.

Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 yang benar, mohon dianggap dibacakan.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat takzim kami, Termohon beserta Kuasa Hukumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

1530. KETUA: SALDI ISRA [03:18:10]

Walaikumsalam. wr. wb. Terima kasih Termohon, melalui Kuasa Hukumnya.

Selanjutnya Pihak Terkait, dipersilakan.

1531. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 257/PHPU.GUB-XXIII/2025: DAMANG [03:18:23]

Terima Kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

1532. KETUA: SALDI ISRA [03:18:26]

Walaikumsalam.

1533. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 257/PHPU.GUB-XXIII/2025: DAMANG [03:18:27]

Saya Kuasa Hukum Pihak Terkait atas nama Damang bersama dengan Pak Anwar. Saya akan menyampaikan pokok-pokoknya saja, Yang Mulia.

1534. KETUA: SALDI ISRA [03:18:37]

Ya.

1535. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 257/PHPU.GUB-XXIII/2025: DAMANG [03:18:37]

Terkait dengan perkara ini, yang pertama mengenai Kewenangan Mahkamah. Mahkamah pada hakikatnya berwenang untuk memeriksa mengadili, tetapi karena ini mengenai dugaan netralitas ASN, manipulasi daftar pemilih, dan dugaan menahan pendistribusian C Pemberitahuan KWK, tidak dapat dibuktikan TSM-nya, melainkan terjadi secara sporadis, sehingga Mahkamah sepatutnya tidak menerima permohonan a quo.

Kemudian, mengenai Kedudukan Hukum, pada hakikatnya, Pemohon tidak masuk dalam batas ... ambang batas sebagaimana dimaksudkan Pasal 158 Undang-Undang Pemilihan. Dengan persentase 1%, yaitu harus dalam batas 46.143 suara. Tetapi selisihnya adalah=1.414.226.

Kemudian, mengenai obscur libel. Di Permohonan Pemohon, mengatakan bahwa ada 308 TPS di sekitar Kota Makassar, terjadi manipulasi Daftar Hadir Pemilu[sic!] Tetap ... Pemilih Tetap. Tetapi ketika kami mengecek tabelnya untuk bagian Kota Makassar, itu hanya 39 TPS di halaman 42 sampai dengan 81. Itu artinya, Posita, Dalil Posita itu bertentangan satu sama lain. Mengatakan 308 TPS terjadi manipulasi DPHT, sementara ditampilkan tabel untuk Makassar itu hanya 39 TPS. Yang pertama.

Kemudian yang kedua, di 19 kabupaten, disoal juga mengenai manipulasi Daftar Hadir Pemilih Tetap. Tetapi, jadi ... banyak bagiannya yang tidak mencantumkan bahwa itu terjadi di TPS yang mana. Setelah kami mengecek, itu jumlah keseluruhan TPS yang disoal sebenarnya 317 TPS yang disoal dari kabupaten/kota, itu dari 20 kabupaten/kota. DPT dari 317 TPS itu, kami telah sampaikan dalam tabel, itu 146.177 ... 146.177 DPT-nya dari 317 TPS yang ditampilkan dalam tabel oleh Saudara Pemohon.

Artinya apa? Meskipun seluruh suara dari DPT itu diberikan, tidak akan mengubah selisih dari satu ... selisih dari antara Pemohon dengan Pihak Terkait.

Sekarang, Yang Mulia. Saya masuk ke Pokok Permohonan.

Yang pertama, Pemohon mendalilkan mengenai anomali suara tidak sah berangkat dari hipotesis bahwa kalau pasangan calonnya banyak, itu justru potensi suara tidak sah yang lebih banyak. Kalau yang kurang, potensi suara tidak sah sedikit. Dia berangkat dari hipotesis itu.

Kami Pihak Terkait menganggap itu hipotesis kalau dalam ilmu hukum itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi itu adalah gejala

sosial. Tidak bisa dipandang sebagai peristiwa hukum. Dari situ dia berangkat bahwa terjadi penggembosan suara yang katanya suara tidak sah itu suara sahnya Pemohon, kemudian dijadikan tidak sah. Itu berangkat dari hipotesis yang sebenarnya bukan dalam hipotesis hukum yang sifatnya sugeneris, tapi itu berangkat dari hipotesis yang sifatnya gejala sosial. Sehingga, dalil itu patut dikesampingkan, Yang Mulia.

Kemudian yang kedua, mengenai Pj Guber ... Gubernur yang mengatakan hanya ada 22. Sekali lagi, kalau yang begini, Pihak Terkait tidak terlibat dalam peristiwa itu, sehingga tidak bisa dihubungkan antara tindakan Pj kalau memang ada, dengan perolehan suara untuk Pihak Terkait.

Kemudian yang kedua, Jalan Sehat Pj Gubernur dan Pj Bupati Soppeng itu terkait dengan peringatan hari ulang tahun yang sama sekali tidak ada kampanye di situ untuk Calon Gubernur Paslon 02. Bahkan kegiatan itu untuk adalah bagian dari pemecahan Rekor Muri, sebagaimana tercatat dalam, makanya ada pencatatan untuk beberapa orang yang ikut digerak jalan sehat itu karena ingin memecahkan Rekor Muri.

Kemudian, percepatan perekaman e-KTP. Ini peristiwanya dimulai dari Rekordnas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024. Kemudian, ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Nomor 400 dan seterusnya terkait dengan perekaman e-KTP siswa siswa se-Kota Makassar.

1536. KETUA: SALDI ISRA [03:23:56]

Itu, di halaman berapa, Pak? Di (...)

1537. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 257/PHPU.GUB-XXIII/2025: DAMANG [03:23:58]

Di (...)

1538. KETUA: SALDI ISRA [03:24:52]

Keterangan Pihak Terkait.

1539. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 257/PHPU.GUB-XXIII/2025: DAMANG [03:24:01]

Ya. Di halaman 14, Yang Mulia.

1540. KETUA: SALDI ISRA [03:24:08]

Halaman 14?

1541. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 257/PHPU.GUB-XXIII/2025: DAMANG [03:24:10]

Ya.

1542. KETUA: SALDI ISRA [03:24:11]

Oke.

1543. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 257/PHPU.GUB-XXIII/2025: DAMANG [03:24:13]

Berdasarkan surat edaran, jadi ada dasarnya, kemudian untuk percepatan perekaman, yang kemudian bisa diikuti ke Pilkada, jadi tidak ada hubungannya dengan ini yang diuntungkan.

Kemudian, perekat ... perekaman e-KTP juga meng ... untuk warga binaan pemasyarakatan, itu berdasarkan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Permendagri Nomor 96 Tahun 2019, itu ada di halaman 15, Yang Mulia, bahwa bagian dari sal ... salah satu juga yang menjadi perhatian untuk perekaman itu adalah di lembaga pemasyarakatan.

Nah, kemudian ada salah satu yang didalilkan mengenai Yarham Yasmin ... Yarham Yasmin, memang, itu terbukti berdasarkan Pasal 71 juncto, Pasal 188 Undang-Undang Pemilihan, dengan masa per ... dengan hukuman penjara 3 bulan masa percobaan. Tapi kalau kita baca putusan itu, tidak ada sama sekali keterlibatan, keturutsertaan, misalnya dalam deelhening-nya, apakah dia, misalnya ... apa ... ada ... apakah dia turut serta pembantuan, tidak ada di putusan itu terbaca. Sehingga, sama sekali tidak bisa dihubungkan perbuatan itu, yang sudah terbukti melalui putusan pengadilan dengan Pihak Terkait.

Terakhir, saya ingin mengatakan, dengan mengutip asas nemo punitur pro alieno delicto, tidak ada seorang pun yang bisa dihukum karena perbuatan orang lain.

Kemudian, terkait dengan dugaan Pemohon, kolusi, nepotisme, dan pork barrel. Nah, saya ingin mengutip salah satu keterangan ahli, Harjono ... Dr. Harjono di Putusan MK 33/2015, ketika disinggung mengenai kolusi, nepotisme, pork barrel dihubungkan dengan petahana. Di situ dikatakan, seseorang tidak mempunyai pilihan untuk dilahirkan oleh ibu siapa, demikian juga untuk memilih ayahnya, termasuk mau bersaudara kandung dengan siapa, ini terkait dengan pengujian pasal yang dulu, dinasti politik, kemudian dinyatakan pasal itu inkonstitusional.

Nah, saya masuk di ... mengenai pupuk subsidi. Pupuk subsidi, itu berdasarkan Permendag Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian dengan sumber penganggarnya oleh Kementerian Keuangan, yang menyalurkan itu adalah PT Pupuk Indonesia sebagai perusahaan biomen. Kalau kemarin,

Pemohon mengatakan, bahwa ada sekitar 2 triliun untuk subsidi itu, saya membaca datanya ternyata bukan 2 triliun, justru 4 triliun, tapi ini ndak bisa dianggap sebagai pork barrel, kenapa? Karena ini merata, semua provinsi dapat. Misalnya Jawa Barat 5 triliun, Jawa Tengah 6 triliun, Jawa Timur 8 triliun, Lampung 4 triliun, itu ada di Bukti ... di PT-12, Yang Mulia.

Kemudian, dalam penyaluran itu tidak pernah ada kampanye, tidak ada branding politik terkait dengan penyaluran pupuk itu. Bahkan, Pihak Terkait tidak pernah membawa-bawa yang namanya penyaluran bantuan pupuk subsidi di dalam kampanyenya, sehingga tidak bisa dihubungkan program pemerintah yang di pusat, kemudian disalurkan ke daerah, dianggap sebagai bagian dari pork barrel.

1544. KETUA: SALDI ISRA [03:28:10]

Oke, cukup, Pak. Yang lain apa lagi? Kita pindah dari pupuk ini, nanti kalau pupuk-pupuk terus susah, Pak.

1545. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 257/PHPU.GUB-XXIII/2025: DAMANG [03:28:19]

Ya, Yang Mulia. Saya pindah ke yang Alsintan nya lagi.

1546. KETUA: SALDI ISRA [03:28:22]

Ya.

1547. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 257/PHPU.GUB-XXIII/2025: DAMANG [03:28:22]

Kalau Alsintan, itu berdasarkan Keputusan Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 40 ... Nomor 40.1 dan seterusnya tentang petunjuk teknis penyediaan dan penyaluran bantuan alat dan mesin pertanian Tahun Anggaran 2024. Nah, ada aturannya, ada juknisnya, kemudian ruang lingkupnya itu meliputi kegiatan pengadaan Alsintan prapanen melalui metode Oparsin[sic!].

Kemudian, ada APIP-nya[sic!], jadi petugas tingkat pusat bekerja sama dengan APIP[sic!] untuk pengadaan Alsintan ini. Kemudian, di Bab I dari Keputusan Dirjen itu, kalau kita baca di pendahuluannya, itu salah satu bagian dari ... apa ... kenapa ada pembagian itu? Karena akibat kekeringan dan akibat kemarau dan El Nino ada di Bab I dari Keputusan Dirjen itu.

Kemudian, Yang Mulia. Saya masuk di manipulasi daftar hadir pemilih tetap. Nah, tadi sudah saya mengatakan bahwa selisihnya adalah=1.414.226. TPS yang diuraikan dalam bentuk tabel setelah kami

menelisik semua TPS-nya, 317 TPS, DPT=146.177 dari 317 TPS. Sehingga tidak signifikan kalau mau dipenuhi permintaan untuk PSU dari Saudara Pemohon.

Kemudian, setelah kami membikinkan tabel TPS itu, ada 53 TPS dalam C.Hasil, Saksi Mandat Pemohon yang tidak bertanda tangan. Tetapi, dari yang tidak bertanda tangan itu, kami tidak menemukan bahwa ada C Keberatan atau Kejadian Khusus dari TPS itu. Nah, C.Hasil Salinan itu, dalam pendapat saya, dalam hemat kami, dia tidak bisa dinegasikan dengan daftar hadir pemilih tetap saja.

Kenapa? Karena sebelum penghitungan surat suara, sebelum penghitungan suara, yang dihitung dulu itu adalah menghitung pengguna hak pilih, berapa daftar hadir? Berapa pemilih tetapnya? Berapa pemilih tambahannya? Berapa pemilih khususnya?

Nah, itulah kemudian yang dimasukkan ke C.Hasil. Nah, mestinya di poin itu harus ada keberatan dari Saksi Mandat Pemohon. Ketika tidak ada keberatan di situ, maka harus dimaknai didefinisikan bahwa tidak ada masalah dengan daftar hadir pemilih.

Nah, untuk selanjutnya, Yang Mulia, kami serahkan ke rekan kami.

1548. KETUA: SALDI ISRA [03:31:25]

Bapak, minum dulu, Pak, sudah agak sesak napas Bapak.

1549. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 257/PHPU.GUB-XXIII/2025: ANWAR [03:31:29]

Ya, terima kasih.

1550. KETUA: SALDI ISRA [03:31:30]

Santai saja.

1551. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 257/PHPU.GUB-XXIII/2025: ANWAR [03:31:31]

Mohon izin, Yang Mulia, melanjutkan soal (...)

1552. KETUA: SALDI ISRA [03:31:35]

Tolong dimatikan mik sebelah, ya (...)

1553. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 257/PHPU.GUB-XXIII/2025: ANWAR [03:31:36]

Manipulasi daftar pemilih tetap. Sebagaimana telah diuraikan oleh tadi bahwa dalil Pemohon itu mendalilkan 308 TPS, tapi yang kami temukan sesuai dengan data yang tersaji di Permohonan Pemohon itu hanya 39 TPS. Dari 39 TPS ini, itu jumlah daftar hadir yang dipersoalkan itu sebanyak 276[sic!] orang dari Dalil Pemohon.

1554. KETUA: SALDI ISRA [03:32:05]

Berapa orang?

1555. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 257/PHPU.GUB-XXIII/2025: ANWAR [03:32:06]

276[sic!] orang, Yang Mulia.

1556. KETUA: SALDI ISRA [03:32:08]

276?

1557. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 257/PHPU.GUB-XXIII/2025: ANWAR [03:32:10]

276 orang dari 38 TPS ... eh, 39 TPS yang kami temukan. Kalau di Dalil Pemohon itu menyebut di 308 TPS. Jadi, kami temukan cuma 30 ... ternyata cuma 39 TPS dan Daftar Hadir Pemilih yang dipersoalkan itu hanya 276 orang.

Nah, kalau kita melihat bahwa dari 276 orang itu, Yang Mulia, itu hanya 0,00 sekian persen dari suara sah yang 4.614.244 suara sah, bahkan itu tidak mencapai 1% dari total suara sah.

Selanjutnya, Yang Mulia. Itu di dalil kami di ... ada di halaman 50, Yang Mulia, kalau soal itu.

1558. KETUA: SALDI ISRA [03:33:08]

Oke, apa lagi? Cukup?

1559. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 257/PHPU.GUB-XXIII/2025: ANWAR [03:33:13]

Perihal tuduhan Termohon secara sistematis melakukan[sic!], tapi ini sudah dijawab oleh teman tadi. Saya kira untuk itu cukup, kami langsung ke (...)

1560. KETUA: SALDI ISRA [03:33:25]

Petitum?

**1561. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
257/PHPU.GUB-XXIII/2025: ANWAR [03:33:26]**

Petitum, Yang Mulia.

1562. KETUA: SALDI ISRA [03:33:27]

Silakan.

**1563. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
257/PHPU.GUB-XXIII/2025: DAMANG [03:33:31]**

Belum mengenai C Pemberitahuan, Yang Mulia.

**1564. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
257/PHPU.GUB-XXIII/2025: ANWAR [03:33:33]**

Oh ya, C Pemberitahuan, Yang Mulia.

1565. KETUA: SALDI ISRA [03:33:34]

Waktunya 15 menit, Pak.

**1566. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
257/PHPU.GUB-XXIII/2025: DAMANG [03:33:35]**

Ya, saya (...)

1567. KETUA: SALDI ISRA [03:33:37]

Ya.

**1568. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 257 PERKARA NOMOR
257/PHPU.GUB-XXIII/2025: DAMANG [03:33:38]**

Minta 10 menit, Yang Mulia.

1569. KETUA: SALDI ISRA [03:33:40]

Eh, enggak bisa 10 menit, 2 menit lagi. Yang mengatur waktu itu saya, Pak, bukan Bapak.

**1570. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
257/PHPU.GUB-XXIII/2025: DAMANG [03:33:46]**

Ya, ya ya. Terimakasih, Yang Mulia.

Mengenai ada dugaan penahanan distribusi C.Hasil KWK, kami mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada penghalangan hak pilih di situ. Karena kalau kita baca.

1571. KETUA: SALDI ISRA [03:34:08]

Itu ada enggak di keterangan Bapak?

**1572. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
257/PHPU.GUB-XXIII/2025: DAMANG [03:34:09]**

Ada, Yang Mulia.

1573. KETUA: SALDI ISRA [03:34:10]

Di halaman berapa?

**1574. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
257/PHPU.GUB-XXIII/2025: DAMANG [03:34:16]**

Di halaman 53. Sebenarnya di situ Keputusan Komisi Pemilihan Umum 1774/2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan, bukan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229/2024[sic!].

1575. KETUA: SALDI ISRA [03:34:32]

Oh, nomornya salah, ya?

**1576. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
257/PHPU.GUB-XXIII/2025: DAMANG [03:34:33]**

Ya, Yang Mulia.

1577. KETUA: SALDI ISRA [03:34:34]

Apa lagi?

1578. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 257/PHPU.GUB-XXIII/2025: DAMANG [03:34:35]

Nah, kalau kita baca juknisnya KPU tentang pungut hitung, itu bisa juga pemilih itu yang datang mengambil C Pemberitahuan di KPPS, itu kalau ada di halaman 11 Juknis KPU 1774 Tahun 2024. Bahkan, bisa nanti di TPS diberikan kalau dia datang di TPS. Sehingga kalau alasan penahanan distribusi C Hasil ... C Pemberitahuan itu tidak berdasar karena masih memungkinkan hak itu dimudahkan ketika dia datang di TPS untuk diberikan.

1579. KETUA: SALDI ISRA [03:35:15]

Oke, langsung Petitem Pak, cukup.

1580. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 257/PHPU.GUB-XXIII/2025: DAMANG [03:35:17]

Langsung Petitem, Yang Mulia. Demikian.

1581. KETUA: SALDI ISRA [03:35:18]

Ya.

1582. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 257/PHPU.GUB-XXIII/2025: ANWAR [03:35:19]

Ya, terima kasih. Izin melanjutkan, Yang Mulia.
Petitem.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3119 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 bertanggal 8 Desember 2024, pukul 23.20 WITA.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami. Kuasa Hukum Pihak Terkait.

Terima kasih, Yang Mulia.

1583. KETUA: SALDI ISRA [03:36:07]

Terima kasih.
Sekarang, Bawaslu.

1584. BAWASLU: ANDARIAS DUMA [03:36:13]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

1585. KETUA: SALDI ISRA [03:36:18]

Walaikumsalam.

1586. BAWASLU: ANDARIAS DUMA [03:36:18]

Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat siang.
Majelis Yang Mulia, kami akan menyampaikan Keterangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan terhadap Perkara Nomor 257/PHPU dan seterusnya, yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Gubernur, Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor Urut 1.
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
Di Jakarta.
Yang bertanda tangan di bawah ini.
Mardiana Rusli, Dr. Adnan Jamal, Drs. Saiful Jihad, Dr. Samsuar Saleh, Dr. Abdul Malik (...)

1587. KETUA: SALDI ISRA [03:36:57]

Eggak usah disebut nama-namanya, Pak.

1588. BAWASLU: ANDARIAS DUMA [03:36:00]

Dan seterusnya (...)

1589. KETUA: SALDI ISRA [03:36:58]

Lanjut.

1590. BAWASLU: ANDARIAS DUMA [03:37:02]

Oke. Semuanya adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan.
Terhadap dalil yang disampaikan oleh Pemohon, ada 5 dalil yang disampaikan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, akan menyampaikan keterangannya seperti berikut.

Yang pertama, Pemohon pada pokoknya mendalilkan anomali jumlah surat suara tidak sah di Pilkada Tahun 2024.

Halaman 3 di keterangan kami, kami akan menyampaikan keterangan bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan dan Bawaslu Kota Makassar telah melakukan langkah pencegahan dengan mengeluarkan Surat Imbauan Nomor 1026 dan seterusnya, tanggal 22 Desember 2024 dan 274/HK dan seterusnya, tanggal 22 Desember 2024. Itu dikeluarkan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan kepada KPU Provinsi Sulawesi Selatan dan Bawaslu Kota Makassar kepada KPU Kota Makassar.

Kemudian yang kedua, Pemohon pada pokoknya mendalilkan keterangan keterlibatan ASN. Di keterangan kami halaman 5, kami mau sampaikan keterangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan seperti berikut ini.

Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan (ucapan tidak terdengar jelas) Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 032/PL dan seterusnya, tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya melaporkan Pj Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Prof. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H. yang diduga melakukan kampanye terselubung yang menguntungkan Paslon Nomor Urut 2, dengan cara berulang kali menyatakan pilihannya hanya 2 pada acara doa bersama lintas agama untuk Pilkada Damai Sulawesi Selatan, Bukti PK-25-5. Ini dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Yang Mulia.

1591. KETUA: SALDI ISRA [03:39:09]

Acaranya itu?

1592. BAWASLU: ANDARIAS DUMA [03:39:10]

Ya.

1593. KETUA: SALDI ISRA [03:39:11]

Oke. Itu makanya kemarin itu saya usulkan, besok enggak usah pakai nomor-nomor urut lagi lah. Pusing kita, salah menyebut angka ditafsirkan begini dan segala macam, apalagi kalau 2, 3 pasang calon, kan. Baik Pilpres kemudian Pilkada, cukup gambarnya saja, jadi orang ndak boleh punya misspersepsi terhadap angka lagi, begitu. Kan sudah jelas itu kalau 3 pasang calon, ada 3 kotak yang mana kamu pilih-pilih, nanti ngitungnya, kan sebut aja namanya si A, si B, si C, begitu. Jadi, enggak ada lagi soal-soal angka begitu, nanti orang nunjuk sholat disalahkan juga nanti. Ya, kan?

1594. BAWASLU: ANDARIAS DUMA [03:39:49]

Siap, Yang Mulia.

1595. KETUA: SALDI ISRA [03:36:00]

Kan sholat nunjuk satu, gini kan? Nah, itu.
Silakan tapi, biar didengar lah oleh pembentuk undang-undang yang soal begini ini. Silakan.

1596. BAWASLU: ANDARIAS DUMA [03:39:59]

Saya teruskan, Yang Mulia (...)

1597. KETUA: SALDI ISRA [03:39:59]

Ya.

1598. BAWASLU PERKARA NOMOR 257/PHPU.GUB-XXIII/2025: ANDARIAS DUMA [03:40:01]

Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan 007/ dan seterusnya, tanggal 14 November 2024 yang pada pokoknya melaporkan Pj Gubernur Sulawesi Selatan pada Panitia Hut Sulsel Ke-355.

Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2024 bertempat di Monumen Mandala Makassar telah dilaksanakan gerak jalan santai dalam HUT ke-355. Bahwa dengan adanya kegiatan jalan santai tersebut, terlebih dilaksanakan bertepatan dengan masa kampanye dan adanya dugaan pengerahan siswa, serta banyak diikuti oleh ASN mengakibatkan adanya potensi pelanggaran netralitas ASN terhadap paslon tertentu.

Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan mengeluarkan Surat Pemberitahuan tentang Status Laporan tanggal 18 Oktober 2024, yang pada pokoknya, laporan tidak dapat diregister, karena pelapor tidak melengkapi dan memperbaiki laporan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan berdasarkan Perbawaslu 9 Tahun 2024.

1599. KETUA: SALDI ISRA [03:41:14]

Oke, lanjut.

1600. BAWASLU PERKARA NOMOR 257/PHPU.GUB-XXIII/2025: ANDARIAS DUMA [03:41:14]

Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan mengenai laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 014 dan seterusnya tanggal 16 November ... 16 Oktober 2024, yang pada pokoknya melaporkan PJ Bupati Sopeng yang diduga mengeluarkan surat edaran untuk mengerahkan seluruh ASN Kabupaten Sopeng agar ikut serta dalam kegiatan santai serentak tanggal 13 Oktober 2024 yang diikuti oleh (...)

1601. KETUA: SALDI ISRA [03:41:40]

Kegiatan jalan santai maksudnya, ya?

1602. BAWASLU PERKARA NOMOR 257/PHPU.GUB-XXIII/2025: ANDARIAS DUMA [03:41:40]

Ya.

1603. KETUA: SALDI ISRA [03:41:40]

Oke, terus.

1604. BAWASLU PERKARA NOMOR 257/PHPU.GUB-XXIII/2025: ANDARIAS DUMA [03:41:43]

Yang diikuti oleh Andi Sudirman Calon Gubernur Nomor Urut 2 (Bukti PK-27/9). Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Sopeng mengeluarkan Surat Pemberitahuan tentang Status Laporan tanggal 22 Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan dihentikan Sentra Gakkumdu Kabupaten Sopeng karena dikarenakan tidak terpenuhi, khususnya sebagai tindak pidana pemilihan.

Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan 010/PL dan seterusnya tanggal 14 Oktober 2024, yang pada pokoknya melaporkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Makassar yang diduga melakukan mobilisasi siswa, untuk perekaman KTP yang mengandung unsur politis (Bukti PK-27/11).

Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan mengeluarkan surat pemberitahuan tentang status laporan tanggal 18 Oktober 2024, yang pada pokoknya laporan tidak dapat ditindaklanjuti, tidak dapat diterima, karena pelapor tidak mampu menjelaskan secara detail identitas terlapor, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Makassar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf h Perbawaslu 9 Tahun 2024.

Bahwa Bawaslu Provinsi Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan Formulir Laporan 018/PL dan seterusnya tanggal 18 Oktober 2024 yang pada pokoknya melaporkan PJ Sekda Kota Makassar Iwan Ruspiandi Adnan[sic!] yang diduga terindikasi terafiliasi dengan Partai Politik dan Paslon Gubernur Nomor Urut 2 karena tanggal 6 September 2024, Relawan Pakintaki yang merupakan tagline dari Iwan Ruspiandi Adnan[sic!] mendatangi Kantor DPP NasDem dan bertemu langsung Fatmawati Rusdi.

Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan mengeluarkan Surat Pemberitahuan tentang Status Laporan tanggal 28 Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan tidak terbukti, sebagai pelanggaran pemilihan karena diduga ... karena dugaan tindak pidana pemilihan dilakukan oleh terlapor, yaitu Pasal 188 juncto Pasal 71 Undang-Undang 10/2018 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Wali ... dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wali Kota dinyatakan tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran hukum lainnya yang dilakukan oleh terlapor, yang dimaksud dalam Undang-Undang 20 Tahun 2023 dan seterusnya.

1605. KETUA: SALDI ISRA [03:44:44]

Jangan detail betul, Pak, detail-detailnya urusan kami nanti, poin-poin ini saja, Pak. Apa lagi yang mau disampaikan?

1606. BAWASLU: ANDARIAS DUMA [03:44:54]

Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan melaporkan dugaan Pelanggaran Pemilihan Berdasarkan Formulir 002/PL dan seterusnya, tanggal 30 September 2024 yang pada pokoknya melaporkan Saudara Yarham, S.TTP.,[sic!], M.Si., yang merupakan Kepala UPTP Pendapatan[sic!] Wilayah 1 Makassar dan dalam proses penanganan pelanggaran di Sentra Gakkumdu dan sampai di Putusan Pengadilan, memutuskan Perkara Nomor 1357/Pida ... Pid.Sus dan seterusnya tanggal 15 November 2024 yang pada pokoknya:

1. Menyatakan terdakwa Yarham Yasmin, S.STP., M.Si., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilukada.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Yarham Yasmin, S.STP., M.Si., dengan pidana penjara 3 bulan.
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani.
4. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa Yarham Yasmin, S.STP., M.Si., sejumlah Rp4.000.000,00.

Kemudian, Pokok Permohonan mendalilkan praktik nepotisme, kolusi, dan nepotisme. Kami mau sampaikan bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan langkah pencegahan mengeluarkan Surat Imbauan Nomor 11 dan seterusnya tanggal 28 Agustus 2024, yang pada pokoknya mengimbau kepada pejabat, karyawan dan jajaran grup BUMN di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat menguntungkan atau merugikan, baik sebelum maupun setelah ditetapkan Calon Kepala Daerah, Calon Wakil Kepala Daerah di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dalam bentuk penggunaan fasilitas negara, fasilitas jabatan maupun program-program pemerintah.

1607. KETUA: SALDI ISRA [03:47:07]

Oke. Soal ... apa ... manipulasi daftar hadir secara masif itu, Pak, di Makassar.

1608. BAWASLU: ANDARIAS DUMA [03:47:16]

Baik, Yang Mulia. Kami akan menyampaikan. Bahwa terhadap dugaan pemalsuan manipulasi daftar hadir di Provinsi Sulawesi Selatan di dalil Pemohon, ada 20 kabupaten/kota yang didalilkan dan sejumlah 315 TPS yang didalilkan, ada 271 saksi yang bertanda tangan di C Salinan ... hasil ... Hasil C.Salinan, pemilihan gubernur, wakil gubernur. Kemudian, ada 44 tidak tanda tangan, karena di laporan hasil pengawasan pengawas TPS bahwa saksi pasangan calon tersebut tidak ada di lokasi TPS.

1609. KETUA: SALDI ISRA [03:48:13]

Jadi saksinya yang tidak ada, ya? Bukan tidak tanda tangan, ya?

1610. BAWASLU: ANDARIAS DUMA [03:48:17]

Siap, Yang Mulia.

1611. KETUA: SALDI ISRA [03:48:18]

Itu di ... dibagi-bagi enggak? Yang mana yang ada, mana yang tidak? Ada, ya?

1612. BAWASLU: ANDARIAS DUMA [03:48:23]

Ada di ... di keterangan kami dan alat bukti kami.

1613. KETUA: SALDI ISRA [03:48:27]

Ini yang halaman 22 sampai halaman 49, semuanya?

1614. BAWASLU: ANDARIAS DUMA [03:48:34]

Ya, Yang Mulia.

1615. KETUA: SALDI ISRA [03:48:35]

Oke, lanjut. Halaman 49, apa ... apa ... yang mau disampaikan? Ada lagi?

Ini soal distribusi, dalil yang soal distribusi suara itu, pem ... apa itu ... surat suara, surat panggilan, di halaman 54. Tidak melakukan distribusi sebagian Formulir C-6 kepada pemilih.

1616. BAWASLU: ANDARIAS DUMA [03:49:19]

Ya, baik, Yang Mulia. Kami akan menyampaikan keterangan kami, bahwa Bawaslu Provinsi Selatan[sic!] telah melakukan langkah pencegahan dengan mengeluarkan Surat Imbauan Nomor 1026/HK dan seterusnya, tanggal 22 November 2024, yang pada pokoknya mengimbau kepada KPU Provinsi Sulawesi Selatan agar memastikan, menyampaikan undangan dan/atau Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih Model C6.Pemberitahuan.

1617. KETUA: SALDI ISRA [03:49:50]

Pertanyaannya, memang banyak yang tidak didistribusikan dari pantauan? Dari ... apa ... hasil pengawasan?

1618. BAWASLU: ANDARIAS DUMA [03:49:57]

Ya. Baik, Yang Mulia.

Berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS kami memang, ada yang tidak tersampaikan. Ada, misalnya tidak diketahui, tidak dikenal, sudah meninggal dan ada beberapa poin-poin yang ... yang tercantum di dalam laporan hasil pengawasan pengawas TPS, Yang Mulia.

1619. KETUA: SALDI ISRA [03:50:26]

Ya, mestinya kan, soal-soal yang begini ini, harus jadi fokus sama Bawaslu, ini kan soal-soal yang berulang saja terus, ini.

Jadi ndak cukup dengan mengirim surat imbauan, begini, begini, Anda duduk saja di kantor, begitu. Mestinya digerakkan semuanya,

untuk memantau ini, bagaimana pendistribusian C-6 dan segala macamnya.

Nah, itu bagaimana tuh di Sulawesi Selatan, itu? Setelah diimbau, bagaimana lagi tindakan Bawaslu?

Silakan, Bu.

1620. BAWASLU: MARDIANA RUSLI [03:51:00]

Ya. Izin, Yang Mulia. Menjelaskan bahwa setelah kita memberikan imbauan, kita juga melakukan patroli pengawasan, tiga hari menjelang hari pemungutan suara, untuk memastikan pendistribusian C.Pemberitahuan.

Untuk 24 Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan yang terdistribusi, sebenarnya sudah sebanyak 5.826.334 atau seban ... 87,2% dari jumlah angka DPT 6,6.

1621. KETUA: SALDI ISRA [03:51:29]

Oke.

1622. BAWASLU: MARDIANA RUSLI [03:51:31]

Untuk di Kota Makassar sendiri, yang terdistribusi sebanyak 844.597 dari jumlah DPT 1.037.167 atau sebanyak hitungan kami yang tidak terdistribusi sebanyak sembilan ... 192.567 atau sekitar 12% dari jumlah DPT. Dari pengamatan kami, memang kita mengingatkan kepada KPU terkait dengan mereka yang tidak bersyarat untuk mendapatkan C Pemberitahuan, termasuk meninggal, tidak dikenal, dan pindah domisili.

Nah, itu yang kami perhatikan dalam pengawasan kami terkait pendistribusian C.Pemberitahuan atau C-6.

1623. KETUA: SALDI ISRA [03:52:15]

Cukup?

1624. BAWASLU: MARDIANA RUSLI [03:52:16]

Cukup, Yang Mulia.

1625. KETUA: SALDI ISRA [03:52:17]

Terima kasih.

Silakan ... apa ... kalau ada yang mau bertanya nanti ya, kita sahkan bukti dulu.

Mulai dari Perkara Nomor 15, Kota Langsa. Pemohon menambahkan Bukti P-56 sampai dengan P-64. Betul, Langsa?

1626. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 15/PHPU.WAKO-XXIII/2025: FADJRI [03:52:55]

Izin, Yang Mulia. Kami masih ada beberapa penambahan lagi, Yang Mulia.

1627. KETUA: SALDI ISRA [03:52:59]

Kalau sekarang sudah tidak bisa, nanti lagi, Pak. Tidak bisa kita verifikasi sekarang.

1628. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 15/PHPU.WAKO-XXIII/2025: FADJRI [03:53:02]

Baik terima kasih, Yang Mulia.

1629. KETUA: SALDI ISRA [03:53:03]

Yang 56 sampai 64, betul?

1630. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 15/PHPU.WAKO-XXIII/2025: FADJRI [03:53:06]

Benar, Yang Mulia.

1631. KETUA: SALDI ISRA [03:53:07]

Tapi P-61 tidak ada bukti fisik dan softcopy DAB belum diserahkan. Nanti tolong diserahkan soft DAB ya, Daftar Alat Bukti ya, dan bukti P-61 tidak ada buktinya. Yang tidak ada masalah, disahkan.

KETUK PALU 1X

Termohon menyerahkan Bukti T-1 sampai dengan T-37. Termohon, Langsa? Betul, ya? Tapi catatan T-24 locus TPS tidak terbaca dengan jelas. Nanti tolong dijelaskan, ya. Apa nama desanya? Desa Mutia? Yang 24 (...)

1632. KUASA HUKUM TERMOHON: CHAIRUL AZMI [03:53:52]

Ya, sebagaimana daftar alat bukti, Yang Mulia, TPS 2.

1633. KETUA: SALDI ISRA [03:53:53]

Oke, disahkan.

KETUK PALU 1X

Pihak Terkait menyerahkan Bukti PT-1 sampai dengan PT-15.
Pihak Terkait? Ada yang belum dileges?

**1634. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
17/PHPU.WAKO-XXIII/2025: GIRINDRA SANDINO [03:54:15]**

Ini sudah.

1635. KETUA: SALDI ISRA [03: 54:15]

Sudah dikasih leges belum? Sudah, ya? Nanti diserahkan, ya?

**1636. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
17/PHPU.WAKO-XXIII/2025: GIRINDRA SANDINO [03:54:16]**

Oke, terima kasih, Yang Mulia.

1637. KETUA: SALDI ISRA [03:54:19]

KETUK PALU 1X

Panwaslih PK2.22-1 sampai dengan PK2.22-65. Betul?
Disahkan.

KETUK PALU 1X

Identitas Kuasa Hukum ini Pihak Terkait atas nama Linceria
Lestari, ini KTA-nya tidak jelas. Ya, nanti tolong diberikan yang jelasnya.
Kemudian, Nomor 17 masih Kota Langsa, Termohon menyerahkan
T-1 sampai T-15. Sama, ya?

1638. BAWASLU: FAUZI FAZHARI [03:55:05]

Ya, benar.

1639. KETUA: SALDI ISRA [03:55:05]

Oke.

KETUK PALU 1X

Pihak Terkait PT-1 sampai dengan PT-3. Betul? Tapi ini ada PT-3 belum dileges. Nah, itu Anda serahkan ya? Oke, disahkan.

KETUK PALU 1X

Panwaslu, PK2.22.1 sampai dengan PK2.22-39.

1640. BAWASLU: FAUZI FAZHARI [03:55:30]

Benar, Yang Mulia.

1641. KETUA: SALDI ISRA [03:55:30]

Oke, disahkan.

KETUK PALU 1X

Kuasa Hukum yang tadi, sama karena ini sama Pihak Terkaitnya. Pihak ... Pihak Terkaitnya sama juga. Untuk Perkara 136 OKU Selatan, Pemohon softcopy men ... apa ... database versi Word P-80[sic!] sampai dengan P1-64 belum ada, Pemohon. Nanti dilengkapi.

1642. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 136/PHPU.BUP-XXIII/2025: OKVYAN KELLY ALAMSYAH [03:56:07]

Siap, Yang Mulia.

1643. KETUA: SALDI ISRA [03:56:07]

Oke. Termohon menyerahkan Bukti T-1 sampai dengan T-59, disahkan.

KETUK PALU 1X

Pihak Terkait, menyerahkan Bukti PT-1 sampai dengan PT-62, disahkan.

KETUK PALU 1X

Bawaslu menyerahkan Bukti PK.5.9 sampai ... -0001 sampai dengan PK.5.9-160. Benar, tapi ada catatan ini. PK.5.9-034 dan PK.5.9-044 berupa daftar hadir tidak jelas. Ya, oke. Disahkan di luar yang tidak bermasalah.

KETUK PALU 1X

Identitas Kuasa Hukum, KTA ... apa ... KTA Kuasa Hukum Termohon telah habis masa berlakunya, Ikhwan, Arman, Ahmad Aziz, Dewi Ambawati, Fadel, ini untuk Kuasa Termohon. Kalau tidak masuk perbaikan atau bukti sudah diperpanjang, nanti akan kita coret di dokumen kita.

Kemudian, Kuasa Hukum Pihak Terkait habis masa berlakunya atas nama Mustaqim.

Perkara Nomor 39, Kabupaten Mesuji Termohon T-1 sampai dengan T-47, Mesuji, benar? Oke disahkan.

KETUK PALU 1X

Pihak Terkait PT-1 sampai dengan PT-24?

1644. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 39/PHPU.BUP-XXIII/2025: AIDA MARDATILLAH [03:57:59]

Benar, Yang Mulia.

1645. KETUA: SALDI ISRA [03:58:00]

Disahkan.

KETUK PALU 1X

Bawaslu PK.8.11-1 sampai dengan PK.8.11-37. Oke, disahkan.

KETUK PALU 1X

KTA Kuasa Hukum Pihak Terkait atas nama Ridwan Suherman sudah habis masa berlakunya.

1646. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 39/PHPU.BUP-XXIII/2025: AIDA MARDATILLAH [03:58:18]

Sudah dilampirkan sebelumnya, Yang Mulia.

1647. KETUA: SALDI ISRA [03:58:20]

Oke, nanti diklarifikasi, ya.

1648. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 39/PHPU.BUP-XXIII/2025: AIDA MARDATILLAH [03:58:23]

Baik, Yang Mulia.

1649. KETUA: SALDI ISRA [03:58:25]

Nomor 69, Kota Batam.

Kuasa Hukum Pemohon atas nama Khoirul Akbar, Sulhan, Faturrohman, Abdul Hakim, Erik Setiawan, Sylvia Widiastuti, Faylmon Halawa, Makmur Susanto sudah habis masa berlakunya. Mana ini ... apanya ... kapan mau diserahkan? Hari ini, kalau enggak, nanti dicoret semuanya.

Bukti, Termohon menyerahkan Bukti T-1 sampai dengan T-45, benar.

KETUK PALU 1X

Pihak Terkait PT-1 sampai dengan PT-34, benar, disahkan.

KETUK PALU 1X

Bawaslu PK.7.6-01 sampai dengan PK.7.6-36.

1650. BAWASLU: ANTONIUS ITOLOHA GAHO [03:59:20]

(Ucapan tidak terdengar jelas), kemudian beberapa yang lembaran nanti kita ganti karena typo.

1651. KETUA: SALDI ISRA [03:59:26]

Oke, ya. Oke, nanti berkoordinasi dengan Kepaniteraan.

KETUK PALU 1X

1652. BAWASLU: ANTONIUS ITOLOHA GAHO [03:59:33]

Terima kasih, Yang Mulia.

1653. KETUA: SALDI ISRA [03:59:36]

KTA Kuasa Hukum Termohon atas nama Afif Rosadiansyah, Nurul Anifah, Ahabib Amanatullah Rahdar, Uca Widia, Anjarnawan Yuski, Mursalim, tidak jelas. Nanti tolong dilengkapi Kuasa Hukum Termohon.

Kuasa Hukum Pihak Terkait atas nama Wafdah Zikra Yuniarsyah, Raka Ghani Pizani, Muhammad Rizki Ramadhan, Mustaqim Al-Ghazali, sudah habis masa berlakunya.

Ya, sudah di-submit. Kapan? Nanti kita cek, ya. Terima kasih.

Nomor 152, Kabupaten Deli Serdang, Pemohon tidak menambahkan bukti, ya.

Termohon T-1 sampai dengan T-36, benar.

KETUK PALU 1X

Pihak Terkait PT-1 sampai dengan PT-31D, benar.

KETUK PALU 1X

Bawaslu, PK-3.7-1 sampai dengan PK-3.7-28, benar.

KETUK PALU 1X

Terakhir. Provinsi Sulawesi Selatan, Gubernur.

Pemohon tidak menambahkan bukti.

Termohon T-1 sampai dengan T-29, benar.

KETUK PALU 1X

Pihak Terkait PT-1 sampai dengan PT-3, PT-5 sampai dengan PT-327.

1654. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 257/PHPU.GUB-XXIII/2025: [04:01:59]

Benar, Yang Mulia.

1655. KETUA: SALDI ISRA [04:01:59]

Benar, ya.

KETUK PALU 1X

Bawaslu, PK.27-1 sampai dengan PK.27-87.

1656. BAWASLU: ANDARIAS DUMA [04:02:00]

Benar, Yang Mulia.

1657. KETUA: SALDI ISRA [04:02:02]

Benar.

KETUK PALU 1X

Ini pengumuman. Penundaan Sidang, ya, untuk Perkara 15, 17, 136, 39, 169, 152, 257 PHPU.WAKO, Bupati, dan Gubernur.

Satu, pemeriksaan perkaranya akan dilaporkan dalam RPH. Jadi, nanti RPH lah yang akan memutuskan, apakah Permohonan ini akan berhenti sampai di tingkat dismissal atau akan dilanjutkan. Nah, ini beda-beda doa ini. Kalau Pihak Terkait, Pihak Termohon, Bawaslu, mohonnya sudah dihentikan sejadi dismissal. Pekerjaan berkurang, honorinya tetap penuh. Tapi kalau Pihak ... apa ... Pemohon mendoakan supaya dilanjutkan ke pembuktian lanjut. Jadi ini beda-beda, tergantung rezeki masing-masing lah, nanti mana yang akan terbukti.

Kemudian, apabila pemeriksaan perkara dilanjutkan. Ini apabila dilanjutkan, maka agenda Sidang selanjutnya adalah pembuktian untuk mendengarkan keterangan saksi dan/atau ahli dan pengesahan alat bukti tambahan dengan ketentuan. Jumlah saksi atau ahli untuk provinsi atau gubernur maksimal 6 orang, jadi maksimal 6 orang. Jadi mau ahli enam-enamnya boleh, mau saksi enam-enamnya juga boleh. Tapi maksimal totalnya cuma enam, atau satu ahli, lima saksi. Tergantung kebutuhan dari masing-masing perkara, sesuai dengan kepentingan para pihak.

Kalau untuk kabupaten/kota maksimalnya 4 orang, itu untuk kabupaten/kota.

Daftar identitas dan keterangan saksi, serta daftar CV dan keterangan ahli diajukan ke MK paling lambat satu hari kerja sebelum sidang pembuktian. Jadi daftar identitas, keterangan, kesaksian atau saksi ahli sudah punya makalahnya. Kalau saksi biasa, sudah ada list apa yang akan diterangkan sebagai saksi. Nah, itu sudah diterima Mahkamah, paling lambat satu hari kerja sebelum hari pembuktian, sesuai dengan panggilan sidang nanti.

Sidang lanjutan akan ditentukan. Kemudian Para Pihak menunggu panggilan secara resmi melalui Kepaniteraan. Jadi nanti setelah putusan dismissal, akan dipanggil bagi perkara yang lanjut ke pembuktian berikutnya.

Terakhir, penambahan alat bukti dan inzage untuk perkara yang telah selesai Sidang Pemeriksaan Persidangan, jawaban KPU, keterangan Pihak Terkait, dan keterangan Bawaslu, baru dapat dilakukan dan

diajukan setelah putusan dismissal, bagi yang lanjut ke pembuktian berikutnya. Jadi kalau ada perkara yang lanjut, mau menambah bukti dan segala macamnya, atau mau melakukan dismissal, baru bisa dilakukan setelah putusan dismissal nanti. Jadi nunggu saja lah, mana yang berhenti di dismissal enggak usah tambah lagi apa bukti-buktinya.

Cukup? Ada yang mau mengajukan pertanyaan, terutama Pemohon sekarang, giliran Pemohon.

Silakan.

1658. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 257/PHPU.GUB-XXIII/2025: DONAL FARIZ [04:04:57]

Terima kasih. Izin, Yang Mulia.

1659. KETUA: SALDI ISRA [04:04:59]

Duduk saja, ya.

1660. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 257/PHPU.GUB-XXIII/2025: DONAL FARIZ [04:05:01]

Kami hanya ingin mengkonfirmasi, Yang Mulia.

1661. KETUA: SALDI ISRA [04:05:01]

Ya.

1662. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 257/PHPU.GUB-XXIII/2025: DONAL FARIZ [04:05:01]

Ada 6 kalau untuk di Pilgub.

1663. KETUA: SALDI ISRA [04:05:07]

Ya.

1664. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 257/PHPU.GUB-XXIII/2025: DONAL FARIZ [04:05:07]

Apakah panggilan sidangnya selanjutnya itu menghadirkan 6 ahli atau saksi, atau ada 2 sesi untuk pembuktian saksi dan ahli dari Pihak Pemohon? Itu saja, Yang Mulia.

1665. KETUA: SALDI ISRA [04:05:18]

Akan ... akan sekali jalan.

1666. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 257/PHPU.GUB-XXIII/2025: DONAL FARIZ [04:05:18]

Akan sekali jalan.

1667. KETUA: SALDI ISRA [04:05:18]

Akan diberi waktu, misalnya perkara nomor sekian, pagi pukul 8 sampai siang, selesai. Nanti akan ada lagi perkara berikutnya, jadi akan digabungkan, tidak akan dipisah-pisah.

1668. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 257/PHPU.GUB-XXIII/2025: DONAL FARIZ [04:05:35]

Berarti hanya 1 hari saja, ya?

1669. KETUA: SALDI ISRA [04:05:37]

Ya, satu kali sesi sidang.

1670. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 257/PHPU.GUB-XXIII/2025: DONAL FARIZ [04:05:40]

Terima kasih, Yang Mulia.

1671. KETUA: SALDI ISRA [04:05:40]

Jadwalnya bisa 3, 4, 5 jam, tergantung tingkat kerumitan perkara. Ada yang lain? Tunggu dulu, sini dulu, ya. Sabar dulu. Pemohon.

1672. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 15/PHPU.WAKO-XXIII/2025: FADJRI [04:05:52]

Izin (...)

1673. KETUA: SALDI ISRA [04:05:52]

Perkara berapa?

1674. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 15/PHPU.WAKO-XXIII/2025: FADJRI [04:05:52]

Perkara Nomor 15, Yang Mulia.

1675. KETUA: SALDI ISRA [04:05:56]

15, Kota Langsa.

1676. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 15/PHPU.WAKO-XXIII/2025: FADJRI [04:05:58]

Ya, Majelis, Yang Mulia. Tadi sebagaimana sudah kami sampaikan bahwa ada alat bukti yang masih belum kami sampaikan. Mohon untuk bisa diserahkan hari ini, Yang Mulia.

1677. KETUA: SALDI ISRA [04:06:08]

Kalau diserahkan pun, sekarang tidak bisa diverifikasi, ya. Kan sudah diberitahukan sebelumnya, tolong diserahkan sebelum sidang atau ketika sidang, ini sudah mau selesai, Bapak serahkan, kan Bapak dengar pengumuman kan di sidang sebelumnya? Ya. Sidang awal ketika Pemohon menyampaikan Permohonan.

Ada lagi yang lain? Di barisan Pemohon selesai? Barisan Termohon? Cukup? Pihak Terkait? Yang belakang? Siapa yang angkat tangan tadi? Silakan.

1678. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 136/PHPU.BUP-XXIII/2025: TAREQ MUHAMMAD AZIZ ELVEN [04:06:44]

Ya. Izin, Yang Mulia.

1679. KETUA: SALDI ISRA [04:06:44]

Ya.

1680. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 136/PHPU.BUP-XXIII/2025: TAREQ MUHAMMAD AZIZ ELVEN [04:06:44]

Jadi, untuk Perkara 136 OKU, identitas Kuasa Hukum atas nama Mustakim sudah masuk.

1681. KETUA: SALDI ISRA [04:06:45]

Ya.

1682. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 136/PHPU.BUP-XXIII/2025: TAREQ MUHAMMAD AZIZ ELVEN [04:06:45]

Tanggal 17.

1683. KETUA: SALDI ISRA [04:06:51]

Ya, nanti kita cek.

1684. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 136/PHPU.BUP-XXIII/2025: TAREQ MUHAMMAD AZIZ ELVEN [04:06:51]

Siap, Terima kasih.

1685. KETUA: SALDI ISRA [04:06:53]

Ya. Ada lagi? Cukup? Bawaslu? Karena jempol dua ini. Hati-hati Pak, nanti tidak netral nanti, dikatakan pilih Nomor 2 nanti. Nah, jadi kita sensitif sekali dengan angka ini, biar Pak Denny yang menyuarakan nanti, supaya tidak ada lagi nomor-nomor urut ini.

Terima kasih. Dengan demikian, Kami berterima kasih kepada semua kita yang hadir dalam ruangan ini. Baik Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu yang sudah mengikuti sidang dengan tertib. Dan apa pun hasilnya nanti, kita tunggu perkembangan berikutnya dan akan segera diberi tahu oleh Mahkamah. Dan kami dari Panel mengucapkan terima kasih kepada kita semua, yang sudah mengikuti sidang dengan tertib.

Dengan demikian, Sidang ini ditunda, dan Sidang untuk Perkara Nomor 15, 17, 136, 39, 169, 152, 257 PHPU Wali Kota, Bupati, dan Gubernur Tahun 2025 dinyatakan selesai, sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.06 WIB

Jakarta, 20 Januari 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

